

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH DAERAH  
KEPADA ORGANISASI MASYARAKAT PEMERINTAH  
KABUPATEN TANA TIDUNG**



**UNIVERSITAS TERBUKA**

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat  
Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :**

**NOR ASFAHANA**

**NIM. 500646474**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS TERBUKA**

**JAKARTA**

**2018**

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH DAERAH KEPADA ORGANISASI MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG Adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (Plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Tideng pale, 18 Februari 2018

Yang Menyatakan,

METERAI  
TEMPEL  
346FDAEF554661369  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH



(Nor Asfahana)

NIM. 500646474

**ABSTRACT****THE EFFECTIVENESS OF THE GRANT TO COMMUNITY ORGANIZATIONS IN LOCAL GOVERNMENTS TANA TIDUNG**

**Nor Asfahana**  
[assvehone@gmail.com](mailto:assvehone@gmail.com)

**Postgraduate Program**  
**Terbuka University**

*Grant funding to community organizations in the region often runs ineffectively due to many factors, especially in the organization. This study aims to determine the provision of grant aid to community organizations in Tana Tidung Regency. This research is qualitative research evaluative approach. Data were collected through observation, interviews and documentation. Informant was taken by purposive sampling with 6 peoples. The results show that by measuring the effectiveness using 4 Robbins approach (1994), 3 approaches are proved that the grant program is effective and there is 1 approach that proves ineffective. An effective approach is the goal attainment approach of the objectives is evidenced by the goal of grant, strategic-constituencies approach is evidenced by the existence of the participation of the organizations and a good relationship between the organizations with local governments and competing-values approach is evidenced by the grants are able to develop the values of learning into a better direction. The ineffective approach is the system approach this is due to the lack of coordination between sections and parts that do not carry out its role in accordance with the regulations.*

**Keywords:** *Effectiveness, Grant, Realization and Policy*



**ABSTRAK****EFEKTIVITAS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH DAERAH KEPADA  
ORGANISASI MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN  
TANA TIDUNG**

**Nor Asfahana**  
[assvehone@gmail.com](mailto:assvehone@gmail.com)

**Program PascaSarjana**  
**Universitas Terbuka**

Pemberian dana Hibah terhadap organisasi kemasyarakatan di daerah seringkali berjalan tidak efektif yang disebabkan oleh banyak faktor, terutama pada organisasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberian bantuan hibah kepada organisasi masyarakat di Kabupaten Tana Tidung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan evaluatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber diambil berdasarkan teknik *purposive sampling* dengan jumlah 6 orang. Hasil penelitian menunjukkan dengan pengukuran efektivitas menggunakan 4 pendekatan Robbins (1994) diperoleh 3 pendekatan yang membuktikan bahwa program hibah efektif dan ada 1 pendekatan yang terbukti tidak efektif. Pendekatan yang efektif tersebut adalah pendekatan pencapaian tujuan dibuktikan dengan tercapainya tujuan hibah, pendekatan konstituen-strategis dibuktikan dengan adanya partisipasi ormas dan hubungan yang baik antara ormas dengan pemerintah daerah dan pendekatan nilai-nilai bersaing dibuktikan dengan hibah mampu mengembangkan nilai-nilai pembelajaran ke arah yang lebih baik. Pendekatan yang tidak efektif adalah pendekatan system hal ini dikarenakan tidak adanya koordinasi antar bagian atau sub bagian dan beberapa bagian yang tidak melaksanakan perannya sesuai ketentuan peraturan.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Hibah, Realisasi dan Kebijakan.

## PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Efektivitas Pemberian Bantuan Hibah Daerah kepada Organisasi Masyarakat  
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

Penyusun TAPM : Nor Asfahana, S. Fil. I

NIM : 500646474

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Minggu / 18 Februari 2018

Menyetujui:

Pembimbing II,

Dr. Sri Listyarini, M.Ed  
NIP. 19610407 198602 2 001

Pembimbing I,

Dr. M. Riduan Karim, SE, MM

Penguji Ahli

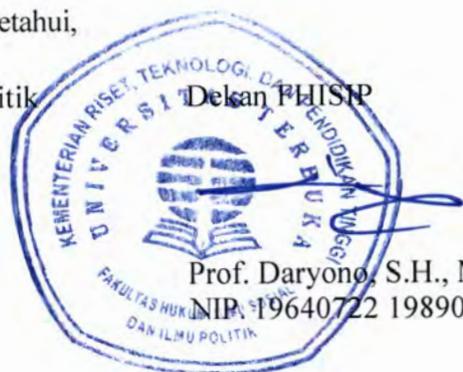
Dr. Sofjan Aripin, M.Si  
NIP. 19660619 199203 1 002

Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Hukum, Sosial, dan Politik



Dr. Darmanto, M.Ed.  
NIP. 19591027 198603 1 003



Dekan PHISIP

Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D.  
NIP. 19640722 198903 1 019

UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN

PENGESAHAN

Nama : Nor Asfahana, S. Fil. I  
NIM : 500646474  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Judul TAPM : Efektivitas Pemberian Bantuan Hibah Daerah kepada Organisasi Masyarakat  
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM)  
Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Minggu / 18 Februari 2018  
W a k t u : 11.00 Wita

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Tandatangan

Ketua Komisi Penguji  
Nama : Dr. Liestyodono Bawono I, M.Si

Penguji ahli  
Nama : Dr. Sofjan Aripin, M.Si

Pembimbing I  
Nama : Dr. M. Riduan Karim, SE, MM

Pembimbing II  
Nama : Dr. Sri Listyarini, M. Ed

## KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini berjudul: "Efektivitas Pemberian Bantuan Hibah Daerah Kepada Organisasi Masyarakat Pemerintah Kabupaten Tana Tidung". Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan penulis. Untuk itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak demi sempurnanya tesis ini. selain itu penulis juga menyadari bahwa mulai dari penelitian hingga selesainya penyusunan tesis ini banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada :

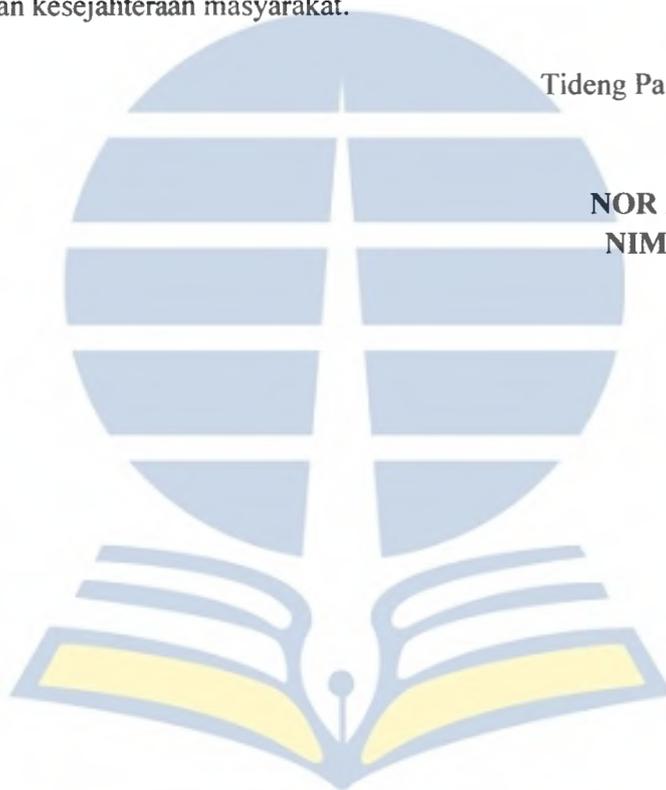
1. Bupati Tana Tidung yang telah memberikan Izin belajar untuk mengikuti Program Pascasarjana di Universitas Terbuka.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung beserta seluruh staf yang telah memberikan data dan informasi yang penulis perlukan dalam penelitian.
3. Dr. Liestyodono bawono Irianto, M.Si, selaku Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pascasarjana-LPPMP Universitas Terbuka.
4. Kepala UPBJJ-UT Samarinda beserta staf yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sehingga menjadi cikal bakal berdirinya UPBJJ UT-Kalimantan Utara di Kota Tarakan.
5. Bapak Dr. Sofjan Arifin. M. Si selaku Direktur Program Pascasarjana UPBJJ UT-Kalimantan Utara.
6. Bapak Dr. M. Riduan Karim, SE, M.M selaku Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
7. Ibu Dr. Sri Listyarini, M. Ed selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petrunjuk dalam penyelesaian tesis ini.
8. Bapak Dr. Sofjan Aripin, M. Si selaku Penguji Ahli yang telah banyak memberikan kontribusi demi kesempurnaan Tesis ini.
9. Bapak Uus Rusmanda, A. Ks, M. Hp, selaku atasan penulis yang telah memberikan peluang untuk mengikuti Program Pascasarjana.

10. Rekan-rekan seperjuangan para mahasiswa pascasarjana UT yang telah memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi pada program S2 ini.
11. Orangtua, Istri, Anak-anak, Keluarga dan rekan kerja tercinta yang telah memberikan motivasi yang tinggi kepada penulis sehingga terselesaikannya tesis ini.

Sebagai bentuk ucapan terima kasih dan penghargaan penulis kepada seluruh pihak yang teka memberikan dorongan baik moril maupun spirituil hanyalah berupa doa kepada Allah SWT agar semua bantuan, dorongan dan semangat yang diberikan mendapat ganjaran pahala dari Allah SWT dan penulis harapan semoga tesis ini bermanfaat untuk ilmu pengetahuan dan menjadi solusi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Tideng Pale, Mei 2018

**NOR ASFAHANA**  
**NIM. 500646474**



## DAFTAR ISI

	HALAMAN
Abstract .....	
Abstrak.....	
Lembar Persetujuan .....	
Lembar Pengesahan.....	
Lembar pernyataan Bebas Plagiasi.....	
Kata Pengantar .....	
Riwayat Hidup .....	
Daftar Isi .....	
Daftar Gambar.....	
Daftar Tabel .....	
Daftar Lampiran.....	
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Hasil Penelitian.....	7
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori .....	8
1. Administrasi Publik dan Kebijakan Publik.....	8
2. Konsep Hibah .....	15
3. Teori Organisasi .....	19
4. Efektivitas .....	21
5. Organisasi dan Pengukurannya .....	23
B. Penelitian Terdahulu.....	30
C. Kerangka Berpikir .....	35
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian.....	36
B. Fokus Penelitian .....	36
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37

D. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan.....	38
E. Instrumen Penelitian.....	40
F. Prosedur Pengumpulan Data.....	42
G. Unit Analisis.....	45
H. Metode Analisis Data .....	46
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	48
1. Gambaran Umum Kabupaten Tana Tidung .....	48
2. Deskripsi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung.....	49
3. Deskripsi Hibah Daerah kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten Tana Tidung.....	51
B. Hasil Penelitian : Efektivitas Hibah Daerah kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten Tana Tidung.....	71
1. Pendekatan Tujuan.....	72
2. Pendekatan Sistem .....	76
3. Pendekatan Konstituen Strategis .....	80
4. Pendekatan Nilai-Nilai Bersaing .....	83
C. Pembahasan.....	86
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1 Panduan Wawancara .....	105
Lampiran 2 Transkrip Wawancara .....	109
Lampiran 3 Nama-Nama Penerima Hibah Tahun 2015 .....	118

## DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu .....	33
Tabel 3.1. Proses Pengembangan Instrumen Penelitian untuk Pemberi Hibah (Bagian Kesra Setda Tana Tidung) .....	41
Tabel 3.2. Proses Pengembangan Instrumen Penelitian untuk Penerima Hibah (Organisasi Kemasyarakatan) .....	42
Tabel 4.1. Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan .....	48
Tabel 4.2. Data Formasi Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung 2015 .....	51
Tabel 4.3. Realisasi Dana Hibah Kabupaten Tana Tidung 2015 .....	58
Tabel 4.4. Ruang Lingkup Realisasi Penyaluran Dana Hibah di Tana Tidung .....	91



**DAFTAR GAMBAR**

	HALAMAN
Gambar 2.1. Kerangka Berfikir.....	35
Gambar 4.1. Bagan Struktur Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tana Tidung .....	50
Gambar 4.2. Distribusi Dana Hibah pada Ormas berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015 .....	59



**DAFTAR LAMPIRAN**

	HALAMAN
Lampiran 1 Panduan Wawancara .....	105
Lampiran 2 Transkrip Wawancara .....	109
Lampiran 3 Nama-Nama Penerima Hibah Tahun 2015 .....	118
Lampiran 4 Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung .....	121



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia setiap tahunnya mengalokasikan anggaran pemberian hibah maupun bantuan sosial dan pemberian bantuan tersebut dibenarkan pengelolaannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Peraturan menteri dalam negeri No. 32 Tahun 2011).

Kebijakan yang mengatur pemberian hibah dan bantuan sosial oleh pemerintah daerah adalah Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2011 dan diundangkan pada tanggal 28 Juli 2012. Kemudian pada tanggal 21 Mei 2012 telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD yang diundangkan pada tanggal 22 Mei 2012. Demikian pula sejak tanggal 3 Januari 2012 telah ditetapkan dan diundangkan PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten Tana

Tidung telah mengatur Ketentuan Pemberian Hibah melalui Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Hibah ke daerah sejak tahun 2009 telah menjadi alternatif pendanaan pembangunan infrastruktur bagi pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung. Pemerintah daerah saat ini dituntut untuk ikut mendorong perkembangan pembangunan di setiap sub sektor dalam berbagai bidang baik secara fisik maupun non fisik. Dana yang dialirkan pemerintah pusat cukup besar untuk membantu daerah terpencil guna mengembangkan potensi yang dimiliki melalui pemenuhan fasilitas infrastruktur agar mampu secara mandiri mengembangkan ekonomi daerah. Selain itu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah memberikan kebebasan dan peluang bagi pemerintah daerah untuk secara mandiri dengan wewenang pengambilan keputusan sendiri mengelola bahkan memutuskan kebijakan secara otoritas tanpa campur tangan pemerintah pusat. Selain pengalokasian dana perimbangan, Pemerintah dapat memberikan pinjaman dan dana hibah pada Pemerintah Daerah sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah.

Hibah ke daerah merupakan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Pemberian hibah pada Pemerintah Daerah baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri dilakukan untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi

kewenangan pemerintah daerah serta diprioritaskan untuk penyelenggaraan pelayanan publik.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Tana Tidung, berdasarkan pengamatan peneliti, sebagai daerah yang sedang mengalami pemekaran. Dana hibah sering diberikan kepada masyarakat dan pemberian dana hibah bersifat langsung yakni proposal permohonan dana hibah diproses secara sederhana dan diberikan melalui proses verifikasi tanpa melalui dinas teknis memonitoring ke lapangan. Penyerahan langsung pada tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan mendapat persetujuan berupa Surat Keputusan Bupati. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menganggap wajar mengingat kekurangan/kelemahan struktural pemerintahan yang baru berdiri seperti kurangnya pegawai dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Jenjang staf pelaksana dengan pimpinan masih dekat dan belum memiliki kepala sub bagian/bidang.

Hasil pengamatan peneliti juga melihat fenomena pemberian dana hibah di Tana Tidung mayoritas ditujukan untuk operasional kegiatan masyarakat yang sifatnya kelompok masyarakat dan belum ada organisasi masyarakat yang terdaftar di kesbang linmas. Syarat sebuah organisasi masyarakat memperoleh dana hibah adalah terdaftar di kesbang linmas. Beberapa kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan perlombaan 17 agustus yang bersifat kepanitiaan tidak berada dibawah naungan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang belum dibentuk di daerah. Hal ini merupakan kewajaran bagi daerah yang baru mekar meskipun sebenarnya menyalahi sebuah aturan dan kerap terjadi sebab struktur organisasi masih sederhana dan bersifat sementara.

Fenomena berikutnya yakni penggunaan anggaran hibah bagi kelompok masyarakat terfokus pada kegiatan dan bukan pengadaan barang. Seiring berjalannya waktu mulai terbentuk organisasi masyarakat yang telah terdaftar di kesbang linmas, namun tempat sekretariat masih menyewa dan masuk dalam rincian anggaran biaya ormas dalam mengajukan permohonan bantuan hibah daerah padahal menurut Peraturan menteri dalam negeri 32 tahun 2012 dana hibah tidak diperbolehkan untuk menyewa gedung sekretariat. Laporan penggunaan dana hibah sering tidak sinkron dengan ajuan realisasi anggaran dari pemerintah.

Menurut Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, dana hibah yang diberikan pemerintah ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat bukan hanya untuk kegiatan kemasyarakatan yang bersifat konsumtif. Pemerintah daerah sebagai penyalur dana hibah diharapkan lebih selektif dalam memberikan bantuan hibah dimulai dengan proses verifikasi bantuan salah satunya dengan memonitoring lapangan oleh dinas terkait (Peraturan Bupati Tanah Tidung, 2013).

Tanggapan dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) muncul terkait penggunaan dana hibah yang dianggap tidak dialokasikan sesuai peruntukannya bahkan menyalahi aturan serta dicurigai terdapat manipulasi dalam penyelenggaraannya. KPK pada awal tahun 2014 meminta kepada jajaran kepala daerah untuk mengelola secara sungguh-sungguh dana bantuan sosial dan hibah agar terhindar dari penyalahgunaan. Hal itu tertuang dalam surat himbuan bernomor B-14/01-15/01/2014 tertanggal 6 Januari 2014 yang

dikirimkan kepada seluruh gubernur dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri (Setda Provinsi Bali, 2015). Akibat hal tersebut sempat muncul wacana penghapusan hibah kepada organisasi masyarakat di pemerintah pusat terkait pemberian hibah sebagai sarana kepentingan politik.

Pemerintah kabupaten Tana Tidung melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dalam pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 telah mengalokasikan dana Hibah kepada Organisasi Masyarakat dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 51.511.811.150,- dan untuk penyerapan anggaran hibah tersebut sebesar Rp. 43.585.811,- namun sebanyak 46 Penerima Bantuan Hibah yang terdiri dari Organisasi Masyarakat belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sehingga tidak dapat dinilai pencapaian tujuan penyerapan anggaran hibah tersebut (Sekretariat Daerah Tanah Tidung, 2015). Sehubungan dengan hal itu hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Bagian Keuangan pada tahun-tahun sebelumnya terdapat kesamaan permasalahan terkait pelaporan pertanggungjawaban pemberian hibah oleh organisasi masyarakat.

Mekanisme Penganggaran, pelaksanaan sampai dengan Pelaporan Pertanggungjawaban Pemberian Hibah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, namun pada prakteknya masih terdapat ketidak sesuaian antara regulasi dan realisasinya di lapangan yang berakhir pada ketidak efektifan Program Kegiatan pemberian Hibah tersebut. Ketidak efektifan pemberian bantuan ini dalam konteks organisasi masyarakat dapat dilihat dari berbagai perspektif seperti tujuan yang tercapai,

sistem yang bekerja secara baik, dukungan atau partisipasi masyarakat serta nilai tambah yang didapatkan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia merupakan tujuan dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Namun masih terdapat penyalahgunaan dana hibah yang terjadi dalam pada daerah-daerah yang sedang mengalami pemekaran di Indonesia menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan dari pembangunan. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pemberian Bantuan Hibah Daerah Kepada Organisasi Masyarakat Pemerintah Kabupaten Tana Tidung”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya maka rumusan masalah pada penelitian adalah bagaimana efektivitas pemberian bantuan hibah kepada organisasi masyarakat di Kabupaten Tana Tidung ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pemberian bantuan hibah kepada organisasi masyarakat di Kabupaten Tana Tidung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

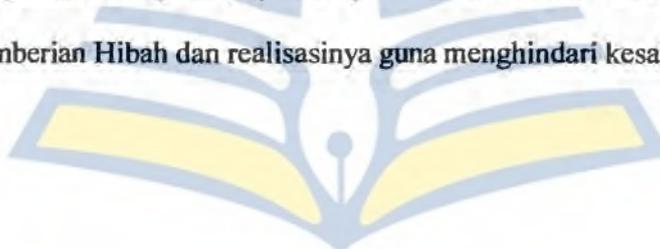
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi mengenai sistem dan syarat realisasi pengajuan, penyaluran hingga pengalokasian dana hibah oleh pemerintah dan organisasi masyarakat kabupaten Tana Tidung.

##### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan mampu menjadi referensi bagi pemerintah dalam mengurangi permasalahan pada regulasi pengajuan, penyaluran dan realisasi penggunaan dana hibah sehingga menghindari terjadinya penyalahgunaan dana hibah yang kerap terjadi di Kabupaten Tana Tidung.

##### **3. Manfaat Kebijakan**

Penelitian ini diharapkan mampu memberi pandangan bagi para pengambil kebijakan, yakni pemerintah terkait kesesuaian program Pemberian Hibah dan realisasinya guna menghindari kesalahan.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### 1. Administrasi Publik dan Kebijakan Publik

Pada dasarnya pengertian administrasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu administrasi dalam pengertian sempit dan luas. Administrasi dalam arti sempit merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Dengan kata lain disebut tata usaha (*clerical work, office work*). Menurut Silalahi (2005:5).

“Administrasi juga berarti tatusaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta dengan fakta lainnya.”

Administrasi dalam arti luas, seperti yang dikembangkan oleh para tokoh teori administrasi maupun yang dikembangkan di dunia pendidikan tinggi dewasa ini, seperti yang ditelaah dalam Fakultas Ilmu Administrasi. Menurut Silalahi (2005: 6) “Istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan”. Jadi rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu disebut administrasi dalam arti luas.

Publik berarti umum, masyarakat atau negara. Kata “umum” didefinisikan sebagai milik umum, tempat umum, perusahaan umum, dan

lain-lain yang sifatnya untuk umum. Dan yang didefinisikan “masyarakat” misalnya hubungan masyarakat, pelayanan masyarakat, kepentingan masyarakat, dan lain-lain. Kemudian yang didefinisikan “Negara” misalnya otoritas negara, gedung negara, keuangan negara, dan lain sebagainya. Sedangkan arti dari publik adalah “sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki” (Syafiie, 2006: 23).

Menurut Utomo (2008:7)”

*“Administration by Public berorientasi bahwa publik demand are differetianted, dalam arti fungsi negara/pemerintah hanyalah sebagai fasilitator, katalisator yang bertitik tekan pada putting the customers in the driver set. Determinasi Negara/Pemerintahan tidak lagi merupakan faktor utama atau sebagi driving forces. Penjelasan tersebut memberikan pencerahan terhadap makna istilah Administrasi Negara dimana telah terjadi perubahan makna public sebagai negara menjadi public sebagai masyarakat. Artinya bahwa pendekatan yang dilakukan dalam disiplin ilmu ini bukan lagi kepada negara tetapi kepada masyarakat. Itulah sebabnya mengapa akhir-akhir ini istilah Administrasi Negara telah menjadi Administrasi Publik”.*

“Administrasi negara ialah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintahan dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara” (Siagian, 1996;8). Dalam konteks negara, administrasi negara yaitu keseluruhan kegiatan negara untuk mencapai tujuan negara. Douglas dalam Stillman (1992:2) mengemukakan *“Public administration is the produced of good and service designed to serve the need of citizen”.* Administrasi publik merupakan hasil dari perencanaan dan pelayanan yang baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga apa yang dilakukan

negara adalah untuk rakyatnya. Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008:3), mengemukakan bahwa:

“administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik”.

Pendapat di atas menekankan pada penggunaan segala sumber daya dan personel untuk menjalankan kebijakan publik yang telah di buat. Ada upaya untuk mengelola kebijakan publik sebaik-baiknya dalam proses hingga hasil. Menurut Pfiffner dan Presthus (1960:4-6) mengemukakan bahwa:

“administrasi negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. Administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah”.

Secara ringkas administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan tehnik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. Semua yang terkait dengan aktivitas dan kegiatan pemerintah masuk ke dalam istilah administrasi negara. Keban (2008:4), menekankan pada makna yang bervariasi tentang istilah Administrasi Publik. Menurutnya:

“Administrasi Publik sebagai *administrasi of public* menunjukkan pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, sedangkan *administrasi for public* menunjukkan konteks yang lebih maju dari sebelumnya dimana pemerintah lebih berperan dalam mengemban misi pemberian pelayanan publik (*service provider*),

dan *administrasi by public* merupakan suatu konsep yang sangat berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat”.

Berdasarkan beberapa rumusan di atas, penulis menyimpulkan bahwa masih terdapat pula kerancuan penggunaan istilah makna *public* sebagai negara atau sebagai publik (masyarakat). Namun demikian penulis dapat menyimpulkan istilah administrasi publik adalah berbagai aktifitas manajemen yang dilakukan oleh pemerintah (eksekutif) dimulai dari perumusan, pengimplementasian serta pengawasan program pembangunan dengan melibatkan legislatif, dan yudikatif serta partisipasi masyarakat guna melahirkan kebijakan publik

Proses pembuatan kebijakan publik memerlukan proses demokrasi. “Adanya demokrasi pada kebijakan publik dibutuhkan agar kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan pemerintah berfungsi bekerja untuk kepentingan publik, bukan administrator publik” (Triastuti, 2003: 132). Demokrasi sebagai sarana penyampaian aspirasi dan kepentingan bersama menjamin agar kepentingan publik dapat terakomodasi dalam kebijakan.

Menurut Efendi dan Makhfudli (2009:135), “kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas publik dengan mengikat orang banyak pada tataran strategis yang bersifat garis besar”. Adanya ikatan ini memungkinkan semua orang melakukan kegiatan sesuai dengan keputusan bersama demi tujuan bersama. “Kebijakan publik dibuat sebagai bentuk pengambilan keputusan agar setiap individu yang terlibat dalam proses pelaksanaan tetap berjalan lancar dan konsisten secara berulang-ulang” (Hermabin *et al*, 2014). Kebijakan publik perlu

dilegalisasi untuk dapat mengikat banyak orang dan menjamin konsistensinya.

Federick sebagaimana dikutip Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan adalah:

“serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Semuanya terangkai dalam suatu kebijakan untuk dilaksanakan agar tujuan tercapai.

Berdasarkan pengertian kebijakan dan kebijakan publik yang telah disebutkan di atas, dapat ditemukan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik sebagaimana yang dikemukakan oleh Anderson dalam Widodo (2010:14) yaitu :

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan pemerintah.
- d. kebijakan publik bersifat positif (mengenai tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- e. kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa.

Pendapat tersebut menerangkan dalam pengertian kebijakan publik ada 5 elemen yang terkandung didalamnya. Kelima elemen tersebut harus mampu dipenuhi sebagai kondisi ideal suatu kebijakan publik. Michael Howlet dan M. Ramesh sebagaimana dikutip Subarsono (2009:13) menyatakan proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut :

- a. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- e. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil kinerja kebijakan.

Eyestone sebagaimana dikutip Agustino (2008: 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak (banyak ahli) beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho (2008: 58), terkait dengan karakteristik dari kebijakan publik:

“ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya merupakan hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh”.

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah “sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat”. Secara langsung dapat diartikan oleh pembuat kebijakan itu sendiri dan langsung menysasar pada masyarakat atau persoalan yang dipecahkan. Melalui lembaga dapat berarti dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi dan perannya.

Menurut Islamy (2009: 19) mendefinisikan “kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan”. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik merupakan perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa:

“kebijakan publik merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas”.

Pendapat di atas menekankan bahwa dalam kebijakan publik merupakan bentuk intervensi pemerintah kepada masyarakat untuk

melindungi kepentingan bersama, terutama yang kurang beruntung. Easton sebagaimana dikutip Agustino (2008: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “*the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “*authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan pedoman yang digunakan untuk mengatur atau membuat keputusan guna memenuhi kebutuhan masyarakat atau publik, kebijakan ini dibuat oleh pemegang otoritas publik atau pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.

## 2. Konsep Hibah

Menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, pengertian hibah adalah:

“Hibah merupakan pemberian uang/barang serta jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat wajib dan tidak mengikat serta tidak

terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah”.

Pengertian di atas menekankan hibah sebagai pemberian uang atau barang atau jasa yang spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Artinya penggunaan tidak boleh seenaknya. Bersifat wajib dan tidak mengikat artinya boleh diberikan tetapi tidak mengikat harus diberikan secara terus menerus.

Hibah dibagi dalam beberapa jenis, bentuk, sumber, sifat dan kegunaan. Hibah memiliki berbagai macam pengertian tergantung subjek yang melihat. Pengertian hibah dinilai dari hubungan pelakunya dapat dibagi menjadi: (a) hibah yang diperoleh dari suatu negara / pemerintah kepada negara / pemerintah tertentu yang lazim disebut *G to G* atau *government to government* dalam rangka hubungan bilateral, (b) hibah diperoleh dari suatu lembaga kepada pemerintah / negara dalam rangka hubungan bilateral (c) hibah yang diberikan juga bisa diperoleh dari suatu lembaga pada lembaga tertentu baik yang bertujuan untuk membangun hubungan bilateral maupun multilateral.

Hibah menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan. Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional. Hibah kepada organisasi

kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hibah juga merupakan salah satu dana yang diberikan pemerintah pusat pada masyarakat melalui pemerintah daerah untuk membentuk sebuah hubungan yang saling mendukung dalam pelaksanaan kegiatan daerah dan partisipasi masyarakat. Tujuan utama pemberian dana hibah merupakan untuk memaksimalkan pembangunan yang berada di daerah agar terjadi peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Pane dkk (2011:7) mekanisme pemberian hibah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagai berikut:

- a. Permohonan atau proposal ditujukan kepada Walikota/Bupati melalui SKPD terkait dengan melampirkan kwitansi bermaterai secukupnya yang ditandatangani oleh yang berhak atau pemohon.
- b. Setelah ada disposisi persetujuan Walikota/Bupati oleh SKPD terkait kemudian disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- c. Proses di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- d. Ketentuan Pembayaran diserahkan langsung kepada yang berhak atau melalui satuan kerja perangkat daerah terkait sebagai pemohon.

Hibah ke Daerah adalah Hibah ke daerah merupakan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian (RAPBN 2014). Pemberian hibah pada Pemerintah Daerah baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri dilakukan untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta diprioritaskan untuk penyelenggaraan pelayanan publik.

Penyaluran hibah pada pemerintah daerah diberikan berdasarkan capaian kerja yakni hibah disalurkan pada pemerintah dengan pertimbangan faktor kualitas *output* yang dihasilkan berdasarkan verifikasi yang dilakukan kementerian teknis terkait. Proses verifikasi bagi setiap daerah berbeda-beda tergantung peraturan serta kebijakan publik masing-masing. Pada umumnya peraturan penyaluran dana hibah dilakukan secara selektif diawali dengan penentuan penerima dana hibah, kriteria pemberi dana hibah, penganggaran dana hibah, pelaksanaan dan penatausahaan dana hibah, pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah serta tahap terakhir yakni monitoring dan evaluasi hibah (RAPBN, 2014).

Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan evaluasi, pengecekan kesesuaian antara proposal pengajuan terkait anggaran dan pengalokasian dengan fakta yang terjadi di lapangan untuk menghindari manipulasi data, penggelapan dana serta terjadinya kesalahan pengalokasian dana hibah yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada tingkat Kabupaten, pelaksanaan hibah di Kabupaten Tana Tidung telah di atur dengan Perbub Kabupaten Tana Tidung No.20 / 2013 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Menurut peraturan ini,

“Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah”.

Peraturan ini secara umum diturunkan dari Permendagri No. 32/ 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber

dari APBD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 / 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

### 3. Teori Organisasi

Menurut Robbins dan Judge, (2008:5) yang disebut organisasi adalah “sebuah unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, terdiri atas dua orang atau lebih dan relatif terus-menerus guna mencapai satu atau serangkaian tujuan bersama”. Merupakan unit sosial yang berhimpun untuk tujuan bersama, tanpa tujuan bersama mereka tidak berhimpun. “Organisasi adalah suatu wadah yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama secara efektif” (Wibowo, 2007:1). Pengertian ini menegaskan ada tujuan bersama dalam organisasi, artinya dibentuknya organisasi merupakan wadah untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah “suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu” (Hasibuan, 2004:120). Pengertian ini menekankan adanya sistem formal dan terstruktur serta terkoordinasi dalam organisasi, sehingga mereka mempunyai aturan main yang telah ditentukan.

Menurut Barnard dalam Wursanto (2005:53) mendefinisikan organisasi adalah

“suatu sistem usaha bersama antara dua orang atau lebih, sesuatu yang tidak berwujud dan tidak bersifat pribadi, yang sebagian besar mengenai hubungan-hubungan kemanusiaan. Organisasi itu sebagai struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang-orang pemegang posisi yang

bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan yang tertentu”.

Macam atau jenis-jenis organisasi dapat dilihat dari berbagai segi yaitu dari jumlah pucuk pimpinan, segi keresmian, segi tujuan segi luas wilayah, segi kebutuhan sosial serta segi bentuk

a. Jenis Organisasi dari Segi Pucuk Pimpinan

Organisasi segi pucuk pimpinan terdiri dari 2 macam yakni:

1) organisasi tunggal, yaitu apabila pucuk pimpinan organisasi tersebut berada pada tangan 1 orang. Nama pimpinan yang dipergunakan tergantung dari jenis kegiatan organisasi tersebut. Contoh dalam bidang pemerintahan presiden, menteri, gubernur, direktur, bupati dan lain-lain. 2) organisasi jamak, apabila pucuk pimpinan berada ditangan beberapa orang, Contoh: Dewan Pimpinan Pusat (DPP), DPD, MAWI, KWI, MUI dan lain-lain.

b. Jenis Organisasi dari Segi Keresmian

Menurut segi keresmian organisasi terdiri dari 2 yaitu: 1) organisasi formal, apabila kegiatan dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam suatu kelompok secara sadar dikoordinasi guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, sehingga orang-orang yang tergabung dalam kelompok itu mempunyai struktur yang jelas, 2) organisasi informal, organisasi disusun secara bebas dan spontan dan keanggotaannya diperoleh secara sadar atau tidak sadar.

### c. Jenis Organisasi dari Segi Tujuan

Jenis Organisasi menurut tujuan organisasi dapat dilihat berdasarkan bidangnya, contohnya: organisasi niaga atau ekonomi yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kegiatan yang dilakukan merupakan untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Organisasi niaga ini dibedakan lagi menjadi organisasi swasta dan pemerintah.

### d. Jenis Organisasi dari Segi Luas Wilayah

Menurut luas wilayahnya organisasi dapat dibagi menjadi 4 macam yaitu: 1) organisasi daerah (*local organization*), 2) organisasi regional (*regional organization*), 3) organisasi nasional (*national organization*) dan 4) organisasi internasional (*international organization*).

### e. Jenis Organisasi dari Segi Kebutuhan Sosial/Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan semua organisasi atau perhimpunan yang dibentuk atas secara sukarela oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia yang keanggotaan terdiri dari warga negara Indonesia dan warga negara asing, namun dalam pelaksanaannya harus tunduk pada ketentuan dan Undang-undang Republik Indonesia.

## 4. Efektivitas

Menurut Gibson (dalam Pasolong, 2010: 4), efektivitas adalah “pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas”. Hal ini berarti bahwa dalam organisasi dapat dikatakan efektif jika tujuan organisasi

yang ditetapkan dalam visi dan misi organisasi tercapai. Menurut Siagian (2002: 151) efektivitas adalah “tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber data tertentu yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi tertentu”. Pengertian ini bukan hanya tercapai sasaran, tetapi unsur ketepatan waktu sudah dimasukkan dan sesuai dengan sumber-sumber yang dialokasikan.

Menurut Kumorotomo, (2005: 362), “efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi”. Hal ini berarti untuk menentukan sesuatu itu efektif dalam organisasi harus dilakukan pengukuran terhadap pekerjaan tertentu, tentunya ada alat ukur dan skala yang telah disepakati. Pengertian efektivitas (organisasi) pada awalnya sangat sederhana, dimana keefektifan didefinisikan sebagai “Sejauh mana organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya” (Robbins, 1994:53). Namun dalam perkembangannya menjadi sangat luas atau kompleks sesuai dengan bentuk organisasinya. Oleh karena itu diperlukan suatu perangkat pengukuran efektivitas tersebut secara baik dan tepat.

Berdasarkan definisi-definisi mengenai efektivitas tersebut di atas pada intinya masih difokuskan pada pencapaian tujuan atau sasaran yang ingin dicapai saja. Kenyataan ini dimaklumi oleh Robbins (1994:58) sebagai berikut:

”Sebuah organisasi, berdasarkan definisi diciptakan untuk mencapai satu tujuan atau lebih yang telah ditetapkan sebelumnya, oleh karena itu tidak heran jika pencapaian tujuan merupakan kriteria yang paling banyak digunakan untuk menentukan keefektifan”

Pada dasarnya, konsep efektivitas organisasi memiliki arti yang luas yang tidak hanya difokuskan pada tujuan akhirnya saja tetapi juga dapat difokuskan melalui cara yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan akhir. Seperti yang dikemukakan oleh Robbins (1994:58) "Sebuah organisasi juga harus dinilai berdasarkan kemampuannya untuk memperoleh masukan, memproses masukan, menyalurkan keluarannya dan mempertahankan variabel-variabel tersebut".

#### 5. Efektivitas Organisasi dan Pengukurannya

Efektivitas dalam organisasi merupakan konsep yang berkaitan dengan efisiensi dan saling melengkapi. Keberhasilan organisasi diukur berdasarkan misi organisasi dan pertimbangan nilai orang yang mengukur efektivitas tersebut yakni hal-hal yang harus dilakukan organisasi untuk mengukur efektivitas. Efektivitas diukur tidak hanya berdasarkan pada penelitian dengan ukuran sejauh mana pencapaian tujuan dapat diwujudkan secara maksimal, melainkan harus dapat mengidentifikasi hambatan yang tidak dapat dihindari yang menjadi penghambat utama dalam pencapaian tujuan program tersebut.

Efektivitas menurut Gibson, *et al.*, (1994: 25) adalah "penilaian yang dibuat berkaitan dengan prestasi individu, kelompok dan organisasi". Hal ini berarti semakin meningkat prestasi seorang individu maka semakin efektif usaha yang dilakukan, begitu pula dengan kelompok maupun organisasi. Analisis efektivitas juga menilai mutu *output* dari suatu pelatihan atau masukan standar. Peningkatan standar mutu dengan

meningkatkan keseluruhan mutu *output* untuk biaya *input* yang sama dapat dianggap efektif..

Kriteria keefektifan organisasi, Gibson *et al.*, (1994:40-44), membagi efektivitas dalam tiga dimensi waktu yakni kriteria efektivitas jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Kriteria Efektivitas Jangka Pendek meliputi : a) Produksi yang menunjukkan kuantitas produksi; b) Kualitas mutu; c) Efisiensi; d) Keluwesan, e) Kepuasan. Kriteria Efektivitas Jangka Menengah meliputi a) Daya saing, sebagai ukuran untuk menentukan seberapa jauh organisasi dapat memuaskan pelanggan; b) Pengembangan, sebagai ukuran untuk menunjukkan efektivitas organisasi memenuhi permintaan lingkungan masa depan melalui penginvestasian sumber-sumber dengan melakukan investasi saat ini. Kriteria efektivitas jangka panjang yang berkaitan dengan keberadaan organisasi untuk jangka panjang yang akan nampak dari seberapa jauh organisasi tersebut dapat bertahan.

Bahasan tentang keefektifan organisasi secara garis besar dapat diukur berdasarkan pendekatan-pendekatan tertentu. Gibson, *et al.*, (1994:38) mengemukakan tiga pendekatan mengenai efektivitas yaitu:

- a. Pendekatan Tujuan. Pendekatan tujuan untuk mendefinisikan dan mengevaluasi efektivitas merupakan pendekatan tertua dan paling luas digunakan. Menurut pendekatan ini, keberadaan organisasi dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pendekatan tujuan menekankan peranan sentral dari pencapaian tujuan sebagai kriteria untuk menilai efektivitas serta mempunyai pengaruh yang kuat atas

pengembangan teori dan praktek manajemen dan perilaku organisasi, tetapi sulit memahami bagaimana melakukannya. Alternatif terhadap pendekatan tujuan ini merupakan pendekatan teori sistem.

- b. Pendekatan Teori Sistem. Teori sistem menekankan pada pertahanan elemen dasar masukan-proses-pengeluaran dan mengadaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas yang menopang organisasi. Teori ini menggambarkan hubungan organisasi terhadap sistem yang lebih besar, dimana organisasi menjadi bagiannya. Konsep organisasi sebagian suatu sistem yang berkaitan dengan sistem yang lebih besar memperkenalkan pentingnya umpan balik yang ditujukan sebagai informasi mencerminkan hasil dari suatu tindakan atau serangkaian tindakan oleh seseorang, kelompok atau organisasi. Teori sistem juga menekankan pentingnya umpan balik informasi. Teori sistem dapat disimpulkan: (1) Kriteria efektivitas harus mencerminkan siklus masukan-proses-keluaran, bukan keluaran yang sederhana, dan (2) Kriteria efektivitas harus mencerminkan hubungan antar organisasi dan lingkungan yang lebih besar dimana organisasi itu berada. Jadi: (1) Efektivitas organisasi adalah konsep dengan cakupan luas termasuk sejumlah konsep komponen. (3) Tugas manajerial adalah menjaga keseimbangan optimal antara komponen dan bagiannya.
- c. Pendekatan *Multiple Constituency*. Pendekatan ini merupakan perspektif yang menekankan pentingnya hubungan relatif di antara kepentingan kelompok dan individual dalam hubungan relatif diantara kepentingan kelompok dan individual dalam suatu organisasi. Dengan

pendekatan ini memungkinkan pentingnya hubungan relatif diantara kepentingan kelompok dan individual dalam suatu organisasi. Dengan pendekatan ini memungkinkan mengkombinasikan tujuan dan pendekatan sistem guna memperoleh pendekatan yang lebih tepat bagi efektivitas organisasi.

Robbins (1994:54) mengungkapkan juga mengenai pendekatan dalam pengukuran efektivitas organisasi. Pendekatan dibedakan dalam 4 pendekatan yang masing-masing mempunyai asumsi- asumsi dan masalah-masalahnya:

a. Pendekatan Pencapaian Tujuan (*goal attainment approach*)

Pendekatan pencapaian tujuan mengasumsi bahwa organisasi merupakan kesatuan yang dibuat dengan sengaja, rasional, dan mencari tujuan. Oleh karena itu, pencapaian tujuan yang berhasil menjadi sebuah ukuran yang tepat tentang keefektifan. Namun demikian, agar pencapaian tujuan bisa menjadi ukuran yang sah dalam mengukur keefektifan organisasi, asumsi-asumsi lain juga harus sah. Pertama, organisasi harus mempunyai tujuan akhir. Kedua, tujuan-tujuan tersebut harus diidentifikasi dan ditetapkan dengan baik agar dapat di mengerti. Ketiga, tujuan-tujuan tersebut harus sedikit saja agar mudah dikelola. Keempat, harus ada konsensus atau kesepakatan umum mengenai tujuan-tujuan tersebut. Akhirnya, kemajuan ke arah tujuan-tujuan tersebut harus dapat diukur.

b. Pendekatan Sistem (*system approach*)

Pendekatan sistem terhadap Efektivitas Organisasi mengimplikasikan bahwa organisasi terdiri dari sub-sub bagian yang saling berhubungan. Jika salah satu sub bagian ini mempunyai performa yang buruk, maka akan timbul dampak yang negatif terhadap performa keseluruhan sistem. Keefektifan membutuhkan kesadaran dan interaksi yang berhasil dengan konstituensi lingkungan. Manajemen tidak boleh gagal dalam mempertahankan hubungan yang baik dengan para pelanggan, pemasok, lembaga pemerintahan, serikat buruh, dan konstituensi sejenis yang mempunyai kekuatan untuk mengacaukan operasi organisasi yang stabil. Kelangsungan hidup membutuhkan penggantian yang terus-menerus untuk sumber daya yang dikonsumsi. Bahan baku harus diamankan, lowongan yang terjadi karena pengunduran diri dan pensiunnya para pegawai harus diisi, lini produksi yang menurun harus diganti.

c. Pendekatan Konstituens-Strategis (*strategic-constituencies approach*)

Pendekatan pencapaian tujuan memandang organisasi sebagai kesatuan yang sengaja dibuat, rasional, dan mencari tujuan. Pendekatan konstituensi strategis memandang organisasi secara berbeda. Organisasi diasumsikan sebagai arena politik tempat kelompok-kelompok yang berkepentingan (*vested interests*) bersaing untuk mengendalikan sumber daya. Dalam konteks ini, keefektifan organisasi menjadi sebuah penilaian tentang sejauh mana keberhasilan sebuah organisasi dalam memenuhi tuntutan konstituensi kritisnya yaitu pihak-pihak yang

menjadi tempat bergantung organisasi tersebut untuk kelangsungan hidupnya di masa depan.

d. Pendekatan Nilai-nilai Bersaing (*competing-values approach*)

Asumsi bahwa tidak ada kriteria “paling baik” untuk menilai keefektifan sebuah organisasi. Tidak ada tujuan tunggal yang dapat disetujui oleh semua orang dan juga tidak ada consensus yang menetapkan tujuan mana yang harus didahulukan dari yang lainnya. Oleh karena itu, konsep Efektivitas Organisasi itu sendiri subyektif, dan tujuan yang dipilih seorang penilai berdasarkan atas nilai-nilai pribadi, preferensi serta minatnya. Hal ini dapat dilihat jika mengambil sebuah organisasi dan melihat bagaimana kriteria mengenai Efektivitas Organisasi berubah untuk mencerminkan kepentingan si penilai. Nilai-nilai bersaing secara nyata melangkah lebih jauh daripada hanya pengakuan tentang adanya pilihan yang beraneka ragam. Pendekatan tersebut mengasumsikan bahwa berbagai macam pilihan tersebut dapat dikonsolidasikan dan diorganisasi. Pendekatan nilai-nilai bersaing mengatakan bahwa ada elemen umum yang mendasari setiap daftar kriteria Efektivitas Organisasi yang komprehensif dan bahwa elemen tersebut dapat dikombinasikan sedemikian rupa sehingga menciptakan kumpulan dasar mengenai nilai-nilai bersaing. Masing-masing kumpulan tersebut lalu membentuk sebuah model keefektifan yang unik

Konsep efektivitas merupakan konsep yang penting untuk mengukur produktivitas. Menurut Solichin (2002) dalam Samsudin, dkk., (2014:6) “efektivitas merupakan perbandingan terbaik antara hasil dan tujuan”.

Emerson dalam Samsudin, dkk., (2014:6) “efektivitas sebagai pengukuran dalam tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Pengukuran efektivitas dikemukakan oleh Campbell (1973) dalam Samsudin, dkk., (2014:6) dalam enam pertimbangan sebagai berikut :

“Pertama, pengukuran efektivitas untuk memastikan keadaan (profit suatu organisasi) apakah dalam keadaan baik dan buruk. Kedua, pengukuran efektivitas organisasi digunakan sebagai diagnosa untuk menentukan faktor-faktor penyebab berlakunya keadaan suatu organisasi. Ketiga, diperlukan sebagai bahan keputusan untuk perencanaan. Keempat, diperlukan untuk memahami organisas. Kelima, diperlukan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu usaha pengembangan organisasi yaitu kegiatan yang berkaitan dengan upaya-upaya perubahan perilaku, struktur ekologi organisasi. Keenam, diperlukan sebagai alat untuk memahami variabel yaitu untuk mengetahui karakteristik organisasi apa saja yang berhubungan dengan prediktor efektivitas”.

Berdasarkan kerangka pendekatan efektivitas yang disampaikan oleh Gibsons *et al.*, (1994) dan Robbins (1994) maka dalam penelitian ini peneliti memilih untuk menggunakan 4 pendekatan yang digunakan oleh Robbins (1994). Hal ini dikarenakan pendekatan yang disampaikan Robbins (1994) telah mengakomodasi apa yang disampaikan oleh Gibsons *et al.* (1994) dan menambahkan pendekatan nilai bersaing. Berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektivitas organisasi yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalah sebagai berikut: (1) Adanya tujuan yang jelas, (2) Struktur organisasi. (3) Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat, (4) Adanya sistem nilai yang dianut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi harus mendapat perhatian yang serius apabila ingin mewujudkan suatu efektivitas. Steers (1985:209) menyebutkan empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu:

- a. Karakteristik Organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.
- b. Karakteristik Lingkungan, mencakup dua aspek. Aspek pertama merupakan lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua merupakan lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.
- c. Karakteristik Pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.
- d. Karakteristik Manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang meneliti tentang tema efektivitas organisasi dalam menjalankan program atau kebijakan publik terdiri dari:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Samsudin, dkk. (2014) dengan tujuan untuk menganalisis factor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial di Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

secara simultan variabel kinerja aparatur, kompetensi administratur, sarana dan prasarana, dan pengawasan memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel efektivitas Penyaluran bantuan sosial pada Bagian Sosial. Secara parsial variabel kinerja aparatur, sarana dan prasarana dan variabel pengawasan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Efektivitas Penyaluran bantuan sosial.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Murti (2015) dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kecamatan Krian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan PNPM Mandiri berjalan dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat hingga mencapai suatu tujuan dan serta terjadinya suatu perubahan yang nyata. Hal ini menjadi indikator mengenai keberhasilan PNPM Mandiri tersebut merupakan kepuasan masyarakat terhadap program, memiliki ketepatan sasaran program, tujuan program penanggulangan kemiskinan dapat dikatakan berhasil.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Tampubolon (2015) dengan tujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo sebagai Upaya Mewujudkan Budaya K3 dengan menggunakan pendekatan pencapaian tujuan dan pendekatan system. Penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik penentuan informan secara purposive. Hasil penelitian tentang kinerja pengawasan Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo yang telah dilakukan dalam mengawasi keselamatan dan kesehatan kerja sebagai upaya mewujudkan budaya K3, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata pengawasan yang dilakukan belum efektif.

4. Penelitian Machfiroh (2015) dengan tujuan mengetahui dan mengevaluasi tentang Efektivitas PNPM-MP Di Kota Palu. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas PNPM-MP di Kota Palu berjalan Efektif pada tataran: 1.) Pencapaian Tujuan: proses pelaksanaan siklus dan pemanfaatan Bantuan langsung Masyarakat (BLM) sudah tercapai sesuai apa yang diharapkan, dengan melihat terselesaikan 1 tahapan siklus dan pemanfaatan BLM tahun anggaran 2014. 2.) Intergrasi: Tahapan sosialisasi yang terjadi pada Proses Pelaksanaan PNPM sudah berjalan efektif melalui tahapan siklus PNPM sosialisasi ditingkat Kota dan di tingkat masyarakat, dikawal oleh fasilitator kelurahan, BKM, dan aparat Kelurahan. 3.) Adaptasi: Dalam penelitian mengenai kualitas pelaksanaan PNPM MP yang menjadi kendala kurang efektifnya pelaksanaan Program PNPM ditingkat masyarakat karna kurangnya partisipasi masyarakat kelurahan untuk terlibat langsung dalam mengikuti proses tahapan kegiatan yang di lakukan oleh program PNPM-MP sehingga penilaian *Keep Performance Indicator* tidak mencukupi standart capaian.

Penelitian terdahulu tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk tabel seperti berikut:

Tabel 2. 1.  
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Samsudin, dkk. (2014)	Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran bantuan sosial di Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.	Secara simultan variabel kinerja aparatur, kompetensi administratur, sarana dan prasarana, dan pengawasan memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel efektivitas Penyaluran bantuan sosial.	Metode berbeda, peneliti menggunakan kualitatif, tempat dan waktu berbeda. Dasar teori dan indikator pengukuran efektivitas juga berbeda.
2	Murti (2015)	Mengetahui efektivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi PNPMPK pada Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo tahun 2015.	PNPM Mandiri berjalan efektif. Masyarakat puas terhadap program, program tepat sasaran, tujuan telah berhasil.	Menggunakan pengukuran efektivitas hanya 2 indikator, tujuan dan sasaran. Peneliti menggunakan 4 indikator.
3	Tampubolon (2015)	Mengetahui Efektivitas Pengawasan K3 Oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo	Kinerja pengawasan Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo dalam mengawasi K3 belum efektif.	Pengukuran hanya pada pengawasan, penelitian ini pada seluruh program.
4	Machfiroh (2015)	Mengetahui dan megevaluasi tentang Efektivitas PNPMP Di Kota Palu.	Efektivitas PNPMP di Kota Palu berjalan Efektif pada tataran pencapaian tujuan dan proses intergrasinya. Namun pada proses adaptasinya masih belum efektif, sehingga secara	Dasar pengukuran efektivitas indikatornya berbeda yaitu tujuan, integrasi dan adaptasi. Sementara peneliti tujuan, sistem, Konstituens-

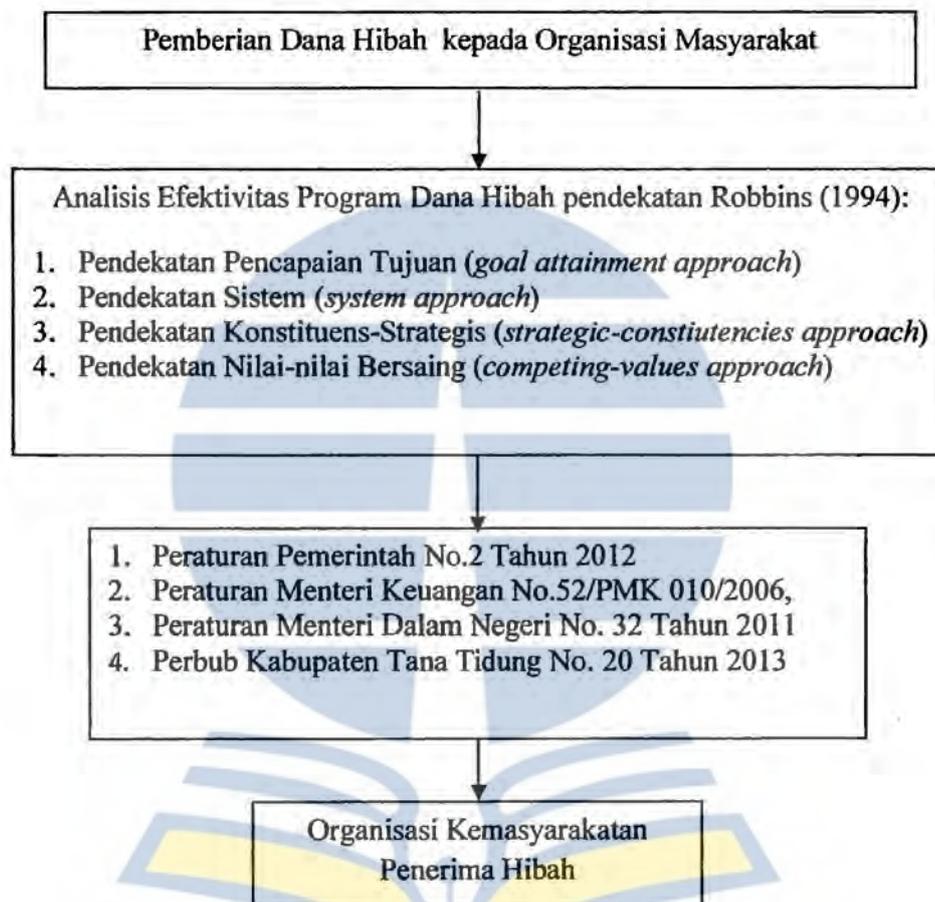
			keseluruhan masih dianggap kurang efektif.	Strategis dan nilai-nilai Bersaing.
--	--	--	--	-------------------------------------

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu mengenai pengukuran evektifitas berbagai program atau kebijakan yang dilakukan oleh organisasi di atas, penelitian ini mempunyai beberapa perbedaan. Di mana perbedaan yang menonjol penelitian ini menggunakan 4 pendekatan berdasarkan teori Robbins (1994), yaitu Pendekatan Pencapaian Tujuan (*goal attainment approach*); Pendekatan Sistem (*system approach*); Pendekatan Konstituens-Strategis (*strategic-constiutencies approach*) dan Pendekatan Nilai-nilai Bersaing (*competing-values approach*), sedangkan penelitian lain menggunakan pengukuran dari berbagai macam teori atau jumlah pendekatan yang hanya 2 pendekatan. Perbedaan yang lain meliputi obyek dan subyek penelitian, yaitu tentang program pemberian hibah di Bagian kesejahteraan rakyat, Setda Kabupaten Tana Tidung. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilakukan peneliti ini adalah asli hasil karya peneliti.

Keunggulan penelitian ini yaitu menggunakan 4 pendekatan dalam mengukur efektivitas program, maka penelitian ini dinilai lebih lengkap, detail dan komprehensif dalam mengukur efektivitas program. Efektivitas program dalam penelitian ini diukur lebih mendalam dari berbagai aspek seperti aspek hasil/tujuan program, aspek sistem, aspek konstituen dan aspek nilai bersaing. Indikator dari aspek-aspek ini menjadi dasar dalam menggali efektivitas program pemberian Hibah di Setda Kabupaten Tana Tidung.

### C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian teori yang telah dijelaskan, maka kerangka berfikir penelitian ini ialah:



(Sumber: Robbins , 1994)

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Desain Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan evaluatif. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memahami fenomena secara keseluruhan dan utuh dalam konteks alamiah (bukan rekayasa).

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”. (Moleong, 2007:6).

Penelitian evaluasi merupakan “salah satu penerapan dari penelitian yang digunakan untuk menentukan berhasil atau tidaknya atau apakah ada manfaat/nilai dari suatu program atau “ (McMillan dan Schumacher, 2010:68). Penjelasan lainnya menurut menyebutkan bahwa evaluasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah “menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak *decision maker* untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan” (Arikunto, 2010: 22).

### **B. Fokus Penelitian**

Penelitian kualitatif didasarkan pada keseluruhan situasi sosial yang meliputi aspek tempat, pelaku, dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis.

Oleh karena luasnya cakupan aspek yang diteliti, maka diperlukan fokus penelitian. Fokus penelitian mempunyai makna batasan penelitian, karena dalam lapangan penelitian banyak gejala yang meyangkut tempat, pelaku, dan aktifitas, namun tidak semua tempat, pelaku dan aktifitas menjadi pembahasan dalam penelitian. Untuk menentukan pilihan tempat, pelaku, dan aktifitas yang perlu dibahas dalam penelitian maka harus membuat batasan yang dinamakan fokus penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Pemberian Hibah Daerah kepada Organisasi Masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat yang diukur melalui beberapa Pendekatan teori Efektivitas Organisasi :
  - a. Pendekatan Tujuan (*Goal Attainment*).
  - b. Pendekatan Teori Sistem (*System Approach*).
  - c. Pendekatan Konstituens-Strategis (*strategic-constituencies approach*).
  - d. Pendekatan Nilai-nilai Bersaing (*competing-values approach*).

### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung, Bagian Kesejahteraan Rakyat yang beralamat di Jl. Tana Abang No. 1, Tideng Pale, Tana Tidung. Penelitian ini dilaksanakan pada rentang bulan Mei sampai September 2016.

## D. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

### 1. Sumber Informasi

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan teknik pengumpulan data. Berdasarkan sumber data penelitian maka jenis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data primer dari informan. Data primer pada penelitian ini adalah jawaban yang dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara mengenai proses Pemberian Hibah kepada Organisasi masyarakat dalam menghasilkan efektivitas pelayanan masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tana Tidung dan hambatan-hambatan yang dihadapi.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain tempat, kegiatan, serta dokumen yang berkaitan dengan Pemberian Hibah kepada Organisasi masyarakat dalam menghasilkan efektivitas pelayanan masyarakat. Data sekunder yang dikumpulkan antara lain berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang telah

dipublikasikan. Data sekunder pada penelitian ini antara lain adalah gambaran umum tentang Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung dan hal lain yang berhubungan dengan Program Pemberian Hibah kepada Organisasi Masyarakat.

## **2. Informan Penelitian**

Informan merupakan sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis (Arikunto, 2010: 172). Dalam penelitian kualitatif, informan memegang peranan yang sangat penting. Informan adalah orang-orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Seorang informan harus memenuhi persyaratan sebagai seorang informan, antara lain jujur, tepat pada janji, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk anggota salah satu kelompok yang bertentangan dalam latar penelitian, dan mempunyai pandangan tertentu tentang peristiwa yang terjadi. Informan atau narasumber penelitian ini ada 7 informan yang terdiri dari 4 informan kunci dan 3 informan biasa.

### **a. Informan Kunci**

Informan kunci merupakan orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Informan kunci mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, sedangkan informan biasa adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang sedang diteliti. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung yaitu Bapak Uus (48

tahun), Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat yaitu Bapak Japri (47 tahun) dan juga Ketua Pengurus Organisasi Kemasyarakatan, yaitu Bapak Faisal Idris selaku ketua Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) Tana Tidung dan Bapak Syaiful selaku ketua Lembaga Adat Dayak (LAD).

**b. Informan Biasa**

Informan biasa adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan. Informan biasa dalam penelitian ini adalah pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung yaitu Bapak Hadi selaku staf pelaksana dan Bapak Nejon selaku Bendahara bantuan sosial dan hibah. Pemilihan pegawai sebagai informan biasa disebabkan pegawai dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung merupakan subjek yang berhubungan dengan proses Pemberian Hibah kepada Organisasi masyarakat. Ditambah dari Inspektorat Kabupaten Tana Tidung yaitu Bapak Budiman HS., selaku pegawai inspektorat yang berperan sebagai pengawas yang memeriksa kegiatan pemberian hibah kepada organisasi masyarakat.

**E. Instrumen Penelitian**

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian dalam proses pengumpulan data. Instrumen merupakan alat untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi sesuatu. Instrumen yang berkualitas tinggi akan memberikan tingkat

keakuratan hasil pengukuran, penilaian dan atau evaluasi yang baik (Arikunto, 2010). Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara. Instrumen pedoman wawancara berisi garis besar pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara. Pembuatan pedoman wawancara diawali dengan melihat masalah dan tujuan penelitian, mengambil konsep atau variable yang menjadi focus penelitian, kemudian diturunkan menjadi indikator-indikator. Pertanyaan akan dikembangkan berdasarkan indikator tersebut. Dalam penelitian ini, instrument penelitian dibuat berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3.1. Proses Pengembangan Instrumen Penelitian untuk Pemberi Hibah (Bagian Kesra Setda Tana Tidung)

Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Indikator	No. Pertanyaan dalam Pedoman Wawancara
Pertanyaan Umum (deskriptif)			No 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7 8, 9, dan 10
1. Menganalisis efektivitas menganalisis efektivitas pemberian bantuan hibah kepada organisasi masyarakat di Kabupaten Tana Tidung.	1. Efektivitas pemberian Hibah	1. Pendekatan Tujuan ( <i>Goal Attainment</i> ). 2. Pendekatan Teori Sistem ( <i>System Approach</i> ). 3. Pendekatan Konstituens-Strategis ( <i>strategic-constituencies approach</i> ). 4. Pendekatan Nilai-nilai Bersaing ( <i>competing-values approach</i> ).	No. 11, 12, 13, 14  No. 15, 16, 17, 18  No. 19, 20, 21, 22, 23, 24  No. 25, 26, 27

Tabel 3.2. Proses Pengembangan Instrumen Penelitian untuk Penerima Hibah (Organisasi Kemasyarakatan)

Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Indikator	No. Pertanyaan dalam Pedoman Wawancara
Pertanyaan Umum (deskriptif)			No 1, 2, 3,4,5,6, 7, dan 8.
1. Menganalisa efektivitas program pemberian hibah oleh pemerintah Kabupaten Tana Tidung kepada organisasi masyarakat.	1. Efektivitas pemberian Hibah	1. Pendekatan Tujuan ( <i>Goal Attainment</i> ). 2. Pendekatan Teori Sistem ( <i>System Approach</i> ). 3. Pendekatan Konstituens-Strategis ( <i>strategic-constitencies approach</i> ). 4. Pendekatan Nilai-nilai Bersaing ( <i>competing-values approach</i> ).	No. 9 dan10.  No. 11, 12, 13, dan14.  No. 15, 16, 17, 18, 19, dan 20.  No. 21 dan 22

#### F. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang diambil dalam penelitian ini menggunakan tiga cara yakni:

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan kondisi di mana dua orang atau lebih melakukan pertemuan dan bertukar ide serta informasi dengan menggunakan metode tanya jawab. Dengan demikian maka wawancara dapat dilakukan dengan membicarakan satu tema tertentu. Semiawan (2010:49-50) menyatakan bahwa “studi kasus merupakan penelitian yang mendalam, maka dalam hal ini wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam”. West dan Turner (2007:83) menjelaskan bahwa “wawancara mendalam memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan wawancara dengan subjek

penelitian guna mendapatkan data atau informasi yang diharapkan". Hal ini berarti pada penelitian kualitatif dimungkinkan untuk melakukan wawancara secara mendalam untuk menggali data sedetail-detailnya.

#### b. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diinginkan. Pada tradisi penelitian kualitatif, data tidak akan diperoleh di belakang meja saja, melainkan peneliti harus turun ke lapangan di mana data atau objek penelitian berada. Semiawan, (2010:112) menjelaskan "data yang diperoleh dari lapangan dapat berupa sikap, perilaku, kelakuan, tindakan atau keseluruhan interaksi antar manusia atau anggota dalam organisasi". Artinya observasi dapat dilakukan dengan mengamati sikap, perilaku dan tindakan dari subyek penelitian dalam konteks penelitian.

"Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama dan bagaimana. Lantas peneliti menetapkan dan melakukan desain cara merekam wawancara tersebut. Wawancara yang sudah direkam harus dijaga dan ditempatkan di tempat yang baik, sehingga kualitas suara partisipan tetap terjaga, karena nantinya akan diputar kembali dan didengar berkali-kali untuk dianalisis (Semiawan, 2010:112).

"Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian dan hasil dari pengamatan tersebut dicatat secara sistematis" (Moleong, 2007:74). Teknik ini dipakai dalam rangka mendapatkan data yang dibutuhkan dan menyimpannya sebagai validasi

data penelitian. Dengan demikian, maka data dalam penelitian bisa dibuktikan dan disinkronkan dengan tulisan dalam hasil penelitian. Observasi dapat menjadi teknik pengumpulan data secara ilmiah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Zulfikar dan Budiantara: 2014, 107):

- 1) Diabadikan pada pola dan tujuan penelitian yang sudah ditetapkan
- 2) Direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis, dan tidak secara kebetulan (*accidental*) saja
- 3) Dicatat secara sistematis dan dikaitkan dengan proposisi yang lebih umum dan tidak karena didorong oleh implus dan rasa ingin tahu belaka.
- 4) Validitas, reabilitas dan ketelitian dicek dan dikontrol seperti pada data ilmiah lainnya.

Observasi dalam penelitian ini dilaksanakan pada saat wawancara, pada saat petugas melayani para ormas penerima hibah, situasi kantor serta hal-hal lain yang mendukung tema penelitian. Observasi direncanakan sejak awal untuk melengkapi data hasil wawancara.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data. Fungsi dokumentasi sendiri untuk memperkaya data dan menambahkan data pelengkap. Menurut Sugiyono:

”dokumentasi dilakukan dengan cara melakukan pencatatan terhadap peristiwa yang terjadi. Dokumentasi bisa merupakan tulisan bisa berbentuk peraturan, kebijakan, biografi dan lain-lain. Dokumen bentuknya gambar bisa berupa foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Sedangkan dokumen dalam bentuk dokumen adalah video, gambar, atau lain-lain. Dokumentasi dalam pengumpulan dilakukan untuk melengkapi data dari hasil observasi maupun wawancara (Sugiyono, 2009 : 240).

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis berupa peraturan, data statistik, data foto dan data-data

lain yang memungkinkan digunakan. Dokumentasi dilakukan untuk mendukung atau melengkapi data-data hasil observasi dan data hasil wawancara.

### G. Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda, atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Melalui pengungkapan terhadap unit analisis data dengan menetapkan kriteria responden tersebut, dengan sendirinya akan diperoleh siapa dan apa yang menjadi subjek penelitiannya. Menurut Sugiyono (2010:68) menjelaskan unit analisis terkait dengan permasalahan yang diteliti ada 3, yaitu: (1) *place*, tempat dimana interaksi dalam penelitian berlangsung; (2) *actor*, pelaku atau orang yang sesuai dengan objek penelitian tersebut; (3) *activity*, kegiatan yang dilakukan actor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Tempat, yaitu lokasi pelaksanaan penelitian pada Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung, Bagian Kesejahteraan rakyat.
- b. Pelaku, yaitu pihak-pihak yang melaksanakan proses pemberian dana hibah dan penerima dana hibah di Bagian Kesejahteraan Rakyat, Setda Kabupaten Tana Tidung.
- c. Aktivitas, yaitu proses pelaksanaan proses pemberian dana hibah dan penerima dana hibah di Bagian Kesejahteraan Rakyat, Setda Kabupaten Tana Tidung.

## H. Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut (Moleong, 2007:247):

- a. Mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari proses pengumpulan data seperti wawancara, observasi, maupun dokumentasi
- b. Melakukan implementasi dan pengurangan terhadap data yang dianggap tidak penting dan tidak relevan dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan dengan cara membuat rangkuman dari semua data yang ada dan mengutamakan data yang penting dan relevan dengan melihat sisi kedalaman guna dipertahankan sebagai data yang akan dijadikan sebagai bahan analisa.
- c. Data diklasifikasi dengan disesuaikan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian ini
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data. Hal tersebut dilakukan guna memastikan kesesuaian data yang didapatkan dengan cara melakukan perbandingan terhadap data yang berasal dari sumber yang berbeda. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara triangulasi data
- e. Melakukan penafsiran terhadap data yang sudah dikaji, direduksi dan diklasifikasi serta sudah diperiksa keabsahannya. Penafsiran tersebut membutuhkan pemikiran dan analisa kritis terhadap fenomena yang menjadi fokus penelitian dan data yang sudah dikumpulkan. Interpretasi tersebut merupakan pemikiran orisinil peneliti dengan berdasarkan pada data dan dikaitkan dengan teori atau hasil penelitian terdahulu yang masih mempunyai relevansi dengan penelitian ini
- f. Langkah yang terakhir dilakukan adalah menarik kesimpulan dari hasil interpretasi data yang sudah dilakukan pada tahapan sebelum dalam langkah analisis data dalam penelitian ini.

Langkah-langkah di atas merupakan langkah dalam penelitian kualitatif. Berdasarkan langkah tersebut, penelitian ini akan melakukan kajian data dari proses wawancara dan observasi maupun dokumentasi. Kemudian data dipilih yang penting dan yang tidak untuk bahan analisis selanjutnya. Pengklasifikasian data menjadi langkah berikutnya serta data diperiksa keabsahannya berdasarkan triangulasi data. Data diinterpretasi dan disimpulkan untuk penulisan laporan penelitian.

Menurut Moleong (2007:320), keabsahan data adalah “suatu keadaan yang harus memenuhi nilai yang benar, dapat diimplementasikan, konsistensi dari prosedurnya dari temuan dan keputusannya”. Moleong (2007:324) menyatakan bahwa dalam pemeriksaan digunakan empat kriteria sebagai berikut:

a. *Credibility* (derajat kepercayaan)

Hal ini merupakan kriteria utama dalam kriteria keabsahan data. Data yang didapatkan di lapangan harus mempunyai derajat kepercayaan. Konsep ini sebenarnya merupakan pengganti dari validitas internal dari non kualitatif. Supaya data mempunyai derajat kepercayaan, maka peneliti harus melakukan perpanjangan waktu di lapangan dalam melakukan pengumpulan data, melakukan pengamatan secara terus menerus dan melakukan tirangulasi, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan kontrol dan perbandingan terhadap data yang ada.

b. *Transferability* (keteralihan)

Kriteria ini meliputi penggunaan sampel secara memadai, dan melakukan perbandingan terhadap data secara konstan serta melakukan pencarian terhadap kejadian empiris mengenai keseragaman konteks

c. *Dependability* (kebergantungan)

Kebergantungan merupakan hal yang berbeda dengan reabilitas. Hal tersebut karena disebabkan oleh tinjauannya dari segi bahwa konsep tersebut memperhitungkan segala-galanya, yaitu apa yang ada dalam reabilitas tersebut ditambah dengan faktor-faktor lainnya yang mempunyai keterkaitan. Kebergantungan bisa didapatkan dengan cara pemeriksaan data di lapangan, reduksi data dan analisis serta interpretasi data.

d. *Confirmability* (kepastian)

Kepastian yang dimaksud disini adalah memastikan sesuatu secara objektif dan tidak bergantung terhadap persetujuan pandangan, pendapat dan penemuan orang lain. Peneliti harus melakukan pengamatan secara subjektif, dan jika hasil pengamatan peneliti disepakati banyak orang, maka data bisa disebut objektif. Kepastian didapat dari pengumpulan data, melakukan diskusi dengan subjek penelitian, memperhatikan etika dalam penelitian dan mengecek ulang data yang sudah didapatkan dari proses pengumpulan data.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Deskripsi Objek Penelitian

#### 1. Gambaran Umum Kabupaten Tana Tidung

Kabupaten Tana Tidung merupakan Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, yang telah disetujui pembentukannya pada Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 17 Juli 2007 dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Utara. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Tana Tidung adalah: 1) Sebelah Utara dengan Kabupaten Nunukan; 2) Sebelah Timur Laut Sulawesi dan Kota Tarakan; 3) Sebelah Selatan Kabupaten Bulungan; dan 4) Sebelah Barat dengan Kabupaten Malinau. Kabupaten Tana Tidung terbagi atas 5 kecamatan sebagaimana Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1  
Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Luas Km <sup>2</sup>
1	Sesayap	7	1.116,92 km <sup>2</sup>
2	Tana Lia	5	877,86 km <sup>2</sup>
3	Sesayap Hilir	9	1.090,53 km <sup>2</sup>
4	Muruk Rian	6	608,62 km <sup>2</sup>
5	Betayau	6	1.107,65 km <sup>2</sup>
<b>Jumlah</b>			<b>4.828,58</b>

Sumber: Website Resmi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

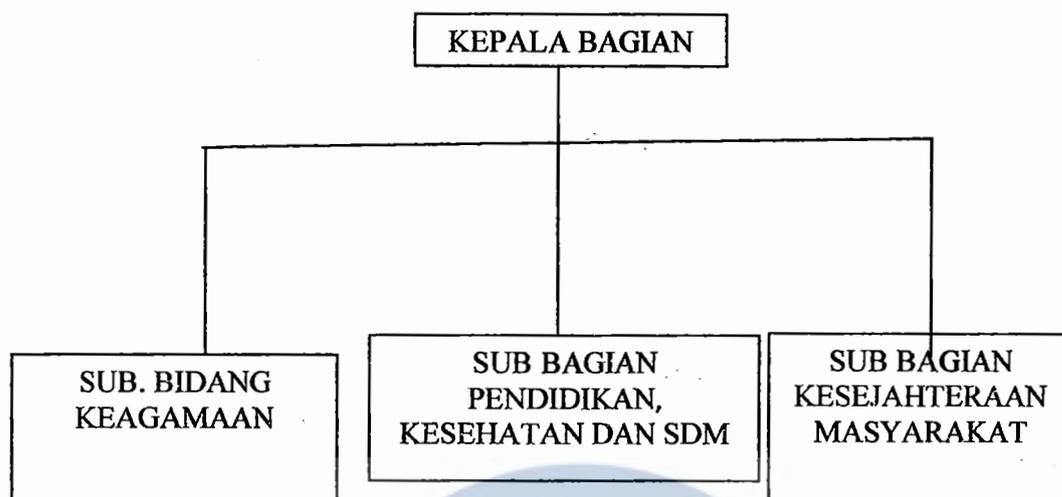
Pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tana Tidung mempunyai cita-cita yang tergambar pada visi dan misinya. Visi Kabupaten Tana Tidung adalah "Meningkatkan Pembangunan Kabupaten Tana Tidung Melalui Harmoni

Dalam Pendayagunaan Potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Ekonomi Prorakyat, Budaya Lokal Dan Iptek Menuju Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkelanjutan”. Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan 9 misi pembangunan Kabupaten Tana Tidung. Informasi selengkapnya tentang profil Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada website resmi Pemerintah Daerah kabupaten Tana Tidung di [www.tanatidung.go.id](http://www.tanatidung.go.id)

## **2. Deskripsi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung**

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau pembinaan dibidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan, bidang keagamaan serta pendidikan dan SDM. Secara juga khusus mengelola pemberian Bantuan Sosial dan Hibah Daerah baik perorangan maupun kelompok masyarakat yang berbentuk Organisasi Masyarakat maupun Yayasan yang bersifat Nirlaba.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tana Tidung dengan susunan sebagai berikut : 1) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat; 2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dan 3) Staf Pelaksana. Bagian Kesejahteraan Rakyat dibagi menjadi 3 sub bagian, yaitu: Sub bagian Keagamaan, Sub bagian Pendidikan, Kesehatan dan SDM dan Sub bagian Kesejahteraan Masyarakat.



Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung (2016)

Gambar 4.1.  
Bagan Struktur Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat  
Kabupaten Tana Tidung

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung memiliki sumber daya manusia aparatur sipil sebanyak 13 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, pendidikan terbanyak adalah yang lulus S1 atau sarjana, yaitu 9 orang (69%) yang menyebar di formasi 3 kepala sub bagian, dan masing-masing 2 staff di masing-masing sub bagian. Pendidikan S2 hanya dimiliki 1 orang yang menduduki jabatan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat. Sedangkan untuk pendidikan D3 ada 1 orang dan pendidikan SMA ada 2 orang. Kondisi saat ini, banyak dari PNS yang sedang melanjutkan studi untuk meningkatkan jenjang pendidikan formal, baik meningkatkan dari SMA ke S1 atau S1 menjadi S2.

**Tabel 4.2**  
**Data Formasi Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah**  
**Kabupaten Tana Tidung 2015**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Pendidikan</b>
1.	Kepala Bagian	1	S.2
2.	Kasubag Keagamaan	1	S.1
3.	Kasubag Pendidikan, Kesehatan dan SDM	1	S.1
4.	Kasubag. Kesejahteraan Rakyat	1	S.1
5.	Staf Bidang Keagamaan	2	S.1
		1	D.3
6.	Staf Bidang Pendidikan, Kesehatan dan SDM	2	S.1
		1	SMA
7.	Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat	2	S.1
		1	SMA
<b>Total</b>		<b>13</b>	

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung (2016)

### **3. Deskripsi Pemberian Hibah Daerah kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten Tana Tidung**

Ruang lingkup Pengelolaan Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD dan Hibah dapat berupa uang, barang, atau jasa.

Bentuk hibah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 52 /PMK. 010 /2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah membedakan hibah dari aspek pencatatan keuangan sebagai berikut:

- a. Hibah dalam bentuk uang / dana (*in cash*) yaitu hibah yang diperoleh dalam bentuk valas atau valas yang dirupiahkan yang digunakan penerima hibah untuk membiayai suatu proyek atau kegiatan.
- b. Hibah dalam bentuk barang (*in kind*) yaitu hibah yang diperoleh dalam bentuk barang dari penerima hibah yang dapat dinilai dengan uang yang dalam pelaksanaannya dapat dimanfaatkan secara langsung atau harus dijual untuk membiayai suatu proyek / kegiatan lain seperti yang telah disepakati dalam nota perjanjian hibah
- c. Hibah dalam bentuk jasa, yaitu hibah yang diperoleh antara lain berbentuk pelatihan, tenaga ahli, jasa konsultan dan paket kegiatan / proyek yang dapat dinilai dengan uang.

Pelaksanaan pemberian hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Tana Tidung sudah dilaksanakan sejak tahun 2009. Selama pelaksanaan itu sampai tahun 2016 ini telah terjadi berbagai perbaikan mekanisme karena perubahan peraturan yang menjadi pedoman, yaitu Permendagri yang mengatur tentang pelaksanaan hibah. Pada awal pelaksanaannya, pemberian hibah dilaksanakan secara gelondongan karena kabupaten baru terbentuk sehingga organisasi pemerintahan daerah belum berjalan dengan baik. Untuk itu pengajuan proposal akan diverifikasi oleh Kepala Daerah secara langsung dan langsung ditetapkan melalui surat

keputusan. Terkait hal tersebut berikut hasil wawancara dengan kepala sub-bagian kesejahteraan masyarakat, Setda Tana Tidung:

“Proses awal-awal berdirinya Kabupaten, perencanaan Dana Hibah masih bersifat Gelondongan dalam arti jika ada pengajuan proposal Dana Hibah akan di verifikasi secara langsung dan jika disetujui Kepala Daerah akan di tetapkan melalui Surat Keputusan”(Wawancara kepala Sub-bagian Kesejahteraan masyarakat, 23 Mei 2016)

Seiring berjalannya waktu, penataan organisasi di Kabupaten Tana Tidung sudah mulai berjalan dengan baik, maka mekanisme pemberian bantuan dana hibah kepada ormas juga menjadi lebih baik. Adanya dana hibah dari pemerintah daerah direspon secara baik oleh ormas-ormas yang ada, termasuk juga kepada perusahaan daerah, organisasi yang ada di bawah pemerintah, masyarakat dan kelompok masyarakat. Terkait respon tersebut diterangkan oleh kepala bagian kesejahteraan rakyat berikut ini:

“Cukup baik dapat dilihat dari cukup banyaknya proposal permohonan bantuan dana hibah kepada Pemerintah daerah” (Wawancara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, 25 Mei 2016)

Respon masyarakat yang cukup baik tersebut dibenarkan oleh staff bagian kesejahteraan rakyat, Setda Kabupaten Tana Tidung bahwa dana hibah digunakan untuk kegiatan-kegiatan kelompok masyarakat dan jumlahnya semakin tahun semakin banyak. Berikut keterangannya:

“Responnya baik karena dengan adanya dana hibah masyarakat merasa terbantu terutama bantuan terhadap kegiatan-kegiatan kelompok masyarakat” (Wawancara staf Kesejahteraan Rakyat, 22 Mei 2016)

Namun dilain pihak, pemberian dana hibah kepada ormas yang ada juga cenderung menimbulkan ketergantungan. Artinya pihak ormas dalam berkegiatan selalu tergantung adanya dana hibah dari pemerintah selain sumbangan masyarakat. Jika tidak ada hibah seringkali kegiatan masyarakat tidak berjalan, atau hanya berjalan sekedarnya saja. Hal tersebut disampaikan oleh kepala Sub-bagian Kesejahteraan Masyarakat berikut ini:

“Mereka sangat menjadi ketergantungan dengan bantuan Dana Hibah Daerah dan donasi dari masyarakat (Wawancara kepala Sub-bagian Kesejahteraan masyarakat, 23 Mei 2016)

Ketergantungan memang tidak dapat dihindari, karena memang dana hibah ini ditujukan untuk merangsang kegiatan-kegiatan ormas yang ada. Ada yang dapat mengembangkannya tetapi juga ada yang mempunyai ketergantungan terhadap dana hibah. Pembinaan dan pendampingan dari pemerintah daerah diharapkan untuk mampu merangsang ormas-ormas tersebut mandiri dan bantuan hanya sebatas pelengkap, sehingga ada maupun tiada dana hibah, ormas masih dapat melakukan kegiatannya.

Realisasi hibah Daerah kepada Organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Tana Tidung secara aturan juga mengacu pada Permendagri yang ada. Oleh karena itu, realisasi penyaluran hibah di Kabupaten tana Tidung meliputi 4 tahap tersebut, yaitu penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi. Tahapan atau ruang lingkup penyaluran dana hibah tersebut akan diuraikan secara detail sesuai dengan pelaksanaan di Kabupaten tanah Tidung dengan

membandingkan antara norma yang seharusnya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

**a. Penganggaran Dana Hibah di Kabupaten Tana Tidung.**

Berdasarkan peraturan yang ada terkait penganggaran hibah khususnya untuk organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Tana Tidung idealnya menyampaikan usulan permohonan dana hibah secara tertulis kepada kepala daerah yang kemudian Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan. Kepala SKPD kemudian menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Kemudian TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Pencantuman alokasi anggaran meliputi hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa. Hibah berupa uang dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran – Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD), sedangkan hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Namun dalam pelaksanaannya masih belum seperti itu, hal ini karena semua masih ditangani oleh bagian kesejahteraan Rakyat, bukan SKPD yang bersangkutan seperti yang diamanatkan Permendagri No 32 tahun 2011. Sementara itu pengajuan proposal oleh ormas seringkali diajukan pada tahun berjalan, bukan pada tahun sebelumnya (tahun perencanaan). Oleh karena itu dalam hal perencanaan yang terkait dengan penganggaran, masih belum berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Permendagri no 32 tahun 2011. Hal ini disampaikan oleh Kepala Subbag Kesejahteraan Masyarakat berikut ini:

“Perencanaan program pemberian hibah masih berantakan, sebabnya permohonan pengajuan bantuan yang diajukan ormas terjadi pada tahun anggaran berjalan dan bukan tahun sebelumnya bertentangan dengan peraturan penyusunan APBD, tapi tidak semua. Usulan dari masyarakat pada musrembang harus berbentuk proposal permohonan bantuan hibah pada tahun musrembang tsb bukan tahun berikutnya. Verifikasi berkas seharusnya dilakukan oleh SKPD terkait tapi kenyataannya masih dilakukan oleh bagian kesra” (Wawancara kepala Sub-bagian Kesejahteraan masyarakat, 23 Mei 2016).

Masalah proposal dan verifikasi berkas masih belum tertib baik jadwal, maupun pelaksanaannya. Meskipun demikian pemberian hibah masih terus berjalan dengan usaha untuk menatanya. Pendapat ini disanggah oleh kepala Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut:

“Secara umum melalui APBD sudah berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya seringkali proposal disampaikan pada saat tahun berjalan, jadi sulit direalisasikan. Bisa pun biasanya melalui mekanisme APBD-P. Pada awal terbentuknya kabupaten ini masih bisa, namun kita sudah mulai menata bahwa pengusulan proposal harus pada tahun sebelumnya. Artinya pada tahun pembahasan anggaran” (Wawancara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, 25 Mei 2016).

Masalah penganggaran dan pengajuan proposal lebih kepada masalah bagaimana pengajuan proposal diajukan sebelum anggaran tahun berjalan, sehingga memberi waktu untuk melakukan penyeleksian dan verifikasi. Selain itu sesuai prosedur harus tahun sebelumnya. Setelah berjalan beberapa tahun penyaluran dana hibah pada ormas, ormas mulai melakukan tertib pengajuan untuk tahun sebelumnya, meskipun ada yang kemudian ditarik ke mekanisme APBD-P.

Pihak Inspektorat Kabupaten Tana Tidung, pada proses perencanaan hibah juga memandang hal yang sama. Berikut petikan wawancara dengan Bapak Budiman, salah seorang pihak inspektorat yang melakukan pengawasan tentang program ini:

“Kami mengamati proses perencanaan pada usulan program dan proses verifikasinya yang masih lemah. Usulan program dilaksanakan pada tahun anggaran yang berjalan, seharusnya pada tahun anggaran sebelumnya. Ini masih banyak terjadi karena apabila diterapkan seperti ini dana tidak akan terserap. Kemudian verifikasi harus tegas, artinya jika tidak sesuai dengan persyaratan maka tidak bisa masuk. Hal ini juga masih lemah karena berbagai faktor, diantaranya dekat dengan pejabat daerah atau yang lain. Ada juga verifikasi yang dilakukan secara cepat dan kurang teliti karena memang kurang tenaga” (Wawancara Bapak Budiman (Inspektorat), tanggal 15 September 2016).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya kelemahan dalam perencanaan dari sudut pandang inspektorat adalah usulan yang tidak tepat waktu, yaitu pada saat tahun anggaran berjalan untuk kegiatan tahun itu juga. Hal berikutnya adalah verifikasi lembaga dan verifikasi program yang dianggap masih lemah atau kurang tegas. Hal ini masih dimaklumi karena verifikasi seharusnya dilakukan oleh bagian

kesra dan instansi terkait lainnya, namun kenyataannya hanya dilakukan bagian kesra yang sangat kurang jumlah personelnnya.

Pada tahun 2015 Pemda Kab. Tana Tidung menganggarkan hibah sebesar Rp.30.000.000.000,- dengan jumlah penerima sebanyak 53 ormas, namun dalam APBD perubahan bertambah menjadi sebesar Rp.51.511.811.150,- untuk 126 ormas penerima. Realisasi kepada ormas sebanyak 102 penerima dan terdapat 46 penerima yang belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban hibah (Bagian Kesra Setda Tana Tidung, 2016). Dana hibah secara keseluruhan mampu direalisasikan sebesar 43.585.811.150,- atau 84,61 % dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.  
Realisasi Dana Hibah Kabupaten Tana Tidung 2015

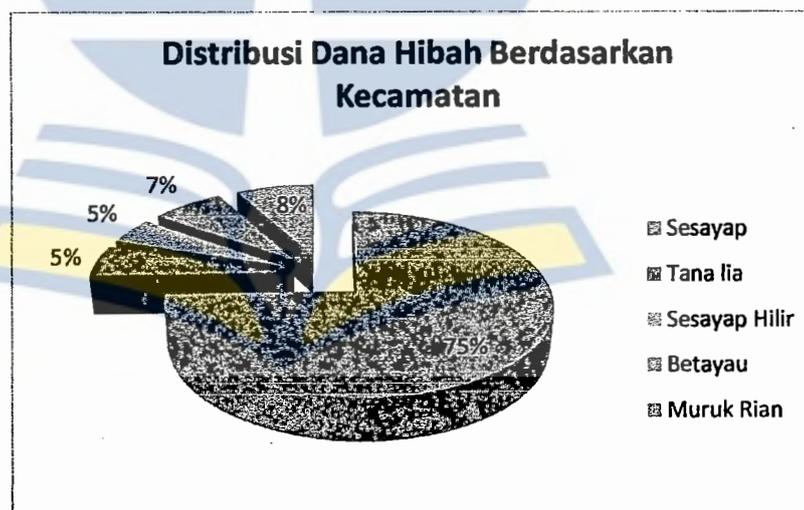
No	Belanja Hibah Kepada	Anggaran	Realisasi	%
1	PDAM Tirta Dharma Kab. Tana Tidung	2.000.000.000	2.000.000.000	100
2	Badan/Lembaga/Organisasi	43.370.611.150	38.250.811.150	88,19
3	Kelompok/Anggota Masyarakat	6.141.000.000	3.335.000.000	54,30
	<b>Total</b>	<b>51.511.811.150</b>	<b>43.585.811.150</b>	<b>84,61</b>

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat, Setda Tana Tidung, 2016.

Dari Tabel 4.3, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan dana paling banyak dialokasikan pada Badan/Lembaga/ Organisasi yang ada dibawah naungan pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung yaitu sebesar 38,25 M atau 88,19% dari pagu anggaran. Bagian untuk PDAM Tirta Dharma ada 2 M. Sedangkan realisasi paling kecil adalah dana untuk ormas atau kelompok masyarakat yaitu hanya terealisasi 54,30% dari pagu anggaran

yang telah disiapkan atau senilai 3,335 M. Penyerapan yang kecil berarti target tidak tercapai. Masalah penyerapan yang kecil lebih disebabkan oleh hasil seleksi dan verifikasi oleh bagian kesra yang tidak meloloskan proposal yang tidak memenuhi syarat. Ada juga proposal yang lolos dengan rasionalisasi jumlah bantuan. Hal ini menyebabkan penyerapan rendah, terutama pada kelompok anggota masyarakat serta badan atau lembaga..

Berdasarkan distribusi wilayah pemberian Hibah tersebut, dari 126 ormas yang menerima, sebagian besar berada di kecamatan Sesayap yaitu ada 94 ormas atau (75%), untuk Kecamatan Muruk Rian ada 10 ormas (8%) yang menerima dana hibah, sedangkan 7% untuk Kecamatan Betayau, dan 5% untuk masing-masing Kecamatan Sesayap hilir dan Tana Lia dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut ini.



**Gambar 4.2.**  
Distribusi Dana Hibah pada Ormas berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Tana Tidung Than 2015

Distribusi hibah kepada ormas paling banyak berada di Kecamatan Sesayap. Hal ini dikarenakan Kecamatan Sesayap merupakan kota

kabupaten tempat pemerintahan kabupaten Tana Tidung berada, sehingga pusat keramaian, konsentrasi masyarakat serta kegiatan banyak di daerah ini. Sebagai Kota Kabupaten, banyak organisasi kemasyarakatan yang berdiri di kecamatan ini. Sedangkan untuk kecamatan yang lain, jumlahnya tidak banyak, rata-rata 5% sampai 8%. Untuk nama-nama data penerima hibah dapat dilihat dalam lampiran 4 di bagian akhir tulisan ini.

**b. Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Hibah di Kabupaten Tana Tidung.**

Pelaksanaan anggaran hibah oleh organisasi kemasyarakatan yang berupa uang harus berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD), sedangkan pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Dalam pelaksanaannya hal ini dapat dipenuhi oleh PPKD dan SKPD yang bersangkutan. Meskipun demikian, pekerjaan selanjutnya semua berada pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Tana Tidung.

Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah. NPHD yang ditandatangani memuat ketentuan mengenai: pemberi dan penerima hibah; tujuan pemberian hibah; besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; hak dan kewajiban; tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan tata cara pelaporan hibah.

Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD. Kemudian Kepala daerah menetapkan daftar

penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penyaluran/ penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima organisasi kemasyarakatan hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), sedangkan pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan yang terjadi seperti yang dibahas di depan, sampai saat ini yang menangani masalah hibah masih bagian kesra Setda Tana Tidung, SKPD masih sangat kecil perannya dalam pelaksanaan hibah ini, baik dalam melakukan verifikasi, melakukan pelaksanaan serta melakukan pengawasan dan evaluasi. Peran sentral masih dipegang bagian kesra setda Tana Tidung.

Masalah yang muncul terkait dengan pelaksanaan, umumnya banyak ormas yang mengajukan proposal untuk peruntukan operasional kantor, meskipun hal tersebut tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban, termasuk sewa kantor dan lain-lain, sedangkan hanya sedikit yang mengajukan proposal untuk kegiatan. Masalah ini tentu akan mempengaruhi kualitas dan efektivitas penyaluran dana hibah. Terkait hal tersebut, berikut pernyataan Kepala Sub-bag Kesejahteraan Masyarakat:

“Sudah dilaksanakan dengan baik dan terdapat timbal balik yang positif hanya saja sering terlambat dalam pelaporan pertanggung-jawaban. Namun masih banyak ormas mengajukan proposal untuk operasional berupa barang dan jasa dan sedikit yang mengajukan untuk kegiatan;

sangat tidak efektif. Termasuk sewa tempat sekretariat meski tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban, secara tidak langsung mengurangi nilai keefektifan organisasi” (Wawancara kepala Subbagian Kesejahteraan masyarakat, 23 Mei 2016).

Ormas yang ada di Kabupaten Tana Tidung mulai belajar untuk menggunakan dana sesuai dengan item kegiatan sesuai proposal. Sehingga semakin hari mereka semakin mengerti dalam pelaksanaannya. Pernyataan ini secara implisit didukung oleh pengakuan dari kepala bagian Kesra Setda Tana Tidung berikut ini:

“Sepanjang sepengetahuan kami Ormas-ormas melaksanakan kegiatan yang bersumber dari dana Hibah telah sesuai dengan item kegiatan yang ada dalam proposal realisasi mereka, meskipun masih terdapat beberapa yang tidak sesuai yaitu dana dimasukkan untuk operasional, bukan kegiatan”. (Wawancara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, 25 Mei 2016).

Hal ini berarti dalam pelaksanaannya ada 2 kriteria ormas yaitu yang mampu melaksanakan kegiatan dengan baik dan sesuai dengan apa yang ada di dalam proposal yang diajukan, baik penggunaan dana untuk kegiatan maupun kegiatannya itu sendiri. Namun juga tidak sedikit yang melaksanakan kegiatannya tidak sesuai dengan apa yang diajukan dalam proposal, misalnya untuk biaya operasional kantor atau yang lain yang pada intinya bukan untuk kegiatan seperti yang tercantum pada proposal.

Respon tentang pelaksanaan kegiatan atau proposal oleh ormas yang melaksanakannya dianggap positif karena berbagai hal, yaitu ormas mampu menyelenggarakan kegiatan sesuai yang ada di proposal mereka dan apa yang menjadi visi misi ormas. Terkait dengan pendapat ormas, berikut pendapat dari ketua ormas FKUB dan Lembaga Adat Dayak Belusu terkait pelaksanaan dana hibah:

“Pelaksanaan kegiatan yang kami lakukan berjalan dengan baik terutama di daerah ini masyarakatnya sangat kompleks berbagai suku dan agama ada khusus untuk kerukunan umat beragama kami mewadahnya” (Wawancara dengan Ketua FKUB, 22 Mei 2016)

“Berjalan baik sesuai dengan Program Kerja yang dicantumkan dalam Proposal Pengajuan bantuan Hibah untuk Operasional Kegiatan Pemberdayaan Lembaga” (Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Dayak Belusu, 22 Mei 2016)

Ormas yang berhasil diwawancarai termasuk ormas yang secara umum telah mampu menjalankan program yang diajukannya. Namun di luar itu, masih banyak ormas yang belum mampu melaksanakan kegiatan berdasarkan proposal yang ada. Baik FKUB maupun Lembaga Adat Dayak Belusu setiap tahun sudah mempunyai agenda kegiatan kemasyarakatan yang dananya didapatkan dari hibah. Kegiatan kedua lembaga ini dianggap penting karena dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama dan pelestarian budaya adat Kalimantan.

Pihak inspektorat memberikan penilaian tersendiri terkait pelaksanaan program sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan program ada ormas yang sudah baik, dan jumlahnya setiap tahun bertambah. Namun masih ada ormas yang dalam pelaksanaannya menyimpang dari perencanaan, terutama dalam hal penggunaan anggaran atau prosentase penggunaan anggaran untuk honor melebihi dari batas anggaran yang dibolehkan. Hal ini tentu sudah menyimpang dari perencanaan anggaran. Ormas yang semacam ini seharusnya ditegur secara keras oleh bagian Kesra atau instansi terkait lainnya, karena ini awal penyimpangan yang dapat berujung pada pemanfaatan uang untuk kepentingan pribadi bukan kegiatan (Wawancara Bapak Budiman (Inspektorat), tanggal 15 September 2016).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut hal yang menjadi perhatian inspektorat adalah penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan anggaran dan penggunaan bagian dana untuk honor yang melebihi jatah

maksimal. Oleh karena itu pengawasan oleh kesra dan instansi terkait lainnya dapat mengarah pada kesesuaian penggunaan anggaran beserta alokasinya yang sesuai dengan peruntukannya dalam perencanaan awal.

**c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah di Kabupaten Tana Tidung.**

Pelaporan dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan penerima hibah yang berupa uang dengan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait. Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait. Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait. Kegiatan pelaporan ini dalam kenyataannya seringkali terlambat atau bahkan ormas tidak menyerahkan laporannya.

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi: usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah; keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah; NPHD; pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa. Ketentuan ini secara administratif bisa terpenuhi

oleh pemerintah daerah dan dilakukan oleh bagian kesra setda Tana Tidung.

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: laporan penggunaan hibah; surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa. Pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan serta disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pertanggungjawaban dari ormas ini yang masih banyak masalah, baik keterlambatan laporan maupun ormas yang tidak menyerahkan laporannya. Pada tahun 2015, dari realisasi 102 ormas yang mendapatkan dana hibah, 46 ormas (45,10%) tidak menyerahkan laporan pertanggungjawabannya. Sanksi yang diterapkan akan hal ini adalah mereka terancam tidak akan mendapat kesempatan memperoleh dana hibah pada tahun berikutnya. Beberapa kejadian tersebut dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini:

“Sering mengalami keterlambatan dalam pelaporan dan masih ada Laporan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan proposal yang diajukan” (Wawancara staf Kesejahteraan Rakyat, 22 Mei 2016)

Pengakuan di atas menunjukkan bahwa masih ada para penerima bantuan yang terlambat menyerahkan laporan dan sering pula membuat mereka tidak mendapatkan dana hibah pada tahun berikutnya. Ada juga laporan pertanggungjawaban yang masih belum sesuai dengan proposal yang diajukan. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran dari penerima hibah. Terkait kurangnya kesadaran sesuai dengan hasil wawancara berikut:

“Kurangnya kesadaran dari Penerima Hibah untuk menyerahkan laporannya tepat waktu membuat kami kesulitan” (Wawancara kepala Sub-bagian Kesejahteraan masyarakat, 23 Mei 2016).

Masalah keterlambatan dan ketidaksesuaian penggunaan anggaran, secara terus terang juga diakui oleh ormas yang bersangkutan. Berikut adalah pengakuan ormas terkait laporan pertanggungjawabannya:

“Sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta realisasi anggaran yang tercantum dalam Proposal realisasi, walaupun ada yang tidak sesuai peruntukannya kami akan melaporkan” (Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Dayak Belusu, 22 Mei 2016)

“Untuk Pertanggungjawaban laporan sudah kami setorkan tapi kadang kami terlambat karena keterbatasan kami mengolah dokumentasi dan pembiayaan” (Wawancara dengan Ketua FKUB, 22 Mei 2016)

Pelaporan dan pertanggungjawaban selalu menjadi persoalan yang sulit bagi sebagian ormas yang ada. Hal ini diantaranya masih rendahnya SDM yang mengelola ormas. Sehingga kemampuan administrasi pertanggungjawaban sering tidak tergarap. Bimbingan dan konsultasi juga dibuka oleh

bagian kesra Setda Kabupaten Tana Tidung, namun tidak banyak yang memanfaatkannya. Sementara itu untuk melakukan pendampingan lebih jauh, pihak Kesra terhambat jumlah SDM yang kurang. Kemudian dari pihak SDPD yang membidangi ormas juga belum ada yang bergerak melakukan pendampingan pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan.

Sebenarnya pihak inspektorat sudah berulang kali memberikan masukan atas pelaksanaan program hibah ini, terutama untuk masalah pelaporan pertanggungjawaban. Hal ini disampaikan oleh hasil wawancara dengan bapak Budiman sebagai berikut:

“ Pelaporan dan pertanggungjawaban adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh ormas yang dapat bantuan. Bagaimana bisa ada pengeluaran anggaran namun tidak ada laporannya. Hal ini bisa menjadi prasangka bahwa ada yang memanfaatkan, merekayasa, atau melakukan penyimpangan dana, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Atau sangat dimungkinkan dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kami menekan pihak Kesra ini untuk mengusahakan bahwa kelompok yang mendapat bantuan harus menyerahkan pelaporan. Dan kami lihat sekarang, ada model pemberian bantuan setelah pelaporan masuk, meskipun mereka harus hutang dulu untuk melaksanakan kegiatan.” (Wawancara Bapak Budiman (Inspektorat), tanggal 15 September 2016).

Berdasarkan wawancara di atas, pihak Inspektorat selalu menekankan adanya laporan pertanggungjawaban sebagai hal yang wajib ada, meskipun dalam kenyataannya masih sangat sulit terpenuhi. Pihak Inspektorat selaku pengawas internal memberikan penekanan kepada bagian Kesra untuk memaksa para organisasi sosial untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban kegiatan.

Tekanan ini membuat bagian Kesra melaksanakan berbagai kebijakan yang dirasa dapat memaksa, misalnya organisasi yang belum memberikan laporan pertanggungjawaban tidak akan diikutkan pada pengajuan tahun berikutnya. Bahkan kebijakan terbaru yang akan diuji coba adalah dana akan dicairkan setelah kegiatan terlaksanakan, jika tidak ada laporan pertanggungjawaban maka dana tidak akan turun. Bagi lembaga yang tidak punya uang, biasanya mereka akan berhutang dahulu untuk melaksanakan kegiatan. Semua dilakukan untuk memenuhi laporan pertanggung-jawaban, sebab jangan sampai ada anggaran keluar, tetapi tidak ada laporan penggunaannya. Hal itu akan menjadi beban untuk instansi yang akan mempertanggungjawabkannya, yaitu Setda Tana Tidung.

**d. Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah di Kabupaten Tana Tidung.**

SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kaidah tersebut masih belum terlaksana, karena SKPD tidak ada yang melakukan pengawasan atau monitoring, sehingga pengawasan atau monitoring dan evaluasi praktis hanya dilakukan oleh bagian kesra Setda kabupaten Tana Tidung. Hal itupun jarang dilakukan karena terbatasnya

jumlah SDM yang ada. Untuk itu kerjasama dengan BPK merupakan alternative yang dilakukan. Mengenai sanksi, biasanya ada teguran yang disampaikan kepada ormas yang bersangkutan. Jika tidak menyampaikan laporan, sanksi untuk tidak memberikan lagi dana hibah tahun berikutnya diterapkan. Terkait monitoring ini, berikut hasil wawancaranya:

“Monitoring dan evaluasi jarang dilakukan oleh bagian kesra mengingat sdm nya maupun sarana operasional.Kerjasama dengan BPK terkait monitoring dan evaluasi terutama peninjauan ke lokasi sekretariat ormas mampu meningkatkan fungsi organisasi masyarakat” (Wawancara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, 25 Mei 2016).

“Jarang, namun kita bekerja sama dengan BPK supaya ikut mengawasi dari sisi keuangannya atau administrasinya” (Wawancara dengan bendahara dana hibah dan bansos, 23 Mei 2016)

Berdasarkan dari hasil evaluasi yang dilakukan bagian kesra Setda Tana Tidung terhadap pelaksanaan penyaluran dana hibah di kabupaten Tana Tidung, terdapat beberapa kendala yang hampir berulang setiap tahunnya. Berdasarkan wawancara dengan staf bagian kesra Setda Kabupaten Tana Tidung kendala tersebut adalah keterlambatan penyampaian proposal, keterlambatan pencairan dana serta keterlambatan penyampaian laporan pertanggung- jawaban ormas tau bahkan tidak menyampaikan pelaporan. Berikut hasil wawancaranya:

“Kendala yang ditemui antara lain:Terlambatnya Proposal yang diajukan oleh Pemohon/Ormas sehingga antara Proposal dan Realisasi berlangsung di Tahun berjalan hal tersebut bertentangan dengan Peraturan yang ada.Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah sering kali mengalami keterlambatan sehingga mengganggu Proses realisasi selanjutnya, artinya kadang waktu perencanaan realisasi sangat mepet.Mekanisme yang masih panjang dalam tahapan pemberian dana Hibah sering kali menjadi penghambat lamanya proses pencairan”(Wawancara staf Kesejahteraan Rakyat, 22 Mei 2016)

Kendala ini setelah dikonfirmasi kepada salah satu ormas tidak lain dikarenakan keterbatasan mengelola administrasi dana hibah. Meskipun demikian mereka telah melaksanakan konsultasi dan meminta bimbingan pada pihak Kesra. Berikut adalah keterangan yang diperoleh dari ormas FKUB:

“Kendalanya hanya kemampuan kami terbatas dalam mengelola administrasi untuk itu kami sering berkonsultasi ke Bagian Kesra” (Wawancara dengan Ketua FKUB, 22 Mei 2016)

Terkait dengan kendala tersebut, maka pihak kesra terbuka untuk melakukan koordinasi dan konsultasi bagi ormas yang mengalami kesulitan atau ormas manapun yang datang ke kantor kesra. Berikut keterangan dari kepala subagian kesejahteraan masyarakat:

“Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik kendala-kendala seperti telatnya pelaporan pertanggungjawaban dapat diselesaikan dengan baik, walaupun ada kendalanya yang menyangkut kesadaran untuk bertanggungjawab”(Wawancara kepala Sub-bagian Kesejahteraan masyarakat, 23 Mei 2016).

Kesadaran dan kemauan untuk bertanggungjawab adalah hal yang perlu ditanamkan kepada ormas-ormas yang mendapatkan dana hibah. Kesadaran ini penting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, akuntabilitas dan keberlanjutan program. Bagi ormas yang tidak bisa memenuhi pertanggungjawaban, maka dana hibah akan terhenti dan keberlanjutan program juga akan terhenti.

Evaluasi dan pengawasan juga dilakukan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Tana Tidung sebagai badan yang mempunyai fungsi pengawasan internal terhadap semua instansi pemerintahan daerah. Dalam kasus hibah kepada ormas, salah seorang anggota inspektorat yang

bertugas di Setda, khususnya yang melakukan pengawasan terhadap proses pemberian dana hibah di Kabupaten Tana Tidung menyatakan penilaiannya secara umum:

“Kami selaku pihak inspektorat yang mempunyai tugas pengawasan secara internal melihat proses pemberian hibah ini secara umum masih jauh dari kata sempurna. Banyak persoalan yang masih belum terselesaikan, mulai dari proses pengajuan hibah sampai pelaporan dan pertanggungjawaban” (Wawancara Bapak Budiman (Inspektorat), tanggal 15 September 2016).

Hasil evaluasi yang dilakukan pihak inspektorat secara umum menyatakan bahwa proses pemberian dana hibah terhadap organisasi sosial yang ada masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kendala yang perlu dibenahi dari semua proses. Mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan dan pengawasan itu sendiri.

#### **B. Hasil Penelitian Efektivitas Hibah Daerah kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten Tana Tidung**

Konsep efektivitas organisasi pada dasarnya memiliki arti yang luas yang tidak hanya difokuskan pada tujuan akhirnya saja tetapi juga dapat difokuskan melalui cara yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan akhir. Efektivitas dalam organisasi merupakan konsep yang berkaitan dengan efisiensi dan saling melengkapi. Sehingga untuk menilai efektivitas sebuah program seperti pemberian dana hibah kepada ormas di Kabupaten Tana Tidung tidak hanya dilihat dari 1 pendekatan saja, yaitu apakah tujuan telah tercapai. Namun ada

beberapa pendekatan yang digunakan untuk menilai atau mengukur efektifitas program yang sedang berjalan.

Robbins (1994:54) mengungkapkan mengenai pendekatan dalam pengukuran efektivitas organisasi dalam menjalankan program. Pendekatan dibedakan dalam 4 pendekatan, yaitu Pendekatan Pencapaian Tujuan (*goal attainment approach*), Pendekatan Sistem (*system approach*), Pendekatan Konstituens-Strategis (*strategic-constituencies approach*) dan Pendekatan Nilai-nilai Bersaing (*competing-values approach*).

#### **1. Pendekatan Pencapaian Tujuan (*goal attainment approach*)**

Pendekatan pencapaian tujuan ini biasa digunakan untuk melihat efektivitas karena tujuan merupakan pengukuran yang paling rasional dan paling mudah untuk dilihat. Pendekatan pencapaian tujuan mengasumsi bahwa organisasi adalah kesatuan yang dibuat dengan sengaja, rasional, dan mencari tujuan, sehingga akhirnya kemajuan ke arah tujuan-tujuan tersebut harus dapat diukur.

Pendekatan pencapaian tujuan dari pemberian hibah organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat dari tujuan apa yang telah ditetapkan, tujuan tersebut dimengerti oleh pihak pemerintah maupun ormas yang mendapat dana, kemudian yang penting juga tujuan tersebut disepakati bersama untuk diwujudkan. Dan terakhir apakah tujuan tersebut sudah tercapai. Tujuan pemberian hibah kepada ormas didefinisikan beragam oleh para pelaksana di Bagian Kesra Setda Tana Tidung. Beberapa tujuan dari pemberian dana hibah tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara beberapa orang berikut ini:

“Tujuannya adalah menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat”(Wawancara staf Kesejahteraan Rakyat, 22 Mei 2016)

“Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan ormas dalam pembangunan Daerah kita ini”(Wawancara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, 25 Mei 2016).

“Agar masyarakat dapat diberdayakan melalui Ormas-ormas yang ada, artinya fungsi Ormas sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat”(Wawancara kepala Sub-bagian Kesejahteraan masyarakat, 23 Mei 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan secara umum pemberian dana hibah kepada ormas di kabupaten Tana Tidung adalah untuk memberdayakan ormas-ormas yang ada dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat sesuai bidangnya dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat. Pemberian hibah ini juga bertujuan untuk mendukung pembangunan sosial kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Tana Tidung. Tujuan jangka panjang adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan-kegiatan yang positif seperti kebudayaan dan kerukunan umat beragama, serta kegiatan pemuda dan olah raga. Sedangkan secara khusus tujuan tersebut tertuliskan pada AD/ART ormas dan pada proposal pengajuan yang diserahkan ke pemerintah daerah.

Indikasi terhadap pencapaian tujuan juga dapat dilihat dari tingkat pemahaman ormas terhadap tujuan yang mereka tuliskan dalam proposal. Setelah mengerti, tujuan tersebut disepakati untuk diwujudkan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan oleh ormas. Terkait dengan hal ini, maka hasil

wawancara berikut ini memberikan gambaran terkait pemahaman dan kesepakatan terhadap tujuan.

“Mereka sangat sepakat secara tertulis maupun lisan. Hampir semua Ormas memahami dan mengerti tujuan hibah, sebab dari dana hibah ini manfaatnya untuk kepentingan masyarakat juga”(Wawancara kepala Sub-bagian Kesejahteraan masyarakat, 23 Mei 2016).

“Sangat disetujui kan tujuannya baik dan bermanfaat. Iya sangat dimengerti kan sesuai tujuan mereka mengajukan proposal”(Wawancara dengan bendahara dana hibah dan bansos, 23 Mei 2016)

Penilaian dari pemerintah daerah pada umumnya ormas-ormas yang mengajukan proposal memahami dan menyepakati tujuan kegiatan yang ada dalam proposal. Hal ini terbukti dalam NPHD biasanya tercantum tujuan dari pemberian dana hibah tersebut berdasarkan pengajuan di proposal. Berdasarkan konfirmasi terhadap ormas yang menerima dana hibah didapatkan jawaban bahwa mereka paham dan mengerti tujuan pemberian dana dan menilai bahwa tujuan tersebut sudah terwujud. Meskipun ada ormas yang mengakui bahwa tujuan terwujud meskipun belum optimal. Berikut hasil wawancara dengan ormas tersebut:

“Tujuannya memudahkan kami mengadakan Kegiatan dengan dana hibah mengingat Lembaga kami ini sangat penting sebagai wadah kerukunan umat beragama di Kabupaten Tana Tidung. Saya rasa sudah terwujud. Dan tujuan tersebut telah terwujud”.(Wawancara dengan Ketua FKUB, 22 Mei 2016)

“Tujuannya menunjang kegiatan positif untuk lembaga kami yang mewadahi adat istiadat dan kebudayaan daerah. Sesuai dengan program kerja dalam AD/ART kami sudah dilaksanakan dan terwujud dan perlu adanya kerjasama yang baik antar Ormas dan pemerintah dalam pembinaan serta pemberdayaan masyarakat. Tujuan tersebut terwujud, meskipun belum optimal” (Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Dayak Belusu, 22 Mei 2016)

Berdasarkan wawancara kepada ormas FKUB dan Lembaga Adat Dayak Belusu di atas. Tujuan dari pemberian dana hibah tersebut adalah untuk menunjang kegiatan yang terkait dengan program kerja dan visi misi dari masing-masing organisasi kemasyarakatan. Untuk FKUB lebih kepada kegiatan-kegiatan lintas agama yang dimaksudkan untuk menjaga kerukunan umat beragama baik melalui pertemuan tokoh agama juga kegiatan-kegiatan yang lain. Sementara untuk lembaga adat suku Dayak kegiatan dimaksudkan untuk memupuk dan menjaga adat istiadat dan kebudayaan Dayak agar selalu lestari dan dikenal oleh generasi penerus. Penilaian ini sejalan dengan penilaian dari Kesra yang menangani hibah kepada ormas, bahwa secara umum tujuan-tujuan yang ada dalam kesepakatan, yang tercantum dalam proposal serta yang tercantum dalam MoU (NPHD) telah terwujud atau tercapai. Meskipun demikian masih ada hal-hal yang perlu dibenahi atau disempurnakan dalam pelaksanaannya karena belum semua ormas mampu berjalan dengan baik. Berikut hasil wawancaranya:

“Sudah walaupun secara kualitas belum tercapai, artinya masih ada hal-hal yang perlu pembenahan”(Wawancara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, 25 Mei 2016)

Kondisi kelembagaan ormas-ormas yang ada tidak sama kualitasnya, sehingga ada yang berjalan dengan baik, tetapi ada yang belum. Namun yang terpenting sebenarnya kemauan mereka untuk belajar dan berubah menjadi yang lebih baik.

“Belum sepenuhnya terwujud karena belum semua Ormas berjalan dengan baik”(Wawancara staf Kesejahteraan Rakyat, 22 Mei 2016)

Tujuan secara umum sudah tercapai, meskipun baru tujuan jangka pendek. Tujuan berdasarkan agar masyarakat berpartisipasi sudah tercapai, tujuan adanya kegiatan positif sudah tercapai, namun dalam pelaksanaannya masih perlu pembenahan baik dalam hal teknis maupun administratif. Robbins (1994: 54) memunculkan asumsi-asumsi keberhasilan pencapaian tujuan melalui empat asumsi. Pertama, organisasi harus mempunyai tujuan akhir. Kedua, tujuan-tujuan tersebut harus diidentifikasi dan ditetapkan dengan baik agar dapat di mengerti. Ketiga, tujuan-tujuan tersebut harus sedikit saja agar mudah dikelola. Keempat, harus ada konsensus atau kesepakatan umum mengenai tujuan-tujuan tersebut. Akhirnya, kemajuan ke arah tujuan-tujuan tersebut harus dapat diukur.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan pendekatan pencapaian tujuan, program hibah kepada ormas sudah tercapai tujuannya, meskipun belum secara keseluruhan dan secara kualitas masih rendah. Pencapaian tujuan yang dimaksud adalah program hibah kepada ormas mampu memberdayakan ormas-ormas yang ada dan berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat sesuai bidangnya dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat. Beberapa kegiatan ormas juga mampu berguna bagi pembangunan seperti kerukunan antar umat beragama dan masyarakat semakin mencintai tradisi dan budayanya.

## **2. Pendekatan Sistem (*system approach*)**

Pendekatan sistem terhadap efektivitas program yang dijalankan oleh organisasi mengimplikasikan bahwa organisasi terdiri dari sub-sub bagian yang saling berhubungan. Jika salah satu sub bagian ini mempunyai performa

yang buruk, maka akan timbul dampak yang negatif terhadap performa keseluruhan sistem. Keefektifan membutuhkan kesadaran dan interaksi yang berhasil dengan konstituensi lingkungan.

Konteks pemberian dana hibah, maka sistem bisa dilihat pemerintah daerah yang terdiri dari SKPD-SKPD yang ada yang merupakan sub bagian dari pemerintah kabupaten Tana Tidung. Namun secara internal bisa juga berarti bahwa system organisasi yang ada adalah bagian-bagian yang ada pada Setda Kabupaten Tana Tidung. Namun karena dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 tahun 2011 bahwa penyaluran dana Hibah harus melibatkan SKPD yang ada serta inspektorat, maka sistem di sini lebih dipahami secara luar yaitu dalam konteks pemerintahan daerah kabupaten, meskipun sampai saat ini yang bekerja intensif adalah hanya bagian kesra. Berdasarkan hasil wawancara, bagian-bagian yang seharusnya terlibat dalam penyaluran dana hibah ini adalah sebagai berikut:

“Yang terlibat diantaranya Dinas Pendidikan, Kantor agama, Kesbang Linmas, Bagian Hukum dan organisasi, Bagian Keuangan dan Inspektorat” (Wawancara kepala Sub-bagian Kesejahteraan masyarakat, 23 Mei 2016).

Berdasarkan konteks Kabupaten, Hibah seharusnya melibatkan SKPD-SKPD yang membidangi bidang sesuai dengan hibahnya, seperti Dinas pendidikan akan melakukan verifikasi hibah terkait dengan pendidikan, Kantor Agama mendampingi kegiatan ormas dalam bidang Agama. Namun pelaksanaannya selama ini masih terkonsentrasi pada bagian kesra Sekda Tana Tidung. Bagian yang terlibat di sekda Tana Tidung adalah seperti pada wawancara berikut:

“Bagian Kesejahteraan Rakyat, bagian hukum setda kab. Tana Tidung, Bagian Keuangan Setda Kab. Tana Tidung serta instansi terkait”(Wawancara staf Kesejahteraan Rakyat, 22 Mei 2016)

Kondisi ideal yang diharapkan adalah jika semua SKPD berperan, terutama dalam verifikasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana hibah. Kesra secara administrasi mencatat semuanya dan melakukan penyusunan penetapan penerima hibah dan perjanjian hibah. Berikut wawancaranya:

“Seharusnya untuk administrasi terutama penyusunan penetapan penerima hibah dan perjanjian Hibah dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dan untuk Verifikasi kelayakan berkas penerima Hibah, Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Instansi Teknis/Dinas terkait sedangkan pelaporan diterima oleh Bagian Keuangan Setda Kab. Tana Tidung”(Wawancara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, 25 Mei 2016).

Seharusnya bagian dan SKPD yang terlibat dalam pemberian dana hibah banyak, namun dalam kenyataannya peran masing-masing belum berfungsi dengan baik. Seharusnya untuk administrasi penerima hibah dan perjanjian Hibah dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dan untuk Verifikasi kelayakan berkas penerima Hibah, Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Instansi Teknis/Dinas terkait sedangkan pelaporan diterima oleh Bagian Keuangan Setda Kab. Tana Tidung. Koordinasi antar bagian dan antar SKPD belum berjalan dengan baik. Hal ini seperti yang disampaikan oleh pelaksana berikut ini:

“Belum semua bagian menjalankan fungsinya masing-masing. Belum terkoordinasi dengan baik” (Wawancara kepala Sub-bagian Kesejahteraan masyarakat, 23 Mei 2016).

“Belum, karena masih banyak dinas terkait yang tidak mau terlibat dalam program hibah ini pada sudah diinformasikan tupoksinya” (Wawancara staf Kesejahteraan Rakyat, 22 Mei 2016)

“Ada khususnya masalah koordinasi yang tidak berjalan dengan baik, dikarenakan minimnya pemahaman dinas terkait tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan Dana Hibah serta kurangnya Koordinasi. Kurangnya pengetahuan Ormas dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban yang baik dan benar kemungkinan minimnya SDM” (Wawancara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, 25 Mei 2016).

Berdasarkan uraian di atas memperlihatkan sistem belum mampu berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Para pelaksana belum mampu melaksanakan sesuai fungsinya masing-masing, koordinasi dalam tataran pelaksanaan belum berjalan dengan baik. Hal ini mengakibatkan ormas kurang mendapatkan pendampingan secara teknis dan administratif. Menurut Robins (1994: 54) kondisi seperti ini dalam pendekatan sistem belum mampu dianggap sistem dapat berjalan efektif. Pendekatan sistem terhadap efektivitas organisasi mengimplikasikan bahwa organisasi terdiri dari sub-sub bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama, saling mendukung dan saling melengkapi. Jika salah satu sub bagian ini mempunyai performa yang buruk, maka akan timbul dampak yang negatif terhadap performa keseluruhan sistem.

Berdasarkan asumsi efektifitas pendekatan sistem, maka pelaksanaan pemberian hibah seperti ini dalam pelaksanaannya dapat dikatakan belum efektif. Ketidakefektifan tersebut terlihat jelas bahwa adanya peran dan fungsi yang tidak terlaksana oleh sebagian instansi sehingga fungsi yang harus ada di dalam pelaksanaan program seperti monitoring dan evaluasi

tidak terlaksana. Kondisi ini menyebabkan sistem tidak berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang ada dalam peraturan. Implikasi yang ditimbulkan adalah pelaksanaan tidak berjalan dengan baik dan bagi ormas tidak mendapatkan pelayanan dengan sebagaimana mestinya, sehingga kemajuan kegiatan hibah jadi terhambat.

### 3. Pendekatan Konstituens-Strategis (*strategic- constituencies approach*)

Pendekatan konstituensi strategis memandang organisasi secara berbeda. Organisasi diasumsikan sebagai arena politik tempat kelompok-kelompok yang berkepentingan (*vested interests*) bersaing untuk mengendalikan sumber daya. Dalam konteks ini, keefektifan organisasi menjadi sebuah penilaian tentang sejauh mana keberhasilan sebuah organisasi dalam memenuhi tuntutan konstituensi kritisnya yaitu pihak-pihak yang menjadi tempat bergantung organisasi tersebut untuk kelangsungan hidupnya di masa depan.

Dalam konteks program dana hibah yang ada di Kabupaten Tana Tidung, pendekatan konstituen strategi adalah seberapa banyak ormas yang tertarik dengan pemberian dana hibah tersebut serta bagaimana mereka memperebutkannya, bagaimana hubungannya dengan pemberi dana, sejauh mana pemberian dana ini bisa mengikat konstituen (ormas) serta bagaimana dana hibah tersebut mampu memberikan kepuasan konstituen.

Dari segi jumlah ormas yang mengajukan permohonan bantuan dana, maka terlihat antusiasme ormas untuk mendapatkan dana hibah tersebut. Pada tahun 2015 setelah APBD-P daftar ormas yang telah terseleksi proposalnya adalah 126 ormas, meskipun hanya terealisasi 102 ormas. Hal ini berarti partisipasi

dari konstituen (ormas) sangat tinggi untuk dapat mengakses dana hibah tersebut. Perebutan dilakukan berdasarkan verifikasi dari TAPD yang kemudian hasilnya ditetapkan oleh kepala daerah. Strategi untuk mendapatkan dana hibah tersebut ada pada persaingan memenuhi persyaratan ormas, persyaratan program serta ketertiban dari ormas tersebut.

Hal lain yang menjadi indikasi adalah hubungan yang terjalin antara konstituen (ormas) dengan pihak pemberi bantuan yang dalam hal ini bagian Kesra Setda Tana Tidung. Terkait dengan hubungan ini, umumnya telah terjalin dengan baik hanya masalah teknis komunikasi yang menghalangi koordinasi yaitu jarak yang jauh dipedalaman. Berikut keterangan dari Kepala Bagian Kesra:

“Hubungan kami dengan Ormas cukup baik namun untuk beberapa diwilayah pedalaman kami agak kesulitan dalam berkoordinasi mengingat sulitnya jaringan telekomunikasi” (Wawancara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, 25 Mei 2016).

Sejauh mana bantuan dana hibah dapat mengikat konstituen (ormas) adalah sejauh mana dana hibah mampu membantu atas pelaksanaan program kerja ormas dan kegiatan ormas. Terkait dengan hal tersebut, pengakuan ormas ini dapat menjadi acuan:

“Dengan bantuan tersebut sangatlah membantu kami dalam melaksanakan kegiatan Ormas sesuai dengan Program Kerja. Sangat puas karena sudah dibantu dengan Hibah”(Wawancara dengan Ketua FKUB, 22 Mei 2016)

“Dengan bantuan tersebut sangatlah membantu kami dalam melaksanakan kegiatan Ormas sesuai dengan Program Kerja. Kami sebagai ormas/lembaga cukup terbantu namun perlu ditingkatkan lagi jumlah alokasi anggarannya mengingat banyaknya program kami yang belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan bantuan”(Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Dayak Belusu, 22 Mei 2016)

Keberadaan dana hibah yang diberikan memang sangat membantu pelaksanaan program kerja dan kegiatan dari ormas-ormas yang ada. Karena sifatnya hibah, maka ada ormas yang merasa dana tersebut masih kurang karena belum bisa mengcover semua kegiatan. Memang secara financial, adanya dana hibah ini hanya sifatnya membantu, namun di luar itu ormas diharapkan tidak tergantung pada hibah. Hibah sifatnya hanya dana stimulus untuk merangsang kegiatan ormas yang lebih luas. Pemerintah daerah juga pada dasarnya tidak wajib memberikan dana hibah, hanya sifatnya dana pendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Di samping itu asas manfaat dan rasionalitas harus dikedepankan. Hal tersebut terungkap dari hasil wawancara berikut ini:

“Pemberian Dana Hibah kepada Ormas tidak diwajibkan pemerintah untuk memberikannya akan tetapi sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran yang ada”(Wawancara kepala Sub-bagian Kesejahteraan masyarakat, 23 Mei 2016).

“Tim TAPD melakukan verifikasi anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah sehingga ormas mendapatkan dana hibah yang berprinsip pada asas manfaat dan rasionalitas”(Wawancara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, 25 Mei 2016).

Pemberian hibah memang berlaku sesuai kemampuan keuangan daerah, namun hal ini juga diharapkan mampu memenuhi tuntutan ormas yang ada sebagai konstituennya. Oleh karena itu, melalui mekanisme yang baik dan benar, ormas yang memenuhi persyaratan dan berprestasi layak mendapatkan dana hibah tersebut. Pelaksanaan selama ini, pemberian dana hibah masih mampu memenuhi tuntutan ormas-ormas yang ada melalui mekanisme yang telah diatur dan disepakati.

Pendekatan ini dikatakan Robins (1994:54) organisasi diasumsikan sebagai arena politik tempat kelompok-kelompok yang berkepentingan (*vested interests*) bersaing untuk mengendalikan sumber daya. Dalam konteks ini, keefektifan organisasi menjadi sebuah penilaian tentang sejauh mana keberhasilan sebuah organisasi dalam memenuhi tuntutan konstituensi kritisnya yaitu pihak-pihak yang menjadi tempat bergantung organisasi tersebut untuk kelangsungan hidupnya di masa depan. Berdasarkan pendekatan konstituens strategi pemberian dana hibah kepada ormas mampu membuat ormas berpartisipasi untuk mengajukan atau mengakses dana hibah tersebut. Hubungan antara ormas yang ada dengan bagian Kesra terjalin baik dan terjadi proses interaksi yang dinamis. Bantuan hibah dapat mengikat karena dana tersebut menjadi penggerak kegiatan ormas-ormas yang ada. Bantuan tersebut dirasa sangat bermanfaat untuk melaksanakan program kerja ormas.

#### **4. Pendekatan Nilai-nilai Bersaing (*competing-values approach*)**

Pendekatan nilai-nilai bersaing mengatakan bahwa ada elemen umum yang mendasari setiap daftar kriteria Efektifitas Organisasi yang komprehensif dan bahwa elemen tersebut dapat dikombinasikan sedemikian rupa sehingga menciptakan kumpulan dasar mengenai nilai-nilai bersaing. Masing-masing kumpulan tersebut lalu membentuk sebuah model keefektifan yang unik. Pendekatan ini secara sederhana dapat dipahami bahwa Nilai-nilai bersaing secara nyata dapat memacu pada perkembangan ke arah situasi yang lebih baik dan adanya proses pembelajaran yang didapat dari suatu program.

Dalam konteks pemberian dan hibah kepada ormas oleh pemerintah daerah Tana Tidung, maka nilai bersaing yang memungkinkan terjadi secara unik adalah adanya perkembangan kearah yang lebih baik akibat adanya proses pembelajaran baik dari kesalahan atau dari perubahan system yang ada. Terkait dengan pembelajaran yang terjadi, berikut kutipan wawancara dari para pelaksana:

“Sangat banyak pembelajaran yang kami dapat dari kegiatan Ormas tersebut sebab kami melihat masyarakat dapat merasakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormas”(Wawancara kepala Sub-bagian Kesejahteraan masyarakat, 23 Mei 2016).

“Jelas ada, komunikasi dan koordinasi yang berlangsung secara terus menerus memperbaiki kesalahan dan ketidak sesuaian dapat mengalami perkembangan ke arah yang lebih positif”(Wawancara kepala Sub-bagian Kesejahteraan masyarakat, 23 Mei 2016).

Berdasarkan wawancara di atas, maka unsur pembelajaran dari pemberian dana hibah tersebut adalah diantaranya terus-menerus memperbaiki kesalahan untuk menuju ke arah yang lebih baik, terkait dengan tujuan unsur pembelajarannya adalah adanya manfaat yang dirasakan masyarakat melalui kegiatan ormas. Adanya unsur pembelajaran tentu saja akan mengarahkan ke arah yang lebih baik, ada proses yang terjadi menuju arah yang lebih baik atau lebih benar. Lebih baik dalam melaksanakan kegiatan baik secara kuantitatif maupun kualitas, lebih baik tentang pelaporan dan pertanggungjawaban. Perkembangan ke arah yang lebih baik tersebut disampaikan dalam wawancara berikut ini:

“Sudah tentu ada apalagi dari BPK selalu mengoreksi dan menegur jika ada ketidak sesuaian antara realisasi dan Peraturan”(Wawancara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, 25 Mei 2016).

“Perkembangan kearah lebih baik tentu ada semenjak program pemberian hibah ini dilaksanakan telah beberapa kali terjadi

pembenahan-pembenahan terutama Peraturan-peraturan yang jadi acuan mengalami Perubahan”(Wawancara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, 25 Mei 2016).

Pembelajaran dan perkembangan ke arah yang lebih baik bukan hanya terjadi pada pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah bagian Kesra Setda Tana Tidung, namun yang lebih penting adalah bagi ormas-ormas yang mendapatkan dana hibah mampu mendapatkan unsur pembelajaran positif dan mampu berkembang lebih baik. Terkait hal tersebut, tanggapan ormas dapat dilihat pada hasil wawancara berikut:

“Ada unsur pembelajaran terutama tanggungjawab mengelola uang Negara. Tentu ada perkembangan ke arah yang lebih baik kalau sebaliknya berarti gagal pemberian dana hibah ini, memang saya lihat setiap tahun anggaran Hibah kepada kami mulai menurun namun kami maklumi karena mungkin dana tersebut untuk pembangunan yang lainnya”(Wawancara dengan Ketua FKUB, 22 Mei 2016)

“Pembelajaran lebih kepada masyarakat melalui program kegiatan seperti pelatihan kerajinan tangan, seni ukir, festival seni tari. Dengan pelaksanaannya bantuan dana hibah ini tentu memberi hal yang positif dalam perkembangan yang lebih baik dari sebelumnya yang mana dari budaya baik kesenian telah tertata dan berkembang melalui pembinaan”(Wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Dayak Belusu, 22 Mei 2016).

Pemberian dana hibah baik secara langsung maupun secara tidak langsung memberikan manfaat yang positif terhadap masyarakat dan termasuk ormas yang memfasilitasi kegiatan tersebut. Hal itulah yang disebut sebagai nilai tambah, yaitu sebuah nilai positif yang berkembang pada organisasi, ormas dan masyarakat. Menurut Robins (1994:54) pendekatan nilai tambah mengasumsikan bahwa berbagai macam pilihan tersebut dapat dikonsolidasikan dan diorganisasi. Pendekatan nilai-nilai bersaing

mengatakan bahwa ada elemen umum yang mendasari setiap daftar kriteria Efektivitas Organisasi yang komprehensif dan bahwa elemen tersebut dapat dikombinasikan sedemikian rupa sehingga menciptakan kumpulan dasar mengenai nilai-nilai bersaing. Masing-masing kumpulan tersebut lalu membentuk sebuah model keefektifan yang unik

Masing-masing ormas mampu menyerap unsur pembelajaran dan menganggap adanya perkembangan yang lebih baik dalam hal pengelolaan dana hibah. Hal tersebut menjadi modal untuk masa depan sebuah ormas dalam ikut berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Secara pendekatan nilai-nilai bersaing, hal ini tercapai cukup efektif. Dimana nilai unik yang berkembang dalam proses tersebut adalah nilai-nilai pembelajaran dan nilai berkembang ke arah yang lebih baik.

### C. Pembahasan

Ruang lingkup Pengelolaan Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan meliputi 4 langkah, yaitu: penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah. Pengelolaan dana hibah yang terjadi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Tana Tidung juga melewati langkah-langkah tersebut dan dilaksanakan dengan berpedoman pada Permendagri No. 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung No. 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Dalam

pelaksanaannya ada berbagai macam kendala yang muncul pada setiap tahapannya.

Pada tahap penganggaran atau perencanaan, kendala yang ditemui adalah kekacauan sering terjadi karena ormas mengajukan proposal pada tahun berjalan, tidak pada tahun sebelumnya. Menurut peraturan seharusnya permohonan proposal dilakukan pada tahun sebelumnya. Guna menyelesaikan masalah ini bagi beberapa proposal yang memenuhi kriteria akhirnya diakomodasi pada perubahan anggaran (APBD-P).

Pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan, banyak pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana di proposal, termasuk pengajuan dan penggunaan untuk operasional kantor, bukan untuk kegiatan dan umumnya hal ini tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban. Artinya ada pelaksanaan yang tidak sesuai dengan pertanggungjawabannya. Solusi atas masalah ini adalah memberikan peringatan dan saran kepada ormas untuk komitmen penggunaan anggaran.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung No. 20 Tahun 2013, keadaan ini tentu sangat bertentangan dengan ketentuan, terutama pada Pasal 4 dan Pasal 5. Pasal 4 mengharuskan bahwa "Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

1. memiliki kepengurusan yang jelas;
2. telah terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota setempat, paling kurang 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan daerah;
4. memiliki sekretariat dan alamat tetap dan jelas; dan

5. mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja hibah sebelumnya, akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan kegiatan sejenis yang telah dilaksanakan.

Terkait dengan penggunaan anggaran yang dilanggar adalah Pasal 5 dari Peraturan Bupati di atas, yang menyatakan bahwa “Hibah tidak dapat digunakan untuk membiayai pembelian lahan, gaji bulanan pengurus, pembayaran sewa/kontrak kantor sekretariat dan peralatan yang tidak digunakan langsung dalam kegiatan, kecuali yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.” Meskipun pada kenyataannya anggaran dipakai untuk menyewa sekretariat atau bahkan untuk gaji pengurus sering ditemui.

Pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, kendala yang terjadi adalah banyak ormas yang menyerahkan laporan pertanggungjawaban yang terlambat atau bahkan tidak menyerahkannya. Hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung No. 20 Tahun 2013, terutama Pasal 26 Ayat (3). Dalam ayat (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati Tana Tidung Cq. PPKD paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Kenyataannya banyak laporan pertanggungjawaban yang dikumpulkan pada tahun berikutnya pada pertengahan tahun atau akhir tahun.

Atas pelanggaran tersebut sanksi yang diterima ormas diatur pada Peraturan Bupati No 20 tahun 2013, Pasal 56 yang menyatakan pada ayat (1) “Penerima hibah dan bantuan sosial yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban lebih dari tiga bulan setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (3) maka

penerima bantuan tidak mendapat bantuan lagi dari Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.”; (2) Bagi penerima hibah dan bantuan sosial yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas bantuan yang diberikan tahun-tahun sebelumnya, tidak akan direalisasikan pencairannya”. (3) Dalam hal hasil audit keuangan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Beberapa ormas yang belum mampu memenuhi laporan pertanggungjawaban dan yang terbukti melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, ada temuan pelanggaran dalam audit, tahun berikutnya tidak diperbolehkan mengajukan hibah atau dana tidak dicairkan sebelum memenuhi apa yang menjadi ketentuan dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban dana tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 ada 45,10% ormas yang tidak menyerahkan laporan pertanggung-jawaban. Jalan keluar yang ditempuh adalah melakukan pendekatan penyadaran untuk bertanggungjawab dan bimbingan, serta memberikan sanksi bagi pelanggar.

Pada tahap monitoring dan evaluasi, kendalanya adalah jarang melakukan pengawasan karena SKPD yang terkait semuanya menyerahkan ke bagian Kesra, padahal SDM di Kesra sangat terbatas jumlahnya. Solusi atas hal ini kesra juga melibatkan BPK untuk membantu melakukan pengawasan terkait masalah administrasi dan keuangan. Hal ini sebenarnya menyimpang dari Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung No 20 tahun 2013, terutama terkait

dengan evaluasi dan monitoring. Pada Pasal 55, ayat (1) yang menyatakan “SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial”. Kenyataannya SDPD terkait belum mampu melaksanakannya, sehingga diserahkan pada Bagian Kesra Setda Tana Tidung dan Inspektorat Tana Tidung. Keterlibatan Inspektorat melakukan audit, evaluasi dan monitoring ini telah sesuai dengan Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2013, Pasal 55 ayat (4) bahwa Audit dapat dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tana Tidung, Aparat Pengawas Intern Pemerintah Lainnya maupun oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Selain menjadi solusi atas terbatasnya evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan hibah ormas, keterlibatan pihak Inspektorat dan BPK juga dapat memberikan penilaian audit terkait kesesuaian penggunaan anggaran dan kegiatan hibah serta kepatuhan ormas terhadap peraturan yang ada. Dokumen-dokumen hasil audit tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam pemberian bantuan hibah pada tahun-tahun berikutnya. Adapun mereka yang terbukti bersalah, akan diberi sanksi dan peringatan sesuai dengan kadar kesalahannya. Sanksi diterapkan secara bertahap ada yang berupa teguran saja, ada yang satu tahun tidak boleh mengajukan atau bahkan ada sanksi berupa masuk daftar hitam, yang artinya tidak boleh mengajukan lagi, jika mengajukan maka tidak diberi. Secara ringkas, ruang lingkup realisasi hibah pada ormas di Kabupaten Tana Tidung dapat digambarkan pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4  
Ruang Lingkup Realisasi Penyaluran Dana Hibah di Tana Tidung

No	Tahapan	Kendala	Penyelesaian
1	Penganggaran/ Perencanaan	Pengajuan proposal pada tahun berjalan, tidak pada tahun sebelumnya.	Proposal yang memenuhi kriteria akhirnya diakomodasi pada perubahan anggaran (APBD-P)
2	Pelaksanaan dan penatausahaan	Banyak pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana di proposal, termasuk pengajuan dan penggunaan untuk operasional kantor	Memberikan peringatan dan saran kepada ormas untuk komitmen penggunaan anggaran
3	Pelaporan dan pertanggung-jawaban	Banyak ormas yang menyerahkan laporan pertanggungjawaban yang terlambat atau bahkan tidak menyerahkannya	Melakukan pendekatan penyadaran untuk bertanggungjawab dan bimbingan, serta memberikan sanksi bagi pelanggar
4	Monitoring dan evaluasi	Jarang melakukan pengawasan karena SKPD yang terkait semuanya menyerahkan ke bagian Kesra, padahal SDM di Kesra sangat terbatas.	Melibatkan BPK untuk membantu melakukan pengawasan terkait masalah administrasi dan keuangan

Pada dasarnya, konsep efektivitas organisasi memiliki arti yang luas yang tidak hanya difokuskan pada tujuan akhirnya saja tetapi juga dapat

difokuskan melalui cara yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan akhir. Seperti yang dikemukakan oleh Robbins (1994:58) "Sebuah organisasi juga harus dinilai berdasarkan kemampuannya untuk memperoleh masukan, memproses masukan, menyalurkan keluarannya dan mempertahankan variabel-variabel tersebut". Maka Robbins menggunakan 4 pendekatan untuk menilai efektivitas, yaitu: Pendekatan Pencapaian Tujuan, Pendekatan system, Pendekatan Konstituens-Strategis dan Pendekatan Nilai-nilai Bersaing.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dari 4 pendekatan untuk mengukur efektivitas program pemberian dana hibah kepada organisasi kemasyarakatan di Tana Tidung, ada 3 pendekatan yang membuktikan bahwa program berjalan efektif dan ada 1 pendekatan yang terbukti tidak efektif. Pendekatan yang efektif tersebut adalah pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan konstituen-strategis dan pendekatan nilai-nilai bersaing.

Pendekatan pencapaian tujuan, program hibah kepada ormas sudah tercapai meskipun belum secara keseluruhan dan secara kualitas masih membutuhkan pembenahan. Pencapaian tujuan tersebut adakah program hibah kepada ormas mampu memberdayakan ormas-ormas yang ada untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat bersama pemerintah daerahsesuai bidangnya. Kondisi ini memenuhi asumsi dari pendekatan tujuan Robins (1994) yaitu dapat memenuhi 4 asumsi sebagai berikut: Pertama, organisasi harus mempunyai tujuan akhir. Kedua, tujuan-tujuan tersebut harus diidentifikasi dan ditetapkan dengan baik agar dapat di mengerti. Ketiga, tujuan-tujuan tersebut harus sedikit saja agar mudah

dikelola. Keempat, harus ada konsensus atau kesepakatan umum mengenai tujuan-tujuan tersebut. Akhirnya, kemajuan ke arah tujuan-tujuan tersebut harus dapat diukur. Keempat asumsi tersebut telah mampu terpenuhi, sehingga secara tuuan dapat dikatakan efektif.

Berdasarkan pendekatan konstituens strategis pemberian dana hibah kepada ormas mampu merangsang ormas berpartisipasi untuk mengajukan atau mengakses dana hibah tersebut, terjalinnya hubungan baik yang dinamis antara ormas dengan pemerintah daerah, serta bantuan hibah mampu menjadi penggerak kegiatan ormas-ormas yang ada. Bantuan tersebut dirasa sangat bermanfaat untuk melaksanakan program kerja ormas.

Pendekatan konstituensi strategis menurut Robbins (1994:54) memandang organisasi secara berbeda. Organisasi diasumsikan sebagai arena politik tempat kelompok-kelompok yang berkepentingan (*vested interests*) bersaing untuk mengendalikan sumber daya. Dalam konteks ini, keefektifan organisasi menjadi sebuah penilaian tentang sejauh mana keberhasilan sebuah organisasi dalam memenuhi tuntutan konstituensi kritisnya yaitu pihak-pihak yang menjadi tempat bergantung organisasi tersebut untuk kelangsungan hidupnya di masa depan. Dana hibah dapat menjadi tempat bergantung untuk ormas-ormas yang ada, dan organisasi harus dapat memenuhinya baik terkait dana, mekanisme dan tuntutan lainnya.

Secara pendekatan nilai-nilai bersaing, hal ini tercapai cukup efektif. Dimana nilai unik yang berkembang dalam proses tersebut adalah nilai-nilai pembelajaran dan nilai berkembang ke arah yang lebih baik terjadi pada kedua belah pihak yaitu pada bagian kesra sendiri dan pada ormas penerima

dana. Pendekatan ini sesuai dengan asumsi yang disampaikan Robbins (1994:54) bahwa pendekatan ini mengasumsikan bahwa berbagai macam pilihan tersebut dapat dikonsolidasikan dan diorganisasi. Pendekatan nilai-nilai bersaing mengatakan bahwa ada elemen umum yang mendasari setiap daftar kriteria Efektivitas Organisasi yang komprehensif dan bahwa elemen tersebut dapat dikombinasikan sedemikian rupa sehingga menciptakan kumpulan dasar mengenai nilai-nilai bersaing. Masing-masing kumpulan tersebut lalu membentuk sebuah model keefektifan yang unik. Masing-masing ormas akan berkembang karena ada nilai bersaing yang didapatkan dalam proses penerimaan hibah, sehingga para ormas akan berkembang sesuai ciri unik masing-masing.

Satu pendekatan yang tidak efektif adalah pendekatan system. Pelaksanaan koordinasi antar bagian belum terlaksana, sehingga masing-masing bagian belum melaksanakan perannya sesuai ketentuan Permendagri, maka secara system struktur organisasi dalam pelaksanaan penyaluran dana hibah ini tidak efektif. Ketidakefektifan tersebut terlihat jelas bahwa adanya peran dan fungsi yang tidak terlaksana. Pendekatan sistem terhadap Efektivitas Organisasi menurut Robbins (1994:54) harus mampu mengimplikasikan bahwa organisasi terdiri dari sub-sub bagian yang saling berhubungan. Jika salah satu sub bagian ini mempunyai performa yang buruk, maka akan timbul dampak yang negatif terhadap performa keseluruhan sistem. Dalam pelaksanaan pemberian hibah ormas, organisasi tidak dapat berjalan sebagai sebuah sistem sehingga dilihat dari pendekatan sistem, pemberian dana hibah ini tidak efektif.

Pemberian hibah kepada ormas di Kabupaten Tana Tidung jika dilihat dari Kriteria keefektifan organisasi menurut Gibson *et al.*, (1994:40-44) yang membagi efektivitas dalam tiga dimensi waktu yakni kriteria efektivitas jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Maka efektivitas pemberian bantuan hibah ini masuk pada kriteria efektivitas jangka pendek. Kriteria Efektivitas Jangka Pendek meliputi : a) Produksi yang menunjukkan kuantitas produksi; b) Kualitas mutu; c) Efisiensi; d) Keluwesan, e) Kepuasan. Meningkatnya kuantitas produksi dapat dilihat dari jumlah proposal yang masuk dalam merespon dana hibah, kualitas mutu dapat dilihat bahwa semakin tahun mutu proposal kegiatan semakin baik dan beragam. Efisiensi dapat dilihat dari proses verifikasi dan kegiatan menyeleksi proposal, sehingga didapatkan proposal yang layak didanai dengan jumlah pengajuan yang efisien, sebab jika tidak efisien akan ada rasionalisasi sampai efektif dan efisien.

Hasil penelitian ini memperkuat terhadap penelitian yang dilakukan oleh Samsudin, dkk. (2014) yang menunjukkan kinerja aparatur, kompetensi administrator, sarana dan prasarana, dan pengawasan memiliki hubungan yang signifikan terhadap efektivitas Penyaluran bantuan sosial di Kutai. Hal ini berarti bahwa kinerja aparatur, kompetensi administrator, sarana dan prasarana serta pengawasan akan mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan suatu program.

Machfiroh (2015) melakukan evaluasi tentang Efektivitas PNPM-MP di Kota Palu dengan hasil penelitian bahwa efektivitas PNPM-MP di Kota Palu berjalan Efektif pada tataran pencapaian Tujuan dan Integrasi. Hal ini berarti

bahwa program PNPM-MP di Kota Palu dikatakan efektif karena telah tercapai tujuannya dan tercapai proses integrasinya dalam masyarakat. Pencapaian tujuan merupakan pendekatan yang sama yang digunakan peneliti dengan penelitian yang sedang dilakukan dan terbukti pendekatan ini efektif.

Tampubolon (2015) yang berjudul "Efektivitas Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo sebagai Upaya Mewujudkan Budaya K3 dengan menggunakan pendekatan pencapaian tujuan dan pendekatan system. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan yang dilakukan belum efektif. Hal itu dikarenakan syarat mencapai keefektifan pendekatan pencapaian tujuan dan pendekatan system tersebut belum terpenuhi. Dalam penelitian ini syarat pendekatan system belum terpenuhi sama dengan hasil penelitian peneliti, sedangkan untuk pendekatan pencapaian tujuan berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti.

Lestari dan Murti (2015) menggunakan pendekatan yang berbeda untuk mengukur efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan yaitu menggunakan indikator kepuasan masyarakat terhadap program, ketepatan sasaran program, dan tujuan program. Hasil penelitian menunjukkan PNPM Mandiri berjalan dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat hingga mencapai suatu tujuan dan serta terjadinya suatu perubahan yang nyata. Hal ini menjadi indikator mengenai keberhasilan PNPM Mandiri tersebut adalah kepuasan masyarakat terhadap program, memiliki ketepatan sasaran program, tujuan program penanggulangan

kemiskinan dapat dikatakan berhasil. Hal yang sama adalah pendekatan pencapaian tujuan program.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan terkait pengukuran efektivitas pemberian bantuan hibah kepada organisasi masyarakat di Kabupaten Tana Tidung dengan menggunakan 4 pendekatan efektivitas Robbins (1994) dihasilkan 3 pendekatan bernilai efektif dan 1 pendekatan bernilai tidak efektif. Pendekatan yang dinilai efektif adalah pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan konstituen-strategis dan pendekatan nilai-nilai bersaing. Sedangkan pendekatan yang tidak strategis adalah pendekatan sistem. Pendekatan pencapaian tujuan dalam program pemberian hibah ormas di Kabupaten Tana Tidung dinilai efektif. Program hibah kepada ormas sudah tercapai tujuannya meskipun belum secara keseluruhan dan secara kualitas masih membutuhkan pembenahan. Tujuan yang tercapai adalah kemampuannya menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui kegiatan hibah.

Pendekatan konstituen-strategis dinilai efektif karena pemberian dana hibah kepada ormas mampu merangsang ormas berpartisipasi untuk mengajukan atau mengakses dana hibah tersebut, terjalinnya hubungan baik yang dinamis antara ormas dengan pemerintah daerah, serta bantuan hibah mampu menjadi penggerak kegiatan ormas-ormas yang ada. Kemampuan organisasi pemberi bantuan atas tuntutan konstituen (ormas)

dalam menyediakan dana hibah, memberikan pendampingan administratif serta tuntutan akan prosedur yang baik telah mampu dipenuhi.

Pendekatan nilai-nilai bersaing efektif karena adanya nilai-nilai pembelajaran dan nilai berkembang ke arah yang lebih baik terjadi pada kedua belah pihak yaitu pada bagian kesra sendiri dan pada ormas penerima dana serta pada masyarakat luas sebagai dampak kegiatan ormas. Nilai bersaing akan mengembangkan ormas-ormas sesuai *platform* masing-masing sesuai ciri khasnya.

Pendekatan yang tidak efektif adalah pendekatan sistem hal ini dikarenakan tidak adanya koordinasi antar bagian atau sub bagian dan beberapa bagian yang tidak melaksanakan perannya sesuai ketentuan Permendagri. Sistem tidak berjalan sebagai mana mestinya. Bagian-bagian sistem yang seharusnya melaksanakan fungsi dan peran masing-masing dalam melakukan ferivikasi, melakukan monitoring dan evaluasi hanya dijalankan satu bagian dan itupun tidak sesuai dengan kemampuan teknisnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat saran terutama terkait dengan pendekatan sistem yang terbukti tidak efektif disebabkan oleh organisasi yang bagian-bagiannya tidak mampu melaksanakan fungsinya masing-masing dan tidak terkoordinasi dengan baik. Maka diperlukan fasilitasi semua *stakeholders* yang terlibat untuk membicarakan hal ini. Kepala Daerah bisa menjadi pemimpin sekaligus fasilitator rapat untuk mempertemukan dan mengkoordinasikan masalah dan solusi.

Peran dan fungsi tidak berjalan dengan baik saah satunya dikarenakan oleh kurangnya SDM, maka untuk memenuhi kekurangan Sumber Daya Manusia dalam hal monitoring dan evaluasi, termasuk audit penggunaan anggaran hibah terhadap ormas, maka pelibatan Inspektorat, BPK serta Akuntan Publik yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Hal ini selain sebagai solusi, juga sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Akibat dari sistem yang tidak berjalan dengan baik maka mengakibatkan penyerapan anggaran yang tidak optimal, misal hanya 54,30 % pada hibah kelompok masyarakat. Terkait dengan hal ini, maka diperlukan adanya program bimbingan atau pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban program dana hibah. Kegiatan ini bisa dilaksanakan Bagian Kesejahteraan Rakyat atau kerjasama dengan pihak ke tiga misalnya Badan Pemeriksa Keuangan maupun Inspektorat Wilayah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Efendi, F. & Makhfudli. (2009). *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktik dalam Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Gibson, L.J, Ivancevich J.M., & Donnelly J.R. (1994). *Organization, Behavior, Structure, Process*. New York : Richard D.Irwin,Inc.
- Hasibuan, M S.P. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manuaia Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hermabin, J., Djumadi., & Idris, A. (2014). Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sendawar Kabupaten Kutai Barat. *eJournal Administrative Reform*, 2014, 2 (3): 1746-1758, ISSN 2338-7637, 1749. [http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/08/02\\_format\\_artikel\\_ejournal\\_mulai\\_hlm\\_genap%20\(1\)%20\(08-27-14-02-36-42\).pdf](http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/08/02_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_genap%20(1)%20(08-27-14-02-36-42).pdf) diakses tanggal 3 maret 2016.
- Islamy, I. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Keban, Y. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gavamedia.
- Kumrotomo, W. (2005). *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketa Pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lestari, R.P., dan Murti, I. (2015) Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) (Studi Kasus Di Desa Sedengan Mijen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal penelitian administrasi publik*. 1 (01): 195 – 201. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jpap/article/view/407/370> diakses tanggal 5 Juni 2016.
- Machfiroh, A (2015) Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Di Kota Palu. *e-Jurnal Katalogis*. 3 (2): 179-185. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/viewFile/4353/3266> diakses tanggal 6 Juni 2016.
- McMillan J.H. dan Schumacer, S. (2010). *Research In Education : Evidence Based Inquiry*. New Jersey : Pearson Education Inc.

- Moleong, J L. (2007) *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, J L. (2012) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy: Teori, Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pane, R. H., Zulkarnaini, dan Ekwarso, H. 2011. Kinerja Belanja Hibah untuk Usaha Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Kota Pekanbaru. *E-journal Universitas Riau, Vol. 2 No.4* . 80 – 99. <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JSEP/article/view/546> Diakses Tanggal 3 Juni 2016.
- Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pfiffner, J dan Presthus, R V., (1960). *Public Administration*. New York: The Ronald Press Company.
- Robbins, S. P. & Judge, T. A. (2008). *Perilaku Organisasi, Edisi Duabelas*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Robbins, S. P. (1994). *Teori Organisasi: Struktur, Desain, dan Aplikasi*. Alih bahasa : Jusuf Udaya. Jakarta: Penerbit Arcan.
- Samsudin, M., Kusuma, R., Djaya, S., (2014). *Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial di Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur*. *Journal Administrative Reform. 1 (2): 783-794. ISSN 2338-7637. [http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/01/01\\_format\\_artikel\\_ejournal\\_mulai\\_hlm\\_ganjil%20revisi%20\(01-09-14-07-58-42\).pdf](http://ar.mian.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/01/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_ganjil%20revisi%20(01-09-14-07-58-42).pdf)*. Diakses tanggal 5 Juni 2016.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Setda Tanah Tidung (2015). *Laporan Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Tidung 2015*.
- Setda Tana Tidung (2016). *Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung*. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Tidung 2016.
- Setda Provinsi Bali (2015). *Dana Hibah dan Bansos Dalam Pembangunan (Bagian 2-Habis)*. Amunisi dalam Pemilukada, Rejeki Bagi Kas Desa., Biro Humas Sekretariat daerah Propinsi Bali. <http://birohumas.baliprov.go.id/index.php/berita-detail/1405/DANA-HIBAH-DAN-BANSOS-DALAM-PEMBANGUNAN-awalBAGIAN-2minHABISakhir.-AMUNISI-DALAM-PEMILUKADAKoma-REJEKI-BAGI-KAS-DESA>. Diakses tanggal 19 Juli 2016.

- Siagian, P.S. (1996). *Analisis Serta Perumusan Kebijakanaksanaan dan Strategi Organisasi*. cet keempat. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Silalahi, U. (2005). *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Alih Bahasa : Magdalena Jamin. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Stillman II, J, Richard. (1992). *Public Administration "concepts and cases fifth edition"*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Sugiyono, (2009) *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, I.K. (2006). *Sistem Administrasi publik Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tampubolon, L.J. (2015). Efektivitas Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo sebagai Upaya Mewujudkan Budaya K3. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. 3 (3): 34 – 43. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp6e2f22236afull.pdf> diakses tanggal 6 Juni 2016.
- Tangkilisan, H.N.S. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pemikiran George Edwards*. Yogyakarta: Lukman Offset & Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.
- Triastuti, M.R. (2003). Rekonsiliasi Nilai Demokrasi Dan Birokrasi Dalam Proses Formulasi Kebijakan Publik. *Jurnal Administrasi Publik. Nomor 2 Volume 2*: 125 - 135, <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/644/628> Diakses tanggal 6 Juni 2016.
- Utomo, W. (2008). *Administrasi Publik Baru di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahab, S.A. (2004). *Analisis Kebijakanaksanaan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- West, R. & Turner, L.H. (2007) *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi (Buku 2) (Edisi 3)* Jakarta: Salemba Humanika,.
- Wibowo. (2007). *Manajemen Kinerja, Edisi Kedua*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Wursanto. (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- [www.tanatidung.go.id](http://www.tanatidung.go.id)
- Zulfikar dan Budiantara, I N., (2014) *Manajemen Riset dengan Pendekatan Komputasi Statistika*, Yogyakarta: Deepublish.

**Peraturan Perundangan**

Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan No 52 /PMK. 010 /2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pejabat yang Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) 2014

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.



**Pedoman Wawancara**  
**Pertanyaan Untuk Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tana**  
**Tidung**

**Identitas Informan :**

Nama : Uus Rusmanda, A. Ks, M. Hp

jenis Kelamin : laki-laki

Suku : Sunda

Agama : Islam

Alamat : Kecamatan Sesayap Hilir

Usia : 48 Tahun

Jabatan/Posisi : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Tana Tidung

**Pertanyaan :**

No	Pertanyaan
1	Sejak kapan Bagian Kesra Setda KTT ini melaksanakan program hibah untuk organisasi masyarakat? <i>Sejak Tahun 2009</i>
2	Bagaimana secara umum pelaksanaannya dari awal sampai sekarang? <i>Pelaksanaannya Program Hibah cukup baik sesuai mekanisme yang telah diatur sesuai aturan yang ada, kendala-kendala yang dihadapi dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku</i>
3	Bagaimana respon ormas-ormas yang ada di KTT terhadap dana hibah tersebut? <i>Cukup baik dapat dilihat dari cukup banyaknya proposal permohonan bantuan dana hibah kepada Pemerintah daerah</i>
4	Bagaimana penganggaran dana hibah untuk ormas? <i>Secara umum melalui APBD sudah berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya seringkali proposal disampaikan pada saat tahun berjalan, jadi sulit direalisasikan. Bisa pun biasanya melalui mekanisme APBD-P. Pada awal terbentuknya kabupaten ini masih bisa, namun kita sudah mulai menata bahwa pengusulan proposal harus pada tahun sebelumnya. Artinya pada tahun pembahasan anggaran</i>
5	Bagaimana pelaksanaan kegiatan yang dilakukan ormas-ormas dengan dana hibah tersebut? <i>Sepanjang sepengetahuan kami Ormas-ormas melaksanakan kegiatan yang bersumber dari dana Hibah telah sesuai dengan item kegiatan yang ada dalam proposal realisasi mereka, meskipun masih terdapat beberapa yang tidak sesuai yaitu dana dimasukkan untuk operasional, bukan kegiatan</i>
6	Bagaimana pertanggungjawabannya (pelaporan kegiatan) ormas kepada pemerintah daerah? <i>Laporan Pertanggungjawaban Ormas yang sudah menerima Dana Hibah</i>

	<i>sedikit sekali yang menyerahkan laporannya tepat waktu sehingga melewati tanggal 10 Januari Tahun berikutnya, ini kan melanggar peraturan</i>
7	<p>Bagaimana dengan monitoring dan evaluasi terhadap ormas yang menerima hibah?</p> <p><i>Monitoring dan evaluasi jarang dilakukan oleh bagian kesra mengingat sdm nya maupun sarana operasional. Kerjasama dengan bpk terkait monitoring dan evaluasi terutama peninjauan ke lokasi sekretariat ormas mampu meningkatkan fungsi organisasi masyarakat</i></p>
8	<p>Apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian hibah ormas ?</p> <p><i>Dalam pelaksanaan pemberian Hibah tidak ditemui kendala-kendala yang berarti, artinya kegiatan Ormas berjalan dengan lancar hanya permasalahan pada saat Laporan Pertanggungjawaban dari Ormas yang disampaikan kepada Bupati melalui PPKD tidak tepat waktu</i></p>
9	<p>Bagaimana upaya menyelesaikan masalah yang dilakukan?</p> <p><i>Dengan cara menyurati/menginformasikan agar segera menyerahkan Laporannya, dan apabila terlambat akan dikenakan sanksi</i></p>
10	<p>Apa harapan kedepan terkait program pemberian hibah ini?</p> <p><i>Sepanjang tujuan pemberian Hibah kepada Ormas/Lembaga Sosial bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memperkuat dukungan pada pembangunan Daerah maka Program ini layak untuk dipertahankan Yang paling penting lagi program ini harus berjalan dengan baik sesuai peraturan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apalagi Dana Hibah ini sering jadi sorotan masyarakat</i></p>
11	<p>Apa tujuan dari program pemberian hibah pada ormas?</p> <p><i>Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan ormas dalam pembangunan Daerah kita ini</i></p>
12	<p>Apakah tujuan tersebut disepakati oleh pihak-pihak terkait?</p> <p><i>Setuju sekali sesuai usulan masyarakat dan kebutuhannya</i></p>
13	<p>Apakah tujuan pemberian hibah ormas tersebut dimengerti oleh ormas?</p> <p><i>Tentu dimengerti sesuai rincian kebutuhan kegiatan mereka</i></p>
14	<p>Apakah tujuan tersebut sampai saat ini sudah terwujud?</p> <p><i>Sudah walaupun secara kualitas belum tercapai, artinya masih ada hal-hal yang perlu pembenahan</i></p>
15	<p>Bagian-bagian birokrasi mana saja yang terlibat dalam pemberian dana hibah ormas ini?</p> <p><i>Untuk administrasi terutama penyusunan penetapan penerima hibah dan perjanjian Hibah dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dan untuk Verifikasi kelayakan berkas penerima Hibah, Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Instansi Teknis/Dinas terkait sedangkan pelaporan diterima oleh Bagian Keuangan Setda Kab. Tana Tidung</i></p>
16	<p>Apakah antar bagian sudah dapat melaksanakan fungsinya masing-masing?</p> <p><i>Belum terlaksana secara baik</i></p>
17	<p>Apakah koordinasi antar bagian terlaksana dengan baik?</p> <p><i>belum</i></p>
18	<p>Apakah ada hambatan yang muncul dari bagian tertentu? jelaskan!</p>

	<p><i>Ada khususnya masalah koordinasi yang tidak berjalan dengan baik, dikarenakan minimnya pemahaman dinas terkait tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan Dana Hibah serta kurangnya Koordinasi</i></p> <p><i>Kurangnya pengetahuan Ormas dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban yang baik dan benar kemungkinan minimnya SDM</i></p>
19	<p>Sejauh mana hubungan antara bagian pemberi dana hibah (kesra/kesmas) dengan ormas yang diberi dana hibah?</p> <p><i>Hubungan kami dengan Ormas cukup baik namun untuk beberapa diwilayah pedalaman kami agak kesulitan dalam berkoordinasi mengingat sulitnya jaringan telekomunikasi</i></p>
20	<p>Sejauh mana keinginan ormas terhadap dana hibah tersebut dapat terpenuhi oleh pemda (kesra)?</p> <p><i>Tim TAPD melakukan verifikasi anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah sehingga ormas mendapatkan dana hibah yang berprinsip pada asas manfaat dan rasionalitas</i></p>
21	<p>Secara financial, apakah bantuan tersebut dapat memberikan manfaat kepada ormas?</p> <p><i>Ormas yang dibantu adalah ormas nirlaba jadi bantuan hanya bersifat membantu sesuai kemampuan keuangan daerah</i></p>
22	<p>Secara financial, apakah ormas yang menerima menyalurkan manfaat kepada masyarakat? dalam bentuk apa saja?</p> <p><i>Biasanya dalam bentuk kegiatan yang mendukung kegiatan Pemerintah misalnya PHBI mengadakan kegiatan acara hari besar Islam atau pun untuk pelestarian adat budaya Daerah dan Kesenian Daerah</i></p>
23	<p>Bagaimana kepuasan ormas dengan adanya program pemberian dana hibah ini?</p> <p><i>Cukup puas karena sebagian kegiatan Ormas menggunakan anggaran dari pihak lain atau menghutang dulu untuk melaksanakan kegiatannya sehingga cairnya Dana Hibah dapat diumpamakan sebagai pelunasan.</i></p>
24	<p>Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan ormas dengan uang hibah tersebut?</p> <p><i>Masyarakat saat ini sangat kritis sehingga apa-apa yang berhubungan dengan Hibah sangat disoroti, tapi syukurlah semua berjalan dengan baik</i></p>
25	<p>Apakah besaran dana hibah yang diberikan sesuai dengan kepuasan ormas dan masyarakat yang menerima kegiatan? jelaskan!</p> <p><i>Kebanyakan puas kami melihat nya dari pengajuan permohonan mereka yang melebihi, dari rasionalitas anggaran kegiatan yang akan mereka laksanakan</i></p>
26	<p>Apakah ada unsur pembelajaran yang terjadi pada ormas dan masyarakat terkait program dana hibah ini? jelaskan!</p> <p><i>Sudah tentu ada apalagi dari BPK selalu mengoreksi dan menegur jika ada ketidak sesuaian antara realisasi dan Peraturan</i></p>
27	<p>Apakah dalam pelaksanaan pemberian hibah ini ada perkembangan kearah yang lebih baik ? atau sebaliknya? jelaskan.</p> <p><i>Perkembangan kearah lebih baik tentu ada semenjak program pemberian hibah ini dilaksanakan telah beberapa kali terjadi pembenahan-pembenahan terutama Peraturan-peraturan yang jadi acuan mengalami Perubahan</i></p>

**Pedoman Wawancara**  
**Pertanyaan Untuk Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tana**  
**Tidung**

**Identitas**

Nama : Japri, A.Ma. Pd  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Suku : Tidung  
 Agama : Islam  
 Alamat : Tideng Pale Timur Kecamatan Sesayap  
 Usia : 47 Tahun  
 Jabatan/Posisi : Kasubag. Kesejahteraan Sosial

**Pertanyaan :**

No	Pertanyaan
1	Sejak kapan Bagian Kesra Setda KTT ini melaksanakan program hibah untuk organisasi masyarakat? <i>Sejak Tahun 2009 sampai sekarang</i>
2	Bagaimana secara umum pelaksanaannya dari awal sampai sekarang? <i>Proses awal-awal berdirinya Kabupaten perencanaan Dana Hibah masih bersifat Gelondongan dalam arti jika ada pengajuan proposal Dana Hibah akan di verifikasi secara langsung dan jika disetujui Kepala Daerah akan di tetapkan melalui Surat Keputusan</i>
3	Bagaimana respon ormas-ormas yang ada di KTT terhadap dana hibah tersebut? <i>Mereka sangat ketergantungan dengan bantuan Dana Hibah Daerah dan donasi dari masyarakat</i>
4	Bagaimana penganggaran dana hibah untuk ormas? <i>Secara umum melalui APBD sudah berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya seringkali proposal disampaikan pada saat tahun berjalan, jadi sulit direalisasikan. Bisa pun biasanya melalui mekanisme APBD-P. Pada awal terbentuknya kabupaten ini masih bisa, namun kita sudah mulai menata bahwa pengusulan proposal harus pada tahun sebelumnya. Artinya pada tahun pembahasan anggaran</i>
5	Bagaimana pelaksanaan kegiatan yang dilakukan ormas-ormas dengan dana hibah tersebut? <i>Sudah dilaksanakan dengan baik dan terdapat timbal balik yang positif hanya saja sering terlambat dalam pelaporan pertanggungjawaban. Namun masih banyak ormas mengajukan proposal untuk operasional berupa barang dan jasa dan sedikit yang mengajukan untuk kegiatan; sangat tidak efektif. Termasuk sewa tempat sekretariat meski tidak tercantum dalam laporan pertanggungjawaban, secara tidak langsung mengurangi nilai keefektifan</i>

	<i>organisasi</i>
6	<p>Bagaimana pertanggungjawabannya (pelaporan kegiatan) ormas kepada pemerintah daerah?</p> <p><i>Kurangnya kesadaran dari Penerima Hibah untuk menyerahkan laporannya tepat waktu membuat kami kesulitan</i></p>
7	<p>Bagaimana dengan monitoring dan evaluasi terhadap ormas yang menerima hibah?</p> <p><i>Monitoring dan evaluasi jarang dilakukan oleh bagian kesra mengingat sdm nya maupun sarana operasional. Kerjasama dengan bpk terkait monitoring dan evaluasi terutama peninjauan ke lokasi sekretariat ormas mampu meningkatkan fungsi organisasi masyarakat</i></p>
8	<p>Apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian hibah ormas ?</p> <p><i>Kebanyakan proposal yang diajukan setelah dilakukan verifikasi kelayakan berkas kurang memenuhi persyaratan</i></p>
9	<p>Bagaimana upaya menyelesaikan masalah yang dilakukan?</p> <p><i>Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik kendala-kendala seperti telatnya pelaporan pertanggungjawaban dapat diselesaikan dengan baik, walaupun ada kendalanya yang menyangkut kesadaran untuk bertanggungjawab</i></p>
10	<p>Apa harapan kedepan terkait program pemberian hibah ini?</p> <p><i>Si penerima hibah ini harus memiliki kesadaran dan pemahaman untuk bisa mengikuti aturan pemberian hibah yang berlaku, biar sama-sama merasa aman</i></p>
11	<p>Apa tujuan dari program pemberian hibah pada ormas?</p> <p><i>Agar masyarakat dapat diberdayakan melalui Ormas-ormas yang ada, artinya fungsi Ormas sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat</i></p>
12	<p>Apakah tujuan tersebut disepakati oleh pihak-pihak terkait?</p> <p><i>Mereka sangat sepakat secara tertulis maupun lisan</i></p>
13	<p>Apakah tujuan pemberian hibah ormas tersebut dimengerti oleh ormas?</p> <p><i>Hampir semua Ormas memahami dan mengerti tujuan hibah, sebab dari dana hibah ini manfaatnya untuk kepentingan masyarakat juga</i></p>
14	<p>Apakah tujuan tersebut sampai saat ini sudah terwujud?</p> <p><i>Menurut kami sudah terwujud</i></p>
15	<p>Bagian-bagian birokrasi mana saja yang terlibat dalam pemberian dana hibah ormas ini?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pendidikan</li> <li>2. Kementerian Agama</li> <li>3. Kesbang Linmas</li> <li>4. Bagian Hukum dan organisasi</li> <li>5. Bagian Keuangan</li> <li>6. Inspektorat</li> </ol>
16	<p>Apakah antar bagian sudah dapat melaksanakan fungsinya masing-masing?</p> <p><i>Belum semua bagian menjalankan fungsinya masing-masing</i></p>
17	<p>Apakah koordinasi antar bagian terlaksana dengan baik?</p>

	<i>Belum terkoordinasi dengan baik</i>
18	Apakah ada hambatan yang muncul dari bagian tertentu? jelaskan! <i>Minimnya pemahaman masing-masing Bagian akan pentingnya tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan Hibah</i> <i>Ormas kurang rasa tanggungjawab untuk melaporkan bantuan hibah mereka</i>
19	Sejauh mana hubungan antara bagian pemberi dana hibah (kesra/kesmas) dengan ormas yang diberi dana hibah? <i>Tidak ada bahasa akrab atau tidak akrab tetapi kami menerimanya sebagai tugas pelayanan kami terhadap masyarakat</i>
20	Sejauh mana keinginan ormas terhadap dana hibah tersebut dapat terpenuhi oleh pemda (kesra)? <i>Pemberian Dana Hibah kepada Ormas tidak diwajibkan pemerintah untuk memberikannya akan tetapi sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran yang ada</i>
21	Secara financial, apakah bantuan tersebut dapat memberikan manfaat kepada ormas? <i>Menurut kami sangat bermanfaat</i>
22	Secara financial, apakah ormas yang menerima menyalurkan manfaat kepada masyarakat? dalam bentuk apa saja? <i>Ormas dapat menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan serta operasional kesekretariatan</i>
23	Bagaimana kepuasan ormas dengan adanya program pemberian dana hibah ini? <i>Ada yang puas karena sesuai kebutuhan rencana mereka</i> <i>Ada juga yang tidak puas karena tidak sesuai ekpektasi mereka dengan alokasi dana yang diberikan oleh Pemda</i>
24	Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan ormas dengan uang hibah tersebut? <i>Masyarakat sangat puas karena mereka dilibatkan dalam kegiatan Ormas tersebut</i>
25	Apakah besaran dana hibah yang diberikan sesuai dengan kepuasn ormas dan masyarakat yang menerima kegiatan? jelaskan! <i>Menurut kami sebagian Ormas ada yang puas begitu juga sebaliknya ada juga yang tidak puas tetapi mereka tetap bersemangat dan antusias</i>
26	Apakah ada unsur pembelajaran yang terjadi pada ormas dan masyarakat terkit program dana hibah ini? jelaskan! <i>Sangat banyak pembelajaran yang kami dapat dari kegiatan Ormas tersebut sebab kami melihat masyarakat dapat merasakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Ormas</i>
27	Apakah dalam pelaksanaan pemberian hibah ini ada perkembangan ke arah yang lebih baik ? atau sebaliknya? jelaskan. <i>Jelas ada, komunikasi dan koordinasi yang berlangsung secara terus menerus memperbaiki kesalahan dan ketidak sesuaian dapat mengalami perkembangan ke arah yang lebih positif</i>

**Pedoman Wawancara**  
**Pertanyaan Untuk Ormas Penerima Dana Hibah Kabupaten Tana Tidung**

**Identitas**

Nama : Faisal Idris

Jenis Kelamin : Laki-laki

Suku : Bugis

Agama : Islam

Alamat : Kecamatan sesayap Hilir

Usia : 43 Tahun

Ormas : Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tana  
Tidung**Pertanyaan**

No	Pertanyaan
1	Sejak kapan ormas Anda mendapatkan dana hibah dari Kesra KTT? <i>Sejak Tahun 2010</i>
2	Bagaimana respon ormas-ormas yang ada di KTT terhadap dana hibah tersebut? <i>Sangat positif membantu sekali</i>
3	Bagaimana pelaksanaan kegiatan yang dilakukan ormas Anda dengan dana hibah tersebut? <i>Pelaksanaan kegiatan yang kami lakukan berjalan dengan baik terutama di daerah ini masyarakatnya sangat komplek berbagai suku dan agama ada khusus untuk kerukunan umat beragama kami mewadahnya</i>
4	Bagaimana pertanggungjawabanya (pelaporan kegiatan) ormas kepada pemerintah daerah yang anda lakukan? <i>Untuk Pertanggungjawaban laporan sudah kami setorkan tapi kadang kami terlambat karena keterbatasan kami mengolah dokumentasi dan pembiayaan</i>
5	Bagaimana prosedur pengajuan sampai pelaporan dana hibah yang anda lakukan? <i>Kami mengajukan proposal dana hibah disertai kelengkapannya setelah itu nanti Kesra melakukan verifikasi yang kemudian nanti jika diterima kami akan membuat proposal realisasi untuk pencairan dana hibah Kalau untuk Laporan Pertanggungjawaban kami membuatnya setelah kegiatan dilaksanakan</i>
6	Apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian hibah ormas

	<p>?</p> <p><i>Kendalanya hanya kemampuan kami terbatas dalam mengelola administrasi untuk itu kami sering berkonsultasi ke Bagian Kesra</i></p>
7	<p>Bagaimana upaya menyelesaikan masalah yang dilakukan? <i>Ya dengan berkoordinasi dengan Bagian Kesra</i></p>
8	<p>Apa harapan kedepan terkait program pemberian hibah ini? <i>Harapannya agar Pemerintah juga membantu kami dalam membuat laporan Pertanggungjawaban tersebut</i></p>
9	<p>Menurut Anda Apa tujuan dari program pemberian hibah pada ormas? <i>Tujuannya memudahkan kami mengadakan Kegiatan dengan dana hibah mengingat Lembaga kami ini sangat penting sebagai wadah kerukunan umat beragama di Kabupaten Tana Tidung</i></p>
10	<p>Apakah tujuan tersebut sudah terwujud? <i>Saya rasa sudah terwujud</i></p>
11	<p>Bagaimana proses birokrasi dan administrasi pemberian Hibah ormas di KTT? <i>Ya terkadang agak lambat misalnya kalau Pejabat yang berkepentingan tidak ada ditempat sehingga prosesnya terlambat membuat kegiatan kami juga terlambat namun untuk anggaran operasional bisa dicarikan tempat lain</i></p>
12	<p>Apakah antar bagian sudah dapat melaksanakan fungsinya masing-masing? <i>Saya rasa sudah sesuai dengan fungsinya</i></p>
13	<p>Apakah koordinasi antar bagian terlaksana dengan baik? <i>Iya terlaksana dengan baik</i></p>
14	<p>Apakah ada hambatan yang muncul dari bagian tertentu? jelaskan! <i>Tidak ada</i></p>
15	<p>Sejauh mana hubungan antara bagian pemberi dana hibah (kesra/kesmas) dengan ormas Anda? <i>Dengan bantuan tersebut sangatlah membantu kami dalam melaksanakan kegiatan Ormas sesuai dengan Program Kerja</i></p>
16	<p>Secara financial, apakah bantuan tersebut dapat memberikan manfaat kepada ormas? <i>Jelas sangat bermanfaat untuk melaksanakan kegiatan maupun program kami yang telah disusun</i></p>
17	<p>Secara financial, apakah ormas yang menerima menyalurkan manfaat kepada masyarakat? dalam bentuk apa saja? <i>FKUB melaksanakan kegiatan yang bersifat lintas agama melalui pendekatan komunikasi jadi kegiatan kami lebih banyak berbentuk sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh agama</i></p>
18	<p>Bagaimana kepuasan ormas dengan adanya program pemberian dana hibah ini? <i>Sangat puas karena sudah dibantu dengan Hibah</i></p>
19	<p>Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan ormas dengan uang hibah tersebut?</p>

	<i>Masyarakat cukup puas</i>
20	Apakah besaran dana hibah yang diberikan sesuai dengan kepuasan ormas dan masyarakat yang menerima kegiatan? jelaskan! <i>Kalau untuk Ormas kami rasa sudah cukuplah</i>
21	Apakah ada unsur pembelajaran yang terjadi pada ormas dan masyarakat terkait program dana hibah ini? jelaskan! <i>Ada unsur pembelajaran terutama tanggungjawab mengelola uang Negara</i>
22	Apakah dalam pelaksanaan pemberian hibah ini ada perkembangan kearah yang lebih baik ? atau sebaliknya? jelaskan. <i>Tentu ada perkembangan ke arah yang lebih baik kalau sebaliknya berarti gagal pemberian dana hibah ini, memang saya lihat setiap tahun anggaran Hibah kepada kami mulai menurun namun kami maklumi karena mungkin dana tersebut untuk pembangunan yang lainnya</i>



**Pedoman Wawancara**  
**Pertanyaan Untuk Ormas Penerima Dana Hibah Kabupaten Tana Tidung**

**Identitas**

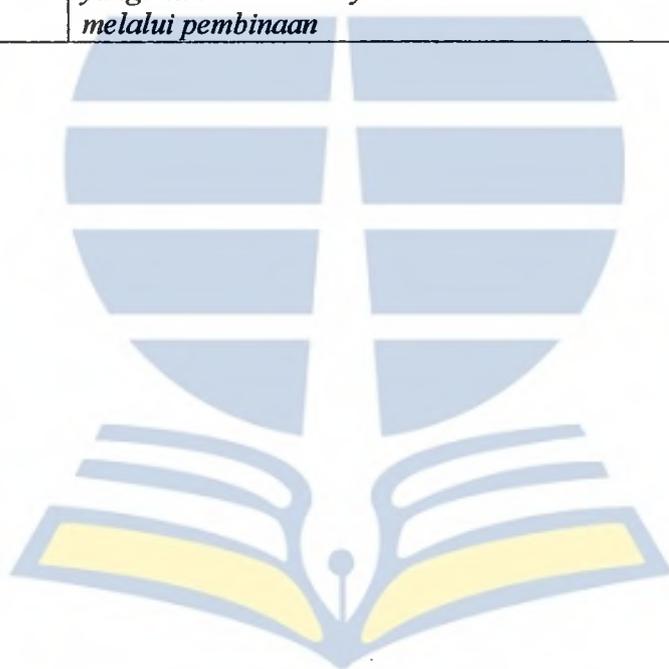
Nama : Saiful  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Suku : Dayak  
 Agama : Kristen  
 Alamat : Desa Sedulun Kecamatan sesayap  
 Usia : 40 Tahun  
 Ormas : Lembaga Adat dayak Belusu Kabupaten Tana Tidung

**Pertanyaan**

No	Pertanyaan
1	Sejak kapan ormas Anda mendapatkan dana hibah dari Kesra KTT? <i>Sejak Tahun 2012</i>
2	Bagaimana respon ormas-ormas yang ada di KTT terhadap dana hibah tersebut? <i>Baik dan kami sangat antusias</i>
3	Bagaimana pelaksanaan kegiatan yang dilakukan ormas Anda dengan dana hibah tersebut? <i>Berjalan baik sesuai dengan Program Kerja yang dicantumkan dalam Proposal Pengajuan bantuan Hibah untuk Operasional Kegiatan Pemberdayaan Lembaga</i>
4	Bagaimana pertanggungjawabannya (pelaporan kegiatan) ormas kepada pemerintah daerah yang anda lakukan? <i>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta realisasi anggaran yang tercantum dalam Proposal realisasi, walaupun ada yang tidak sesuai peruntukannya kami akan melaporkan</i>
5	Bagaimana prosedur pengajuan sampai pelaporan dana hibah yang anda lakukan? <i>Pengajuan Proposal permohonan awal pada tahap perencanaan dan tahun berikutnya jika hasil verifikasi diterima maka kami mengajukan proposal realisasi yang menjadi dasar laporan pertanggungjawaban dana hibah</i>
6	Apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian hibah ormas ? <i>Tidak ada selama ini kami sering berkonsultasi ke Bagian Kesejahteraan Rakyat</i>
7	Bagaimana upaya menyelesaikan masalah yang dilakukan? <i>Berkoordinasi dan konsultasi baik dengan bagian/dinas terkait</i>

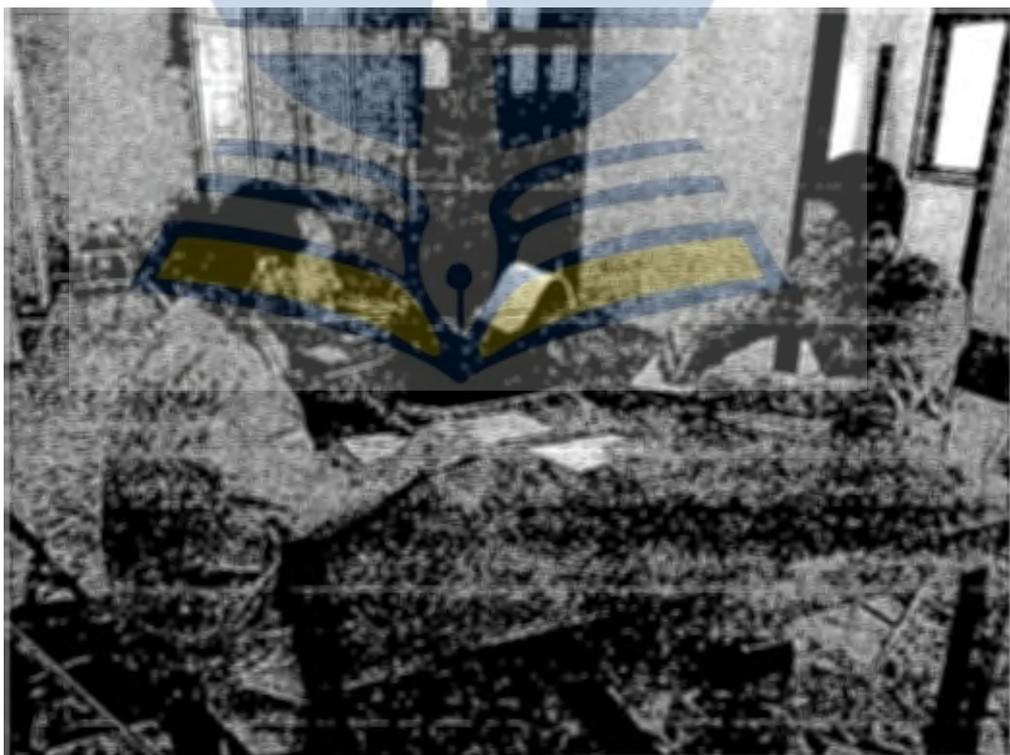
	<i>maupun dilakukan dalam musyawarah (rapat) internal Organisasi</i>
8	<p>Apa harapan kedepan terkait program pemberian hibah ini?  <i>Harapan kedepan agar bantuan ini dapat ditingkatkan sesuai dengan kegiatan yang tepat sasaran, efektif dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat terutama lembaga kami yang mengelola kegiatan adat dan budaya serta kesenian daerah</i></p>
9	<p>Menurut Anda Apa tujuan dari program pemberian hibah pada ormas?  <i>Tujuannya menunjang kegiatan positif untuk lembaga kami yang mewadahi adat istiadat dan kebudayaan daerah</i></p>
10	<p>Apakah tujuan tersebut sudah terwujud?  <i>Sesuai dengan program kerja dalam AD/ART kami sudah dilaksanakan dan terwujud dan perlu adanya kerjasama yang baik antar Ormas dan pemerintah dalam pembinaan serta pemberdayaan masyarakat</i></p>
11	<p>Bagaimana proses birokrasi dan administrasi pemberian Hibah ormas di KTT?  <i>Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung</i></p>
12	<p>Apakah antar bagian sudah dapat melaksanakan fungsinya masing-masing?  <i>Khususnya dalam lembaga sendiri maka dari semua bidang dan tingkatan telah berfungsi dengan baik</i></p>
13	<p>Apakah koordinasi antar bagian terlaksana dengan baik?  <i>Iya terlaksana dengan baik</i></p>
14	<p>Apakah ada hambatan yang muncul dari bagian tertentu? jelaskan!  <i>Tidak ada</i></p>
15	<p>Sejauh mana hubungan antara bagian pemberi dana hibah (kesra/kesmas) dengan ormas Anda?  <i>Dengan bantuan tersebut sangatlah membantu kami dalam melaksanakan kegiatan Ormas sesuai dengan Program Kerja</i></p>
16	<p>Secara financial, apakah bantuan tersebut dapat memberikan manfaat kepada ormas?  <i>Jelas sangat bermanfaat untuk melaksanakan kegiatan maupun program kami</i></p>
17	<p>Secara financial, apakah ormas yang menerima menyalurkan manfaat kepada masyarakat? dalam bentuk apa saja?  <i>Iya kami menyalurkannya melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan baik dibidang kerajinan tangan maupun di bidang kesenian daerah</i></p>
18	<p>Bagaimana kepuasan ormas dengan adanya program pemberian dana hibah ini?  <i>Kami sebagai ormas/lembaga cukup terbantu namun perlu ditingkatkan lagi jumlah alokasi anggarannya mengingat banyaknya program kami yang belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan bantuan</i></p>
19	<p>Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan ormas dengan uang hibah tersebut?</p>

	<i>Masyarakat sangat antusias dan positif</i>
20	Apakah besaran dana hibah yang diberikan sesuai dengan kepuasan ormas dan masyarakat yang menerima kegiatan? jelaskan! <i>Belum cukup puas karena anggaran hibah tersebut belum cukup mengcover kegiatan kami, semoga hal ini bisa jadi pertimbangan peningkatan anggaran hibah kepada lembaga kami</i>
21	Apakah ada unsur pembelajaran yang terjadi pada ormas dan masyarakat terkait program dana hibah ini? jelaskan! Pembelajaran lebih kepada masyarakat melalui program kegiatan seperti pelatihan kerajinan tangan, seni ukir, festival seni tari
22	Apakah dalam pelaksanaan pemberian hibah ini ada perkembangan kearah yang lebih baik ? atau sebaliknya? jelaskan. <i>Dengan pelaksanaan nya bantuan dana hibah ini tentu memberi hal yang positif dalam perkembangan yang lebih baik dari sebelumnya yang mana dari budaya baik kesenian telah tertata dan berkembang melalui pembinaan</i>





Wawancara bersama Ketua Lembaga Adat dayak Belusu (Saiful)



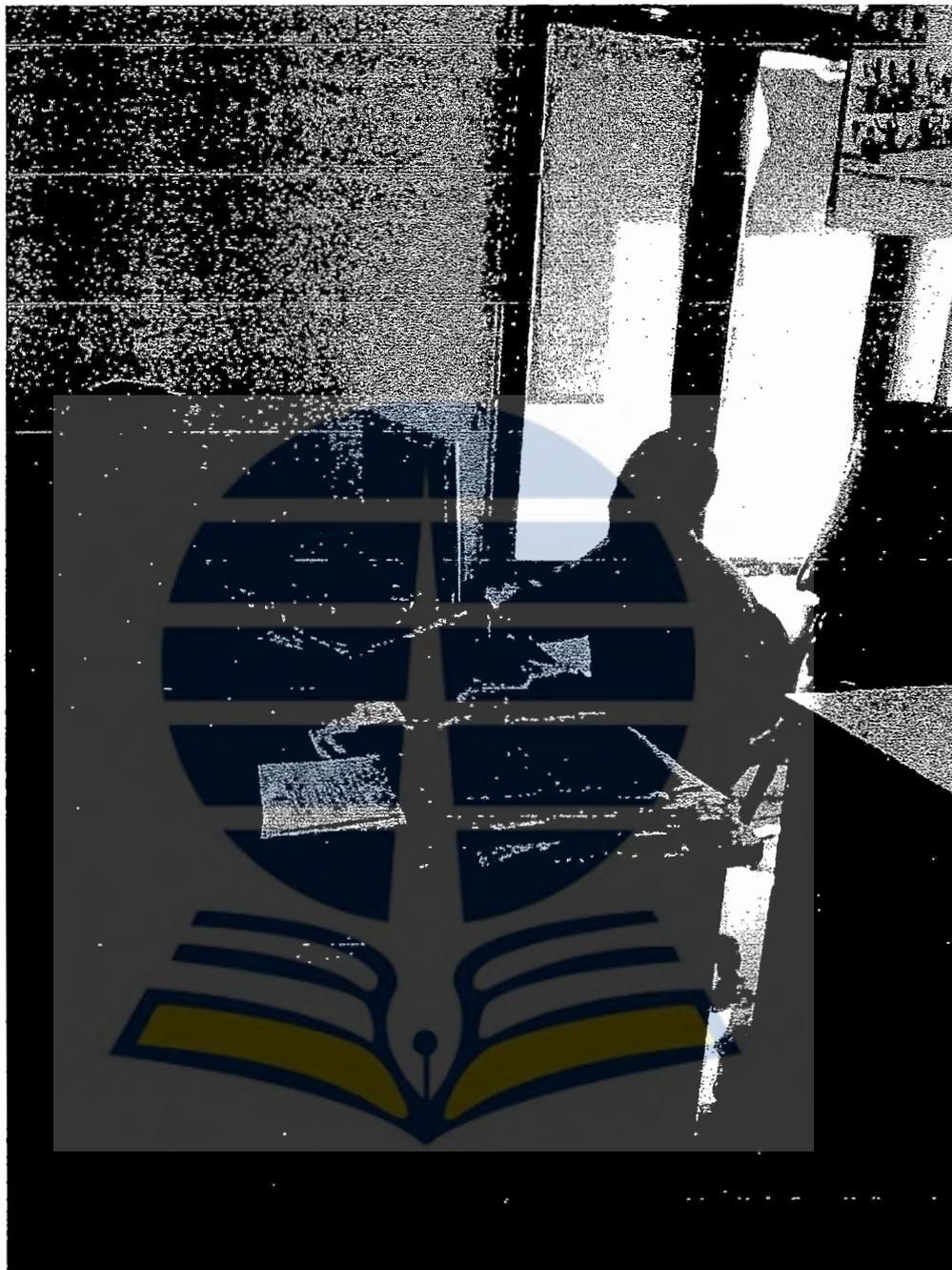


**Wawancara bersama dengan Bendahara Bantuan Sosial dan Hibah (Nejon)**



**Wawancara bersama Kepala bagian Kesejahteraan Rakyat Setda  
Kabupaten Tana Tidung (Uus Rusmanda)**





**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR: 460/313/K-XII/2014  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH DALAM BENTUK UANG KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH/ORGANISASI/KELOMPOK MASYARAKAT DARI PEMERINTAH  
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN ANGGARAN 2015**

No	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA
1	Bantuan Kepada PDAM	Kec. Sesayap
2	Bantuan kepada NCW Tana Tidung	Kec. Sesayap
3	LPTQ Kab. Tana Tidung	Kec. Sesayap
4	BAZDA Kab. Tana Tidung	Kec. Sesayap
5	FKUB Kab. Tana Tidung	Kec. Sesayap
6	Bantuan Kepada PHBI	Kec. Sesayap
7	Bantuan Kepada Pengurus DKD (Dewan Kesenian Daerah) Kab. Tana Tidung	Kec. Sesayap
8	Pengurus Dharma Wanita Kab. Tana Tidung	Kec. Sesayap
9	Pengurus MUI Kab. Tana Tidung	Kec. Sesayap
10	Pengurus Kwartir Pramuka Kab. Tana Tidung	Kec. Sesayap
11	Pengurus KNPI Kab. Tana Tidung	Kec. Sesayap
12	Pengurus KONI Kab. Tana Tidung	Kec. Sesayap
13	Bantuan Kepada Pengurus PGRI Kab. Tana Tidung	Kec. Sesayap
14	Bantuan Kepada GMPI Kab. Tana Tidung	Kec. Sesayap
15	Bantuan Kepada KPU Kab. Tana Tidung	Kec. Sesayap
16	Bantuan Kepada Panwaslu Kabupaten Tana Tidung	Kec. Sesayap
17	Bantuan Kepada Ikatan Pelajar Mahasiswa Kab. Tana Tidung (IPM-KTT) di Tarakan	Kec. Sesayap
18	Bantuan Kepada Forum Mahasiswa Kab. Tana Tidung di Samarinda	Kec. Sesayap
19	Bantuan Kepada BKPMRI kabupaten Tana Tidung	Kec. Sesayap
20	Pengurus AMPI	Kec. Sesayap
21	Bantuan Kepada PAKUWAJA Tana Tidung	Kec. Sesayap
22	Ikatan Pelajar Mahasiswa KTT di Bulungan	Kec. Sesayap
23	Pengurus Cabang Al Khaerat Kab. Tana Tidung	Kec. Sesayap
24	PJB Lembur Kuring Kab. Tana Tidung	Kec. Sesayap
25	PPIH Kabupaten Tana Tidung	Kec. Sesayap
26	TMMD Reguler Kodim 0903/TRS	Kec. Sesayap
27	Polres Bulungan	Kec. Sesayap
28	LAT Kabupaten Tana Tidung	Kec. Sesayap
29	Lembag Adat Belusu	Kec. Sesayap
30	Pengurus Daerah FKRT Kabupaten Tana Tidung	Kec. Sesayap
31	BNK Kabupaten Tana Tidung	Kec. Sesayap
32	Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawina (BP-4)	Kec. Sesayap
33	Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI)	Kec. Sesayap
34	Pengurus Pencak Silat ASAD	Kec. Sesayap
35	Bantuan Kepada Polsek Sesayap	Kec. Sesayap
36	Bantuan Kepada Yayasan Pendidikan Islam Tidung Ceria	Kec. Sesayap
37	Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Primajaya	Kec. Sesayap

38	Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan & Pengamalan Agama (LP2A)	Kec. Sesayap
39	Koramil Sesayap	Kec. Sesayap
40	Bantuan Kepada Legium Veteran Republik Indonesia (LVRI)	Kec. Sesayap
41	Bantuan Kepada TPA Yayasan Al-Hidayah	Kec. Sesayap
42	Bantuan Kepada Tenggara Racing Team	Kec. Sesayap
43	Bantuan Kepada Pengurus GP Anshor Kabupaten Tana Tidung	Kec. Sesayap
44	Bantuan Kepada Ikatan Bidan Indonesia (IBI)	Kec. Sesayap
45	Bantuan Kepada Forum Pembinaan Keagamaan (FPK) Tana Lia	Kec. Tana Lia
46	Bantuan Kepada Upun Taka Racing Club	Kec. Sesayap
47	Bantuan Kepada Ikatan Mubaligh Kabupaten Tana Tidung	Kec. Sesayap
48	Bantuan Kepada Pengurus Pergerakan Pemuda Peduli Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung	Kec. Sesayap
49	Bantuan Kepada Masjid (Masjid Agung)	Kec. Sesayap
50	Bantuan Kepada Panitia Pesantren Ramadhan Kelompok Bermain Al-Khairat	Kec. Sesayap
51	Bantuan Kepada Panitia Pesantren Ramadhan Langgar Al-Hikmah	Kec. Sesayap
52	Bantuan Kepada Panitia Pesantren Ramadhan Langgar Nurul Jadid	Kec. Sesayap
53	Bantuan Kepada Panitia Pesantren Ramadhan Masjid Agung Al-Taqwa	Kec. Sesayap
54	Bantuan Kepada Panitia Pesantren Ramadhan Masjid Agung Fastabiqulkhairat	Kec. Sesayap
55	Bantuan Kepada Panitia Pesantren Ramadhan Masjid Al-Jihad	Kec. Sesayap
56	Bantuan Kepada Panitia Pesantren Ramadhan Mushalla Al-Muamar Tana Lia	Kec. Tana Lia
57	Bantuan Kepada Panitia Pesantren Ramadhan Masjid Daarul Ibad Tana Merah	Kec. Tana Lia
58	Bantuan Kepada Panitia Pesantren Ramadhan Mushalla Nurul Ikhlas Tideng Pale	Kec. Sesayap
59	Bantuan Kepada Majelis Taklim Al-Khairat Tana Lia	Kec. Tana Lia
60	Bantuan Kepada Pesantren Ramadhan Musallah Daarul Hikmah	Kec. Sesayap Hilir
61	Bantuan Kepada Himpunan Pengajian Aannisa Arachman	Kec. Sesayap
62	Bantuan Kepada Pengurus Shalawat Nurul Ikhlas	Kec. Sesayap
63	Bantuan Kepada Pengurus Mushalla Daarul Hikmah	Kec. Sesayap
64	Panitia Paskah Gereja Katholik Paroki Santo Paulus Tideng Pale	Kec. Sesayap
65	Panitia Temu Raya Sekami Tideng Pale	Kec. Sesayap
66	GPDI PELWAB Wilayah Kabupaten Tana Tidung	Kec. Sesayap
67	Panitia Retret OMK Paroki Santo Paulus Tideng Pale	Kec. Sesayap
68	Paud Permata Bunda Kabupaten Tana Tidung	Kec. Sesayap
69	Paud Permata Hati Kabupaten Tana Tidung	Kec. Sesayap
70	Panitia Pelaksana Simposium Pengakuan Hak Adat dan Pelestarian Tradisi dan Budaya Ulun Pagun	Kec. Sesayap
71	Sholawat Masjid Agung	Kec. Sesayap
72	Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI)	Kec. Sesayap
73	Bird Club Rimba Taka Kegiatan Pameran dan Lomba Burung Berkicau	Kec. Sesayap
74	Rumah Baca Taka	Kec. Sesayap Hilir
75	Kegiatan Musyawarah Besar Paguyuban Keluarga Timur (PAKET)	Kec. Sesayap
76	Persaudaraan Muallaf ( PEMAAF)	Kec. Sesayap
77	Masjid Al-Jami	Kec. Sesayap Hilir
78	Kelompok Shalawat Langgar Al-Hikmah	Kec. Sesayap
79	Masjid Istiqomah	Kec. Tana Lia
80	Cetiya Giri Dharma Mulia	Kec. Sesayap
81	Bantuan Kepada Majelis Taklim Nurul Khairat	Kec. Sesayap
82	Bantuan Kepada Masjid Sholihin	Kec. Sesayap Hilir

83	GPDI El-Gibor Seludau	Kec. Sesayap Hilir
84	Gereja Katholik St. Bernardus Stasi Mengkabit	Kec. Sesayap
85	GPDI Limbu Sedulun	Kec. Sesayap
86	GPDI Desa Maning Jemaat Gracia Trans Kujau	Kec. Betayau
87	Gereja Katholik Santo Paulus	Kec. Sesayap
88	GSJA Filadelfia	Kec. Muruk Rian
89	Gereja Katholik St. Maria Immakulata	Kec. Sesayap Hilir
90	Bantuan Kepada GKII Tideng Pale	Kec. Sesayap
91	Bantuan Kepada Pos Bethany Tideng Pale	Kec. Sesayap
92	Bantuan Kepada GSJA Tideng Pale	Kec. Sesayap
93	Bantuan Kepada Stasi Gabriel Sedulun	Kec. Sesayap
94	Bantuan Kepada Ekomene Samandaru Sedulun	Kec. Sesayap
95	Bantuan Kepada GKPI Safari	Kec. Muruk Rian
96	Bantuan Kepada Bethany Indonesia Sapari	Kec. Muruk Rian
97	Bantuan Kepada GKPI Limbu Sedulun	Kec. Sesayap
98	Bantuan Kepada Stasi Lucia Sebidai Paroki Santo Paulus Tideng Pale	Kec. Sesayap
99	Bantuan Kepada GKII Sebidai	Kec. Sesayap
100	Bantuan Kepada GPDI Jemaat Eben Haezer Sebidai	Kec. Sesayap
101	Bantuan Kepada GKPI Sebidai	Kec. Sesayap
102	Bantuan Kepada GPDI Sebawang	Kec. Sesayap
103	Bantuan Kepada ST Lukas Sebawang	Kec. Sesayap
104	Bantuan Kepada GKII Gunawan	Kec. Sesayap
105	Bantuan Kepada GKPI Seputuk	Kec. Muruk Rian
106	Bantuan Kepada Katholik ST Yohanes Seputuk	Kec. Muruk Rian
107	Bantuan Kepada GKII Seputuk	Kec. Muruk Rian
108	Bantuan Kepada ST Corolous HTI Rian	Kec. Muruk Rian
109	Bantuan Kepada Katholik ST Markus Stasi Kapuak	Kec. Muruk Rian
110	Bantuan Kepada GPDI Rian Kapuak	Kec. Muruk Rian
111	Bantuan Kepada GKPI Rian Kapuak	Kec. Muruk Rian
112	Bantuan Kepada Stasi Mikael Tembalang Mendupo	Kec. Betayau
113	Bantuan Kepada GKII Bebakung	Kec. Betayau
114	Bantuan Kepada Katholik Xaparius Bebakung	Kec. Betayau
115	Bantuan Kepada GKII Trans Kujau	Kec. Betayau
116	Bantuan Kepada Katholik ST Petrus Kujau	Kec. Betayau
117	Bantuan Kepada GKII Kujau	Kec. Betayau
118	Bantuan Kepada Khatolik ST Eugenius Trans Tahap 2 Tana Merah	Kec. Tana Lia
119	Bantuan Kepada GKII Tana Merah	Kec. Tana Lia
120	Gereja GPDI Alfa Omega Kasai	Kec. Betayau
121	Gereja Toraja Kab. Tana Tidung	Kec. Sesayap
122	Bantuan Kepada Badan Dakwah Islamiyah KTT	Kec. Sesayap
123	Tim Pengembangan Singkong Gajah Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan demplot di Desa Gunawan	Kec. Sesayap
124	Yayasan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Hidayatullah Kab. Tana Tidung	Kec. Sesayap
125	Pengurus TPA Nurul Ilmi	Kec. Sesayap
126	Pengurus GPDI Bebakung	Kec. Betayau